Riwayat Hidup
dan Perjuangan
Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Ulama Pejuang Kemerdekaan

Riwayat Hidup dan Perjuangan
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
Ulama Pejuang Kemerdekaan

Riwayat Hidup dan Perjuangan
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
Ulama Pejuang Kemerdekaan

Ditulis secara ilmiah dan disusun secara sistematis
berdasarkan data yang akurat melalui proses
seminar, sarasehan dan diskusi

Tim Penyusun:
Lukman Hakim Saifuddin
Ali Zawawi
Zubairi Hasan
Sahlul Fuad

Jakarta:
Yayasan Saifuddin Zuhri
2013

Riwayat Hidup dan Perjuangan
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
Ulama Pejuang Kemerdekaan

Penerbit:
YAYASAN SAIFUDDIN ZUHRI
Jl. Daud No. 31 Kebayoran Lama, Jakarta 12240
Telp. 021 7294525 Fax. 021 7292751

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan lautan nikmat, sehingga penyusunan buku ini dapat terlaksana sesuai dengan rencana.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* yang telah mengangkat harkat dan martabat umat manusia dari zaman kegelapan jahiliyah menuju masa yang penuh dengan pencerahan.

Buku ini disusun dengan tujuan agar pemikiran, sikap, dan perjuangan Prof. KH. Saifuddin Zuhri dapat terus menjadi inspirasi bagi seluruh anak bangsa dalam mengarungi bahtera kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Prof. KH. Saifuddin Zuhri, sosok yang pernah keluar masuk hutan untuk bergerilya lalu pernah menjadi seorang menteri, adalah cermin seorang pribadi yang bersahaja dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kehidupan beliau, mulai dari usia belasan tahun sampai meninggal dunia, penuh dengan kisah heroik tentang kesungguhan, kerja keras, perjuangan, dan kepahlawanan.

Buku ini merupakan tindak lanjut dari percikan-percikan pemikiran yang terlontar dalam seminar "Perjuangan dan Pengabdian Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk Negara dan Bangsa" yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), 2 Juli 2013. Dalam seminar ini, tokoh-tokoh dari berbagai kalangan, bahkan juga dari kalangan non-muslim, memberikan kesaksian tentang peran Prof. KH. Saifuddin Zuhri dalam kehi-

dupan berbangsa dan bernegara. Kesaksian itu kemudian dilacak kembali dalam berbagai literatur sehingga kemudian terangkum dalam sebuah buku yang ringkas ini.

Buku ini ditulis dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana dan ringkas, namun tetap menjunjung tinggi kaidah ilmiah, terutama terkait dengan sistematika, pengutipan rujukan, dan analisa. Karena buku ini termasuk buku sejarah, maka metode yang digunakan adalah metode penulisan sejarah tematik, yaitu mengupas sisi kehidupan Prof. KH. Saifuddin Zuhri yang terkait dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keperintisan dan kepeloporannya dalam bidang lain yang penuh keteladanan.

Penyusun menyadari bahwa buku ini masih penuh dengan kekurangan dan kelemahan, baik dari sisi teknik penulisan, analisa, maupun dari sisi lainnya. Walau begitu penyusun berharap kehadiran buku memberikan manfaat bagi masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Jakarta, 23 Juli 2013
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Lampiran-Lampiran

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prof. KH. Saifuddin Zuhri (1919-1986) selain dikenal sebagai Menteri Agama juga dikenal sebagai seorang wartawan, pejuang, politisi, dan ulama. Hampir seluruh hidupnya didedikasikan untuk negara dan bangsanya melalui berbagai medan dan media. Sejak usia muda dia sudah berproses dan terlibat menjadi bagian tak terpisahkan bersama-sama bangsanya. Memang, Republik ini didirikan oleh orang-orang muda. Budi Utomo didirikan oleh orang-orang berusia antara 18-23 tahun. Dan Prof. KH. Saifuddin Zuhri berada dalam posisi yang penting dalam komunitas perjuangan bangsa pada usia yang masih muda.

Semangat belajar dan jiwa kepeloporan Prof. KH. Saifuddin Zuhri di lingkungan organisai Pemuda Ansor NU mampu membuka wawasan dan langkah kakinya dari pesantren yang berada di sebuah kawedanan Sokaraja, Banyumas melesat cepat hingga ke pentas nasional. Ketekunannya dalam mengasah potensi yang dimiliki tidak hanya mendorongnya menjadi sekadar guru madrasah atau pengarang lokal, tetapi meningkat menjadi guru bangsa dan *kolumnis* nasional. Kepribadiannya yang sangat kental sebagai santri tidak hanya disegani tetangga dan guru-gurunya, tetapi juga menjadi rujukan anak bangsa.

Di balik kesantunan dan kesederhanaannya, tersimpan

“magma” yang sewaktu-waktu dapat meledak dalam bentuk aksi-aksi yang justru memberikan manfaat bagi negara dan bangsanya. Kehati-hatian dan kecermatannya dalam membuat keputusan mampu menyelamatkan dirinya dari berbagai rintangan yang dilaluinya di medan peperangan fisik maupun politik.

Mungkin Prof. KH. Saifuddin Zuhri tidak pernah membayangkan sebelumnya jika langkah-langkahnya mampu mempertemukan dan mendekatkan dirinya dengan tokoh-tokoh yang dikagumi. Gambar-gambar para tokoh seperti Ir. Soekarno, KH. Wahab Chasbullah, dan sebagainya dari potongan koran atau majalah yang semula hanya ditempel di kamarnya sewaktu masih muda, pada akhirnya menempel secara fisik bersama-sama berjuang mengabdi untuk negara dan bangsa.

Perjuangan dan pengabdian Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk negara dan bangsa bisa dikatakan telah mencapai tingkat yang “*haqiqat”*. Keberanian dan pengorbanannya untuk kemaslahatan umat dan bangsa benar-benar tidak pernah dihitungnya. Banyak sudah bintang jasa dan penghargaan diterimanya karena perjuangan dan pengabdiannya itu. Karenanya berbagai kalangan mendesak dan memandang perlu untuk mengusulkan Prof. KH. Saifuddin Zuhri sebagai Pahlawan Nasional.

Risalah ini adalah hasil dari tindak lanjut sebuah seminar bertajuk “Perjuangan dan Pengabdian Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk Negara dan Bangsa” yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada 2 Juli 2013 di Jakarta. Para narasumber dan hadirin seminar yang memiliki kapasitas bulat bersepakat bahwa Prof. KH. Saifuddin Zuhri sangat layak, bahkan kualifikasinya melampaui tokoh-tokoh lain yang terlebih dahulu menerima anugerah sebagai pahlawan nasional. Meski demikian, kelayakan Prof. KH. Saifuddin Zuhri sebagai pahlawan nasional masih perlu diuji lagi. Sejauh mana perjuangan dan pengabdiannya masuk dalam kategori sebagai sosok yang layak

menyandang gelar pahlawan nasional?

Melalui risalah ini diharapkan jejak kepahlawanan beliau makin terungkap secara terang benderang untuk selanjutnya dapat diteladani oleh seluruh anak bangsa, terutama untuk menghadapi tantangan di masa kini dan di masa mendatang.

B. Kajian Teoritis

Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Pahlawan juga bisa diartikan sebagai pejuang yang gagah berani.[1] Secara legal formal berdasarkan UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia[2].

Gelar yang berupa Pahlawan Nasional diberikan sebagai upaya untuk: (a) menghargai jasa setiap orang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi yang telah mendarmabaktikan diri dan berjasa besar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara; (b) menumbuhkembangkan semangat kepahlawanan, kepatriotan, dan kejuangan setiap orang untuk kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara; dan c. menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat

---

[1] Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), hlm. 715

[2] UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94.

melahirkan karya terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara[3].

Untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional seseorang harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Yang dimaksud dengan persyaratan umum adalah (a) WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI; (b) memiliki integritas moral dan keteladanan; (c) berjasa terhadap bangsa dan negara; (d) berkelakuan baik; (e) setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan (f) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.[4]

Yang dimaksud persyaratan khusus untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional diberikan kepada seseorang yang telah meninggal dunia dan yang semasa hidupnya: (a) pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa; (b) tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan; (c) melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya; (d) pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara; (e) pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa; (f) memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi; dan/atau (g) melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan

---

[3] Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

[4] Pasal 25 UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

berdampak nasional[5].

Seminar yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama berkesimpulan bahwa Prof. KH. Saifuddin Zuhri sangat layak untuk dianugerahi gelar sebagai Pahlawan Nasional, karena berbagai alasan, sebagai berikut:

1. KH. Said Aqil Siradj, Ketua Umum PBNU, mendukung usul agar Prof. KH. Saifuddin Zuhri mendapat gelar Pahlawan Nasional karena beliau betul-betul mempraktikkan ilmu yang diperolehnya di pesantren, berjihad dan berijtihad, mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, baik dengan tenaga, harta, dan bahkan jiwa. Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Prof. KH. Saifuddin Zuhri akan memberikan inspirasi kepada para santri dan dunia pesantren untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan[6].
2. Harry Tjan Silalahi, Aktivis 1966, peneliti senior *Center for Strategic and International Studies* (CSIS), Prof. KH. Saifuddin Zuhri dapat menjadi seorang muslim yang shaleh dan seorang nasionalis sejati secara bersamaan karena pesantren yang menggemblengnya. Prof. KH. Saifuddin Zuhri mengajarkan dan mempraktikkan bahwa arti dari Islam itu adalah damai, bahwa Islam adalah *rahmatan lil alamin*. Prof. KH. Saifuddin Zuhri mempunyai kesadaran yang tinggi bahwa Islam tertanam dalam kebudayaan Nusantara. Oleh karena itu, beliau seorang muslim yang nasionalis, sehingga tidak ragu-ragu untuk membela bangsa dan negara. Selama kemerdekaan, Prof. KH. Saifuddin Zuhri tidak gamang untuk berkiprah dalam

---

[5] Pasal 26 UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

[6] Kesaksian KH. Said Aqil Siradj disampaikan dalam Seminar "Perjuangan dan Pengabdian Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk Negara dan Bangsa" yang diselenggarakan oleh PBNU, Selasa, 2 Juli 2013.

kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Dalam pesantren diajarkan bahwa “*hubbul wathan, minal iman*” yang berarti cinta tanah air merupakan bagian dari keimanan.[7]

3. KH. Chalid Mawardi, sesepuh NU, menegaskan bahwa Prof. KH. Saifuddin Zuhri mempunyai peran penting untuk mendekatkan antara kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis Islam, melalui gagasan yang disampaikan kepada Jenderal A.H. Nasution agar dalam Dekrit Presiden Soekarno ada pernyataan tegas bahwa Piagam Jakarta menjiwai dan merupakan satu kesatuan dengan UUD 1945. Dengan gagasan itu, kelompok nasionalis Islam dan nasionalis sekuler menerima Dekrit Presiden Soekarno dan Indonesia selamat dari jurang kebuntuan[8].
4. Prof. Dr. Anhar Gonggong, sejarahwan dari Universitas Indonesia, mengatakan bahwa Prof. KH. Saifuddin Zuhri merupakan pahlawan sebelum beliau mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Hal ini karena Prof. KH. Saifuddin Zuhri sudah berhasil melampaui kepentingan diri dan keluarga, untuk mengabdikan kepada bangsa, baik dengan perang gerilya untuk mempertahankan kemerdekaan atau dengan mengisi kemerdekaan dengan pengabdian.[9]
5. Ahmad Baso, Anggota Komnas HAM (2007-2012), mengatakan bahwa Prof. KH. Saifuddin Zuhri terus hidup di kalangan NU khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya karena beliau

---

[7] Kesaksian Harry Tjan Silalahi disampaikan dalam Seminar “Perjuangan dan Pengabdian Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk Negara dan Bangsa” yang diselenggarakan oleh PBNU, Selasa, 2 Juli 2013.

[8] Kesaksian KH. Chalid Mawardi disampaikan dalam Seminar “Perjuangan dan Pengabdian Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk Negara dan Bangsa” yang diselenggarakan oleh PBNU, Selasa, 2 Juli 2013.

[9] Kesaksian Prof. Dr. Anhar Gonggong disampaikan dalam Seminar “Perjuangan dan Pengabdian Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk Negara dan Bangsa” yang diselenggarakan oleh PBNU, Selasa, 2 Juli 2013

meninggalkan karya-karya penting yang terus dibaca sampai kini.[10]

6. Sulastomo, Aktivis 1966 dan Mantan Ketua Umum PB HMI, mengatakan bahwa Prof. KH. Saifuddin Zuhri merupakan pembela HMI yang sejati. Beliau rela mempertaruhkan jabatannya sebagai Menteri Agama jika Pemerintah membubarkan HMI. Padahal, sebagai tokoh NU yang sudah mempunyai PMII, Prof. KH. Saifuddin Zuhri tidak rugi jika HMI dibubarkan. Namun beliau justru akan mengundurkan diri sebagai Menteri Agama jika HMI dibubarkan.[11]
7. Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, mengatakan bahwa sebelum penulisan novel dengan gaya bertutur dan lancar tentang sebuah kehidupan menjadi trend masa kini, Prof. KH. Saifuddin Zuhri telah memulainya puluhan tahun lalu, melalui sebuah karya *Guruku Orang-orang Pesantren* dan Biografi *Berangkat dari Pesantren.*[12]
8. Hj. Aisyah Hamid Baidlawi, Ketua Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia (IKPNI) yang juga mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU, mengatakan bahwa sebelum isu pemberdayaan perempuan marak, Prof. KH. Saifuddin Zuhri telah memulai terlebih dahulu, salah satunya dengan menghibahkan rumahnya di Jl. Hang Tuah, Jakarta, untuk Muslimat NU yang kemudian digunakan sebagai Rumah Sakit Bersalin. Padahal waktu itu beliau adalah Sekretaris Jenderal

---

[10] Kesaksian Ahmad Baso disampaikan dalam Seminar "Perjuangan dan Pengabdian Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk Negara dan Bangsa" yang diselenggarakan oleh PBNU, Selasa, 2 Juli 2013

[11] Kesaksian Sulastomo disampaikan dalam Seminar "Perjuangan dan Pengabdian Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk Negara dan Bangsa" yang diselenggarakan oleh PBNU, Selasa, 2 Juli 2013

[12] Kesaksian Prof. Dr. Moh. Mahfud MD disampaikan dalam Seminar "Perjuangan dan Pengabdian Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk Negara dan Bangsa" yang diselenggarakan oleh PBNU, Selasa, 2 Juli 2013

PBNU, namun justru lebih memperhatikan Muslimat NU[13].

9. Hj. Asmah Syahruni, mantan Ketua Pimpinan Pusat Muslimat NU, mengatakan bahwa Prof. KH. Saifuddin Zuhri sangat memperhatikan kaum perempuan NU. Sebagai Sekjen PBNU, beliau selalu menghadiri acara-acara Muslimat, menggembleng laskar-laskar perempuan Muslimat NU. Hal ini sangat menggembirakan karena Muslimat NU membutuhkan figur yang gagah berani untuk mengimbangi aktivitas kaum perempuan yang berafiliasi pada PKI. Meski menjabat sebagai Sekjen PBNU beliau tidak malu menenteng kaleng minyak sayur sendiri saat menghadiri kegiatan Muslimat NU. [14]
10. KH. Asnawi Latief, Tokoh NU, mengatakan bahwa Prof. KH. Saifuddin Zuhri sangat peduli pada junior-juniornya, antara lain berkenan mendatangi rumah kontrakan, turut serta mencarikan pekerjaan yang layak, memberikan bantuan, dan lain sebagainya.[15]
11. Hj. Farida Salahuddin Wahid, anak kedua Prof. KH. Saifuddin Zuhri, mengatakan bahwa beliau menjunjung tinggi hidup sederhana, bersih, dan bebas korupsi. Selama menjadi Menteri Agama tidak ada satu pun anak-anak yang naik haji. Anak-anak, apalagi ponakan, tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.[16]<>

---

[13] Kesaksian Hj. Aisyah Hamid Baidlawi disampaikan dalam Seminar “Perjuangan dan Pengabdian Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk Negara dan Bangsa” yang diselenggarakan oleh PBNU, Selasa, 2 Juli 2013

[14] Kesaksian Hj. Asmah disampaikan dalam Seminar “Perjuangan dan Pengabdian Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk Negara dan Bangsa” yang diselenggarakan oleh PBNU, Selasa, 2 Juli 2013

[15] Kesaksian KH. Asnawi Latif disampaikan dalam Seminar “Perjuangan dan Pengabdian Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk Negara dan Bangsa untuk Negara dan Bangsa” yang diselenggarakan oleh PBNU, Selasa, 2 Juli 2013

[16] Kesaksian Hj. Farida Salahuddin Wahid disampaikan dalam Seminar “Perjuangan dan Pengabdian Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk Negara dan Bangsa” yang diselenggarakan oleh PBNU, Selasa, 2 Juli 2013

BAB II
RIWAYAT HIDUP
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

A. Berawal dari Sokaraja

Prof. KH. Saifuddin Zuhri dilahirkan pada tanggal 1 Oktober 1919 di sebuah kota kawedanan, Sokaraja, sembilan kilometer dari Banyumas. Sebuah daerah yang melahirkan banyak tokoh-tokoh ABRI (sekarang TNI) seperti Sudirman (Panglima Besar), Gatot Subroto (Wakil KSAD), Sungkono (Panglima Brawijaya), Sadikin (Panglima Siliwangi), Subyakto (Laksamana, KSAL), Suprapto (Pahlawan Revolusi), Surono (Menteri Kesra) dan lain-lain.

Ayahnya bernama Haji Muhammad Zuhri berasal dari keluarga petani yang taat beragama. Ibunya bernama Siti Saudatun, salah seorang cucu Kiai Asraruddin, seorang ulama yang berpengaruh dan memimpin sebuah pesantren kecil di daerahnya. Ketika tak dapat menghindari penunjukan Bupati (Regent) Banyumas untuk memangku jabatan penghulu, pengaruh Kiai Asraruddin bertambah besar. Jadilah ia seorang ulama, politisi, pejuang, sekaligus seorang penghulu.

Daerah tempat Prof. KH. Saifuddin Zuhri dilahirkan dan dibesarkan membentuk lingkungan sosial budaya yang ikut memengaruhi perjalanan hidupnya. Tatkala Revolusi Indonesia berkobar, ia menjabat Komandan Divisi Hizbullah Jawa Tengah di Magelang. Di sana ia berkawan baik dan bahu membahu

dengan Jenderal Sudirman, Jenderal A. Yani dan Jenderal M. Sarbini, berjuang di garis depan mengusir penjajah dalam beberapa peristiwa peperangan. Prof. KH. Saifuddin Zuhri juga terlibat perang gerilya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, terutama saat terjadi Agresi Militer Belanda I dan II. Ia juga berperan penting dalam mempertahankan keutuhan NKRI dari ancaman perpecahan seperti separatisme dan perang saudara. Setelah perang kemerdekaan, Prof. KH. Saifuddin Zuhri tidak meneruskan kariernya di kemiliteran, ia lebih memilih kembali kepada masyarakat, mengabdi pada negara dan bangsa melalui jalur politik dan kebudayaan.

Atas jasa-jasa dan pengabdiannya, Negara Republik Indonesia menghadiahkan kepadanya Bintang Gerilya, dua Satyalancana Peristiwa Perang Kemerdekaan, dan tiga Satyalancana Gerakan Operasi Militer, serta Bintang Mahaputra Adipradana. Dari Sri Paus di Roma ia memperoleh Bintang *Equitem Commendatorem Ordinis Sancti Silvesri Papae* ketika ia menjabat Menteri Agama atas pengabdiannya dalam pengembangan pendidikan di Indonesia.

B. Menjadi Menteri Agama

Pada usia 35 tahun Prof. KH. Saifuddin Zuhri menjabat Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merangkap Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi Harian *Duta Masyarakat* serta anggota Parlemen Sementara. Presiden Soekarno mengangkatnya menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung RI pada usia 39 tahun, lalu mengangkatnya menjadi Menteri Agama ketika berusia 43 tahun.

Kisah pengangkatannya sebagai Menteri Agama, pada tanggal 17 Februari 1962, tepat pada hari Jum'at ia diminta menghadap ke Istana Merdeka. Banyak teka-teki memenuhi benaknya ketika dia memenuhi panggilan Bung Karno. Apakah karena urusan DPR atau DPA? Apa urusan NU? Atau surat kabar

Duta Masyarakat? Ternyata dalam pertemuan itu Bung Karno minta Prof. KH. Saifuddin Zuhri agar menjadi Menteri Agama, menggantikan K.H. Wahib Wahab yang mengundurkan diri.

> Penunjukan Saudara sudah saya pikir masak-masak. Telah cukup lama saya pertimbangkan. Sudah lama saya ikuti sepak terjang Saudara sebagai wartawan, politisi, dan pejuang. Saya dekatkan Saudara menjadi anggota DPA. Saya bertambah simpati. Baru-baru ini Saudara saya ajak keliling dunia, dari Jakarta ke Beograd, Washington, lalu Tokyo. Saya makin mantap memilih Saudara sebagai Menteri Agama," ujar Bung Karno ketika itu.[17]

Permintaan ini tidak serta merta dikabulkan oleh Prof. KH. Saifuddin Zuhri, tetapi justru meminta pendapat terlebih dahulu kepada tokoh teras NU, khususnya K.H. Wahab Chasbullah dan K.H. Idham Chalid. Selain itu, ia juga bertemu dengan K.H. Wahib Wahab dan mencari tahu kenapa Bung Karno memilih dia untuk menggantikan K.H. Wahib Wahab yang mundur sebagai Menteri Agama. Setelah bertemu dengan tokoh-tokoh tersebut dan semua mendukung, Prof. KH. Saifuddin Zuhri menerima penunjukannya sebagai Menteri Agama.

Pada periode kepemimpinannya sebagai Menteri Agama inilah, dunia pendidikan tinggi Islam berkembang pesat. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) tumbuh di sembilan provinsi, dan beberapa cabang di kota/kabupaten.

Atas jasa dan pengabdiannya yang luar biasa pada pengembangan agama Islam, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mewisudanya menjadi Guru Besar Luar Biasa dalam bidang dakwah pada usia 45 tahun.

---

[17] KH. Saifuddin Zuhri, *Berangkat dari Pesantren,* (Yogyakarta: LKIS, 2013), hlm. 627

C. Diplomasi Internasional

Menjelang Pemilu 1971 Prof. KH. Saifuddin Zuhri memimpin delegasi DPR-GR ke beberapa Negara antara lain Malaysia, Thailand, India, Yugoslavia, dan negara-negara Eropa Barat. Sebelumnya, pada tahun 1956 dan 1960 menjadi anggota delegasi Parlemen dan DPA ke Soviet Rusia dan negara-negara Eropa Timur. Menjadi anggota delegasi ke Konferensi Non Blok di Beograd dan Kairo. Sebagai wartawan mengunjungi RRC dan Filipina pada tahu 1954 bersama Mr. Sumanang, Ny. Supeni, B.M Diah, Muhammad Said dan Asa Bafagih. Tahun 1978 menghadiri seminar *The East West Center* di Honolulu, Hawai, dan memenuhi undangan beberapa Senator baik dari Demokrat maupun Republik di Washington DC, Amerika Serikat.

Kunjungan ke berbagai negara beraliran komunis, sosialis dan kapitalis, demikian pula kunjungan ke berbagai negara di Timur Tengah (Arab Saudi, Mesir, Libanon, Suriah dan Iraq), menambah pengalamannya selaku tokoh politik nasional dan dunia Islam. Ketika pada tahun 1965 selaku Menteri Agama memenuhi undangan Menteri Waqaf dan Urusan Agama Kerajaan Jordania, dimanfaatkannya untuk mengunjungi Baitul Maqdis di Jerussalem, sekaligus menyerahkan bantuan Pemerintah Indonesia berupa uang sebanyak US$ 18.000,- guna perbaikan Masjid Al-Aqsha yang sedang dipugar.

D. Penulis yang Produktif

Pengalaman Prof. KH. Saifuddin Zuhri yang cukup lama sebagai anggota DPR RI sejak tahun 1954 hingga 1982 (absen selama menjabat Menteri Agama selama hampir enam tahun) dan pengalamannya sebagai wartawan ikut mendukung pengembangan bakatnya menjadi pengarang dan penulis yang produktif. Menulis artikel dan opini untuk berbagai media massa cetak, harian dan majalah, nasional maupun lokal, dengan ber-

bagai tema di bidang politik, sosial dan keagamaan untuk memberi sumbangan bagi pembangunan karakter bangsa (*nation and character building*) sekaligus untuk pendidikan generasi penerus.

Karyanya dalam bentuk buku ada sembilan judul telah diterbitkan dan di antaranya telah mengalami beberapa kali cetak ulang atau diterbitkan kembali oleh penerbit baru. Masing-masing *Palestina dari Zaman ke Zaman* (1947); *Agama Unsur Mutlak dalam Nation Building* (1965); *Almaghfurlah KH. Abdul Wahab Chasbullah: Bapak dan Pendiri Nahdlatul Ulama* (1972); *Guruku Orang-Orang dari Pesantren* (1974), diterbitkan kembali oleh LKiS (2001); dan *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia* (1981). Selain itu *Kaleidoskop Politik di Indonesia* sebanyak 3 jilid (1981); *Unsur Politik Dalam Da'wah* (1982); *Secercah Da'wah* (1983); dan terakhir *Berangkat Dari Pesantren* (1987).

E. Tanda Kehormatan

Karena keterlibatan aktif, sungguh-sungguh, dan penuh kepahlawanan dari Prof. KH. Saifuddin Zuhri dalam Perang Ambarawa, perang gerilya, dan peristiwa bersejarah lainnya, maka Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Ir Soekarno menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Gerilya, sesuai dengan SK Presiden Republik Indonesia No. 2/Btk/1965 tanggal 4 Januari 1965. Tanda Kehormatan Bintang Gerilya adalah sebuah tanda kehormatan yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia kepada setiap warga negara RI yang menunjukkan keberanian, kebijaksanaan, dan kesetiaan yang luar biasa dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia semasa revolusi antara tahun 1945-1950. Para pahlawan penerima bintang gerilya berhak untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan.

Selain itu, sebagai Komandan Hizbullah Jawa Tengah, beliau selalu terlibat aktif untuk membela tanah air dari berbagai

macam rongrongan. Untuk itulah beliau mendapatkan Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Peristiwa Perang Kemerdekaan Kesatu dan Satyalancana Peristiwa Perang Kemerdekaan Kedua dari Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Jenderal A.H. Nasution, pada 4 November 1964.

Sesuai dengan Pasal 16 UU No. 70 Tahun 1958, Satyalancana Peristiwa Perang Kemerdekaan itu diberikan kepada anggota Angkatan Perang yang secara aktif telah mengikuti (1) peristiwa-peristiwa, dalam mana Angkatan Perang mengambil suatu bagian aktif dalam mempertegak kekuasaan kedaulatan negara terhadap musuh yang bersenjata, baik dari dalam maupun dari luar; atau (2) peristiwa-peristiwa penting dalam pertumbuhan dan sejarah Angkatan Perang; (3) dan selama atau sesudah masa terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut pada huruf a atau huruf b tidak melakukan sesuatu yang mencemarkan, merugikan atau mengurangi nilai dan sifat kelanjutan perjuangan, diberikan tanda-tanda penghargaan berupa satyalancana-satyalancana yang disebut "Satyalancana Peristiwa."

Satyalancana Peristiwa Perang Kemerdekaan Kesatu diberikan kepada orang yang mengikuti sepenuhnya peristiwa Perang Kemerdekaan Kesatu dari tanggal 20 Juni 1947 sampai dengan 22 Februari 1948. Sedangkan Satyalancana Peristiwa Perang Kemerdekaan Kedua diberikan kepada orang yang mengikuti sepenuhnya peristiwa Perang Kemerdekaan Kedua dalam jangka waktu 18 Desember 1948 sampai dengan 27 Desember 1949.

Selain itu, Prof. KH. Saifuddin Zuhri juga mendapatkan Satyalancana Gerakan Operasi Militer I, Satyalancana Gerakan Operasi Militer V, dan Satyalancana Gerakan Operasi Militer VI dari Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Jenderal A.H. Nasution, pada 4 November 1964.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1958 tentang Satyalancana Peristiwa Operasi Militer, Satyalancana

Gerakan Operasi Militer I diberikan kepada anggota Angkatan Perang dan warga negara bukan angkatan perang yang secara aktif mengikuti gerakan operasi militer terhadap peristiwa Madiun yang terjadi pada tahun 1948 (Pasal 3 dan 5 PP No. 59 Tahun 1958). Sedangkan Satyalancana Gerakan Operasi Militer V diberikan kepada anggota Angkatan Perang yang secara aktif sekurang-kurangnya 90 hari terus-menerus atau 180 hari terputus putus dalam jangka waktu 2 tahun mengikuti gerakan operasi militer terhadap peristiwa di Jawa Barat yang terjadi sejak tanggal 27 Desember 1949 (Pasal 18 PP No. 59 Tahun 1958). Sementara Satyalancana Gerakan Operasi Militer VI diberikan kepada anggota Angkatan Perang yang secara aktif sekurang-kurangnya 90 hari terus-menerus atau 180 hari terputus-putus dalam jangka waktu 2 tahun mengikuti gerakan operasi militer terhadap peristiwa di Jawa Tengah yang terjadi sejak tanggal 27 Desember 1949 (Pasal 18 PP No. 59 Tahun 1958).

F. Akhir Hayat

Prof. KH. Saifuddin Zuhri termasuk tokoh penting dalam Jamiyah NU, baik ketika sebagai ormas pada masa perjuangan kemerdekaan, sebagai partai politik pada masa pemerintahan Orde Lama maupun sewaktu bergabung bersama partai Islam lainnya dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada masa Orde Baru. Bersama ormas Islam terbesar yang didirikan tahun 1926 itu, KH. Saifuddin Zuhri memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata dan perjuangan politik untuk mencapai, merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Dalam pembangunan karakter bangsa, ia menyebarkan pandangan-pandangan Islam Ahlus-Sunnah wal Jama'ah yang identik dengan Islam *Rahmatan lil 'Alamin*, mengembangkan paham nasionalisme Islam Indonesia dalam kerangka mempertahankan NKRI dan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Riwayat hidup dan sejarah perjuangannya yang panjang dalam berbagai medan khidmah sebagai ulama-pejuang, politisi dan pejabat negara, disadari oleh Prof. KH. Saifuddin Zuhri, terlalu sayang kalau sampai terlupakan dalam sejarah. Karena itu ia mengabadikannya dalam sebuah buku berjudul *Berangkat dari Pesantren* setebal 776 halaman yang ia selesaikan penulisannya pada 10 September 1985, kurang lebih enam bulan sebelum wafatnya, 25 Februari 1986. Buku ini menjadi saksi sejarah yang berharga tentang makna perjuangan, pengabdian, dan pengorbanan anak bangsa untuk lahirnya sebuah Negara yang merdeka, berdaulat, maju dan sejahtera. Buku yang terbit pada tahun 1987 yang ternyata menjadi karya terakhirnya itu, pada 3 Oktober 1989 mendapat penghargaan Buku Utama Kategori Bacaan Dewasa bidang Humaniora dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.<>

BAB III
KEPAHLAWANAN
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

A. Perjuangan di Masa Revolusi Fisik

Keterlibatan Prof. KH. Saifuddin Zuhri dalam perang gerilya melawan Belanda bukanlah peristiwa yang tiba-tiba. Dimulai dari sejak muda, Prof. KH. Saifuddin Zuhri sudah tertarik dengan dunia gerakan. Pada usia 14 tahun, ia mendapat gemblengan perjuangan, terutama melalui Raden Haji Mukhtar, anggota DPRD Kabupaten, pengamal Tarekat Naqsabandiyah, dan Konsul Cabang-cabang Nahdlatul Ulama (NU) untuk daerah Banyumas, Kedu, dan Yogyakarta. Haji Mukhtar sering mengajak Prof. KH. Saifuddin Zuhri yang masih belia berkeliling dalam acara-acara NU.[18]

Pada usia 18 tahun, Prof. KH. Saifuddin Zuhri mulai aktif dalam kegiatan Gerakan Pemuda Ansor di Banyumas. Pada usia 19 tahun, ia terpilih menjadi Ketua Gerakan Pemuda Ansor untuk Wilayah Jawa Tengah Bagian Selatan. Ketekunannya sebagai seorang jurnalis dengan menjadi koresponden *Pemandangan, Hong Po, Antara, Berita Nahdlatul Ulama,* dan *Suara Ansor,* membuat Prof. KH. Saifuddin Zuhri makin terkenal di dunia pergerakan. Di tahun 1939, saat ia berusia 20 tahun, ia menerima surat dari

[18] Azyumardi Azra dan Saiful Umam, *Menteri-menteri Agama RI, Biografi Sosial Politik,* (Jakarta: PPIM, 1998), hlm. 212

Wahid Hasyim yang waktu itu menjadi Ketua Dewan Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI), organisasi federasi bagi seluruh organisasi Islam yang ada di Indonesia yang berisi undangan agar Prof. KH. Saifuddin Zuhri datang ke Jombang, tepatnya ke sebuah pesantren besar yang diasuh oleh Hadlratussyaikh KH. Hasyim Asy'ari. Mendapatkan undangan dari tokoh besar NU, Prof. KH. Saifuddin Zuhri tidak menyia-nyiakan undangan itu. Sehabis menghadiri acara GP Ansor di Surabaya, Prof. KH. Saifuddin Zuhri segera naik kereta api ke Jombang dan disambut langsung oleh KH. A. Wahid Hasyim di stasiun terdekat.[19]

Tatkala perang Asia Pasifik bergejolak, Jepang yang menduduki Indonesia meminta agar Jawa Hokokai di mana Soekarno dan Wahid Hasyim menjadi salah satu pimpinannya mengumpulkan pemuda untuk mendapatkan pelatihan militer di Jakarta. Kelak, pemuda yang digembleng itu membentuk organisasi yang dikenal dengan Pembela Tanah Air (PETA). Wahid Hasyim juga meminta agar pemuda Islam mendapatkan pelatihan yang sama. Usul itu diterima sehingga dibentuk *camp* pelatihan lain di Cibarusah, Bekasi. Pemuda yang digembleng di Cibarusah membentuk organisasi yang dikenal dengan Laskar Hizbullah dan Laskar Sabilillah. Karena pengalaman sebelumnya, setelah mendapatkan pelatihan, Prof. KH. Saifuddin Zuhri ditunjuk menjadi Komandan Hizbullah Divisi Sultan Agung yang mempunyai wewenang untuk wilayah Jawa Tengah bagian selatan.[20]

Tugas sebagai Komandan Hizbullah Divisi Sultan Agung terus diemban selama revolusi fisik mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggung jawabnya untuk membela tanah air makin besar, manakala ia diangkat sebagai anggota Dewan Pertahanan Daerah Kedu (1946-1947) dan

---

[19] *Menteri-menteri Agama RI, Biografi Sosial Politik, Ibid.*, hlm. 213

[20] *Ibid.*, hlm. 214

Penasehat Pemerintah Militer Gubernur Militer Daerah Jawa Tengah (1947-1949). Prof. KH. Saifuddin Zuhri menjadi salah satu undangan dalam pelantikan Bung Karno sebagai Presiden RIS di Kraton Yogyakarta, 17 Desember 1949.[21]

1. Perang Ambarawa

Sebagai Komandan Divisi Hizbullah Divisi Sultan Agung, ia memimpin Laskar Hizbullah untuk bersama-sama pasukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di bawah pimpinan Kol. Sudirman, dan berbagai pasukan kelaskaran rakyat lainnya ikut pertempuran Ambarawa yang terkenal itu dan berhasil mengusir penjajah.

Pendaratan Pasukan Sekutu di Surabaya (November 1945) dan Semarang (Oktober 1945) sebenarnya mempunyai tugas penting yang tidak perlu membuat bangsa Indonesia *was-was*, yaitu melucuti tentara Jepang yang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan menyelamatkan ribuan orang Eropa yang menjadi tawanan Jepang. Namun, sekutu terlalu meremehkan pejuang-pejuang kemerdekaan, sehingga Sekutu datang ke Indonesia dengan pongah. Setiap akan memasuki kota, Sekutu memulai dengan tembakan-tembakan senjata berat. Akibatnya, rakyat Indonesia geram dan marah kepada Sekutu. Apalagi, terlihat dengan kasat mata bahwa Belanda juga ternyata membonceng Sekutu untuk menjajah kembali Indonesia.

Terjadinya pertempuran hebat antara bangsa Indonesia dan pasukan Sekutu. Salah satu pertempuran itu terjadi di Ambarawa, kurang lebih selama 20 hari dari November 1945 sampai 15 Desember 1945. Kini, untuk memperingati hari bersejarah itu, tanggal 15 Desember 1945 diperingati sebagai Hari Juang Kartika TNI Angkatan Darat.

---

[21] *Ibid.*, hlm. 215

Pertempuran Ambarawa sendiri terjadi karena Sekutu harus segera mengungsikan orang-orang Eropa di Ambarawa dan sekitarnya yang berjumlah sekitar 10.000 orang.[22] Sebenarnya, Sekutu dan Pemerintah Indonesia sudah sepakat untuk mengungsikan orang-orang Eropa itu secara damai, namun dalam prakteknya Sekutu mempersenjatai mereka. Sudah begitu, Belanda dengan NICA membonceng pasukan Sekutu untuk kembali menjajah Indonesia. Mau tidak mau, rakyat Indonesia harus memberikan perlawanan secara maksimal.

Perang Ambarawa dimulai dengan rencana bersama antara TKR dan laskar kerakyatan (termasuk Laskar Hizbullah) untuk menyerang Pasukan Sekutu yang menduduki Gedung Seminari Katolik di bibir alun-alun sepanjang Jalan Raya Poncol, Stasiun Kota Magelang. Meskipun menguasai secuil titik di tengah kota, namun Sekutu juga menguasai jalur Ambarawa-Semarang dan Ambarawa-Magelang.

Menurut penuturan Prof. KH. Saifuddin Zuhri, pada malam 21 November 1945, ia telah memobilisasi Laskar Hizbullah dan mengumpulkannya di pendopo seorang kaya yang bernama Suroso, di Bayeman, sebuah daerah di sekitar Magelang yang masih berada dalam kekuasaan penuh kaum republikan. Malam itu sebenarnya hanya untuk pembacaan *hizb*, bekal spiritual untuk para laskar rakyat. Atas undangan langsung dari Prof. KH. Saifuddin Zuhri sebagai Komandan Hizbullah Jawa Tengah Selatan, Pukul 03.00 WIB (dini hari) Letkol M. Sarbini dan Letkol A. Yani meninjau mobilisasi Laskar Hizbullah untuk melihat kesiapan mereka, sekaligus mendiskusikan strategi antara TKR dan pimpinan Hizbullah. Rencananya, TKR dan laskar rakyat akan menyerang Sekutu dengan tiba-tiba. Anak-anak Hizbullah akan

[22] M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern,* (Yogyakarta, UGM Press, 1995), hlm. 325.

bergerak dari Masjid besar dan kabupaten, lalu menyerang musuh dari depan. Strategi ini diberi nama "Strategi Mencekik Leher." TKR menyerang dari sayap kanan. Laskar lain akan menyerang dari sayap kiri. Namun, sebelum serangan itu dilancarkan, Sekutu segera meninggalkan Magelang melewati Ambarawa menuju Semarang, tempat di mana kapal-kapal Sekutu berlabuh[23].

Bersama-sama pasukan lain dari TKR, Hizbullah melakukan pengejaran terhadap tentara Inggris untuk membebaskan kota Ambarawa dan sekitarnya. Dari tanggal 23 November hingga tanggal 12 Desember 1945 terjadilah pengepungan dan serangan rakyat Indonesia terhadap pasukan sekutu yang menduduki kota Ambarawa. Berbagai pasukan rakyat yang terdiri atas TKR, Hizbullah, Sabilillah, Barisan Pemberontakan, Laskar Rakyat dan lain-lain mengepung Ambarawa dari berbagai jurusan. Tembak menembak terjadi di desa Jambu, Bedono, Pringsurat, Ngipik, dan Suruh.

Setelah hampir 20 hari pertempuran sengit itulah, akhirnya pada 15 Desember 1945, kota Ambarawa kembali ke pelukan Republik Indonesia dan membuktikan kepada dunia internasional bahwa bangsa Indonesia akan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia secara sungguh-sungguh.

Dalam pertempuran Ambarawa Kol. Sudirman memimpin langsung dengan menggunakan taktik gelar *supit urang*, atau pengepungan rangkap dari berbagai sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Tujuannya adalah memutus rantai komunikasi dan logistik antara pasukan Sekutu dengan induknya. Untuk itu, Kol. Sudirman membutuhkan dukungan tentara yang banyak. Tidak mungkin Kol. Sudirman menggunakan taktik *supit urang* jika hanya mengandalkan tentara regular yaitu Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Kedatangan laskar-laskar rakyat men-

---

[23] *Berangkat dari Pesantren, Op. Cit.,* hlm. 341-343.

jadi sangat penting, karena akan menjadi elemen penting untuk mengefektifkan taktik *supit urang*.

Nama *supit urang* berasal dari bahasa pewayangan yang artinya *kepungan*. Jadi, strategi Supit Udang itu digunakan dengan maksud untuk mengepung Sekutu agar beranjak dari bumi Ambarawa. Medan perang di Ambarawa di bagi dalam sektor-sektor yaitu Utara, Selatan, Barat dan Timur agar serangan terhadap sekutu dapat lebih ditingkatkan. Pasukan dan laskar menempati pos-pos yang telah ditentukan, di mana semua pos itu berada di dataran tinggi, sehingga mudah untuk menyerang Ambarawa, sementara musuh sulit untuk memantau kaum republikan dari dataran rendah[24].

Salah satu laskar rakyat yang paling terorganisasi dan terlatih adalah Hizbullah. Saat itu, Laskah Hizbullah mempunyai pasukan lengkap dari tingkat karesidenan sampai tingkat kecamatan. Setiap karesidenan, Laskar Hizbullah mempunyai satu divisi, tiap kabupaten satu resimen, setiap kawedanan satu kompi, dan setiap kecamatan satu seksi. Namun sebagian besar di antara mereka bersenjatakan bambu runcing. Hanya sekitar 20 persen di antara pasukan Hizbullah yang memegang senjata yang mereka rampas dari musuh saat peperangan.[25]

Komandan Divisi Hizbullah Jawa Tengah saat itu, Prof. KH. Saifuddin Zuhri, harus bekerja keras agar taktik yang telah digariskan oleh Kol. Sudirman dapat berhasil dengan baik. Menjelang pertempuran, Prof. KH. Saifuddin Zuhri, harus memobilisi laskah Hizbullah dalam jumlah yang besar, karena taktik *supit urang* membutuhkan pasukan yang sangat banyak karena menyerang musuh dari dua arah dan secara berlapis-lapis.

Selanjutnya, dalam pertempuran Komandan Hizbullah

---

[24] Muhammad Rifai Fajran, "Skema Pertempuran *Supit Udang* Jend. Sudirman" (makalah, tanpa tahun)

[25] *Berangkat dari Pesantren, Op. Cit.,* hlm. 347-349

Prof. KH. Saifuddin Zuhri juga harus menjaga disiplin dan ritme pertempuran agar sampai pada titik penyerangan secara bersamaan dengan pasukan yang berada di arah sebaliknya. Percuma, jika pasukan dari zona utara datang duluan, sementara pasukan dari zona selatan masih di perjalanan. Jika hal itu terjadi, maka tentara sekutu akan mudah melumpuhkan perlawanan rakyat. Namun dengan kepemimpinan Kol. Sudirman dan dukungan Komandan Hizbullah Prof. KH. Saifuddin Zuhri, maka Ambarawa dapat dibebaskan dan Indonesia mencatat kemenangan penting dalam pertempuran melawan Sekutu.

Setelah pertempuran usai, Prof. KH. Saifuddin Zuhri bersama satu regu pasukan, melakukan inspeksi ke kota Ambarawa menuju ke arah Semarang untuk memastikan sejauh mana kaum republikan menguasai daerah-daerah menuju semarang. Prof. KH. Saifuddin Zuhri mengisahkan:

> Aku memasuki kota Ambarawa yang telah ditinggalkan Sekutu melewati sepanjang Jalan Raya Margo Agung di depan gereja dan pekuburan Belanda. Keadaan sangat memilukan. Rumah tembok ber–lubang-lubang, pucuk-pucuk pepohonan porak-poranda, bau mesiu tercium di mana-mana. Pertempuran selama hampir 20 hari itu memang berkobar dengan hebat. Hingga di sekitar sebuah simpang tiga, bau busuk menyebar ke mana-mana. Rupanya, beberapa sosok mayat masih dibiarkan begitu saja. Ketika itu, hujan lebat belumlah reda. Seorang perempuan tak berbusana lengkap menangis dalam posisi berjongkok. Ia meratapi rumahnya yang telah menjadi puing. Kiai Mandhur, pemimpin Barisan Sabilillah, membuka jas hujannya untuk dikerondongkan kepada perempuan itu. Amat memilukan.[26]

Perang Ambarawa memberikan beberapa pelajaran penting, yaitu pertama jika seluruh rakyat bersatu, dengan senjata yang minimal pun, mampu mengalahkan musuh dengan persenjataan yang modern. Kedua, kemenangan bangsa Indonesia dalam pe-

[26] *Berangkat dari Pesantren, Ibid.,* hlm. 348

rang Ambarawa merupakan pernyataan penting bahwa seluruh rakyat Indonesia mendukung Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketiga, perang Ambarawa merupakan pesan penting bahwa Sekutu tidak boleh melibatkan diri membantu Belanda guna berkuasa kembali di bumi Nusantara.

Secara personal, setelah perang Ambarawa, Prof. KH. Saifuddin Zuhri mempunyai hubungan yang lebih dekat lagi dengan Kolonel Sudirman, di samping dengan Letkol A. Yani dan Letkol Sarbini. Dalam sebuah pertemuan antara Jenderal Sudirman dengan KH. A. Wahid Hasyim, ketika Jenderal Sudirman sudah mendapatkan gelar Jenderal dan menjabat sebagai Panglima Besar TNI, Sang Jenderal menunjuk Prof. KH. Saifuddin Zuhri seraya mengatakan: "Semestinya ia bersama-sama dengan saya di TNI, tapi ia memilih Hizbullah."[27]

Karena keterlibatan aktif, sungguh-sungguh, dan penuh kepahlawanan dari Prof. KH. Saifuddin Zuhri dalam Perang Ambarawa dan perang gerilya lainnya, maka Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Gerilya, sesuai dengan SK Presiden Republik Indonesia No. 2/Btk/1965 tanggal 4 Januari 1965. Tanda Kehormatan Bintang Gerilya adalah sebuah tanda kehormatan yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia kepada setiap warga negara RI yang menunjukkan keberanian, kebijaksanaan, dan kesetiaan yang luar biasa dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia semasa revolusi antara tahun 1945-1950. Para pahlawan penerima bintang gerilya berhak untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan.

---

[27] *Berangkat dari Pesantren, Ibid.*, hlm. 464.

2. Bergerilya Saat Agresi Militer Belanda I dan II

Kepahlawanan Prof. KH. Saifuddin Zuhri tidak hanya berhenti pada keterlibatan beliau dalam Perang Ambarawa. Dalam berbagai momen dan peristiwa bersenjata lain yang merongrong kemerdekaan Republik Indonesia, sebagai Komandan Hizbullah Jawa Tengah, ia selalu terlibat aktif untuk membela tanah air.

Ketika Belanda melakukan Aksi Militer I sejak 21 Juli 1947 dan Aksi Militer 2 yang dimulai sejak 19 Desember 1948, Prof. KH. Saifuddin Zuhri harus melaksanakan dua tugas sekaligus, yaitu yang pertama menyelamatkan, menempatkan, dan mencari jalur pengungsian yang aman. Sedangkan yang kedua melakukan serangan terhadap pos-pos Belanda dengan cara *hit and run*, sehingga Belanda terus merasa tidak aman berada di wilayah Republik Indonesia.

Belanda sudah hafal betul bahwa di setiap pengungsi, ada puluhan Laskar Hizbullah, yang harus ditangkap untuk mendapatkan informasi tentang gerakan Hizbullah. Memang, Laskar Hizbullah sendiri selalu menempatkan puluhan prajurit terlatih untuk membaur dengan pengungsi. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan dan keselamatan pengungsi jika sewaktu-waktu berpapasan dengan musuh; untuk menenangkan Laskar Hizbullah lainnya yang mendapatkan tugas melakukan perang gerilya; dan untuk mengatur penempatan pengungsi di rumah penduduk yang dilaluinya. Laskar Hizbullah memang mengarahkan pengungsi ke kantong-kantong NU untuk memudahkan asimilasi antara kaum Ansor (penduduk setempat) dan muhajirin (pengungsi). Apalagi sebelum kemerdekaan, atas nama Ketua GP Ansor Jawa Tengah bagian selatan dan aktvisis NU, Prof. KH. Saifuddin Zuhri sudah berkunjung ke daerah-daerah itu untuk melakukan pelatihan kader, ceramah agama, dan lain-lain. Rupanya Belanda tahu itu, sehingga Belanda selalu memantau gerakan pengungsi, karena jalur pengungsi berarti juga jalur

gerilya. Laskar Hizbullah merespon dengan gerakan lebih cepat. Mereka hanya sebentar berada di daerah pengungsian, paling lama sekitar 2 malam. Selanjutnya bergerak ke arah lain. Di samping untuk meringankan kaum Ansor, juga untuk merepotkan pengejaran musuh.

Selama Aksi Militer I dan II dari tahun 1947-1949, Prof. KH. Saifuddin Zuhri harus berpindah-pindah tempat sembari melakukan perang gerilya. Dalam sebuah perjalanan kembali ke kampung pengungsian untuk menjenguk keluarga, Prof. KH. Saifuddin Zuhri mendapatkan laporan dari Mohammad Zainuddin, anggota Laskar Hizbulllah yang ditugaskan menjaga keluarga Prof. KH. Saifuddin Zuhri, bahwa anaknya yang pertama, Fahmi (saat itu berusia 6 tahun), terlepas dari kelompoknya dan terbawa arus pengungsi yang menuju ke arah lain. Saifuddin Zuhri menanggapi kabar tidak enak itu dengan tenang. Ia mengisahkan:

> Pusing juga kepalaku mendengar kisah Fahmi *ketriwal*, lepas dari penjagaan. Tapi syukurlah, aku tidak sampai hilang akal. Aku segera mengambil wudlu di Sungai Bogowonto, menaiki gardu penjagaan ronda yang bertengger di tepi jalan, menggadla shalat ashar, menanti waktu maghrib yang tinggal beberapa menit lagi. Situasi untuk sementara tetap aman. Dalam sembahyang aku mendekatkan diri kepada-Nya, dan sehabisnya kumohon pertolongan atas musibah yang bertubi-tubi: diserbu musuh dan peristiwa yang menimpa anakku.[28]

Setelah mengadu kepada Allah perihal Fahmi, Prof. KH. Saifuddin Zuhri memang patut tenang. Bukankah di setiap perjalanan pengungsi ada Laskar Hizbullah yang menyertainya? Ketika berada di Karangjati, daerah pengungsian berikutnya, tiba-tiba datanglah seorang Laskar Hizbullah yang bernama Amir dengan menuntun Fahmi. Menurut Amir, ia menemukan Fahmi bersama rombongan pengungsi menuju Yogyakarta. Karena sendirian, Amir menanyakan namanya dan orang tuanya. Ketika

---

[28] *Berangkat dari Pesantren, Ibid.,* hlm. 469.

menyebut Prof. KH. Saifuddin Zuhri, Amir yakin bahwa Fahmi adalah anak Komandan Hizbullah, Prof. KH. Saifuddin Zuhri.[29]

Selama melakukan perang gerilya, memang Saifuddin Zuhri dan keluarganya selamat. Namun, ketika masih berada di daerah pengungsian Kapulogo, pada Februari 1949, Prof. KH. Saifuddin Zuhri, kehilangan anaknya yang baru lahir. Karena selama dalam kandungan, anak itu berada dalam pengungsian dan berpindah-pindah, maka ketika lahir langsung meninggal. Berkaitan dengan hal ini, Prof. KH. Saifuddin Zuhri mengisahkan:

> Bersyukurlah bahwa ibunya demikian ikhlas menerima musibah kematian anaknya yang baru lahir, yang aku beri nama Abdullah itu. Untuk melipur hatinya, setelah dirasakan kesehatan tubuhnya pulih kembali, istriku bersama perempuan lain penduduk desa Kapulogo tiap hari pasaran pergi ke pasar di desa-desa sekitar Kapulogo, seperti Selento, Kempul, Randusari yang jaraknya 3-4 km dari desa Kapulago. Berbeda dengan pasar-pasar dalam kota, pasar-pasar di desa tidak melakukan kegiatannya tiap hari, akan tetapi –pada umumnya- tiap 5 hari sekali, yaitu pada hari yang disebut hari Pasaran: Legi, Pon, Kliwon, dan sebagainya. Istriku, ditemani Ny. Muhammad, Ny. Jamil, dan Mbakyu Maryam menjajakan aneka macam panganan yang terbuat dari singkong. Dipilihnya panganan jenis tersebut mengingat persediaan bahan bakunya mudah didapat, juga harganya sesuai dengan kemampuan kantong penduduk desa.[30]

Di balik kisah duka itu, setelah Agresi Militer II, 19 Desember 1948, Prof. KH. Saifuddin Zuhri mempunyai pergaulan yang lebih luas. Hal ini karena sesuai dengan Perjanjian Renville, ada kewajiban bagi Pasukan Siliwangi (Jawa Barat) untuk pindah ke daerah republikan di Jawa Tengah. Sebagai Komandan Hizbullah Jawa Tengah Selatan, Prof. KH. Saifuddin Zuhri turut sibuk menerima tentara hijrah dan menempatkannya di markas Hizbullah atau rumah penduduk yang bersedia. Di depan

---

[29] *Berangkat dari Pesantren, Ibid.*, hlm. 470

[30] *Berangkat dari Pesantren, Ibid.,* hlm. 475-476

kediaman Prof. KH. Saifuddin Zuhri di Purworejo adalah Markas Hizbullah. Di saat bertugas perang gerilya, Markas Hizbulah kosong, namun dengan datangnya tentara Siliwangi, Markas Hizbullah tidak pernah kosong lagi. Dari tentara Siliwangi, ia memperoleh tambahan ilmu perang gerilya dan kemiliteran lainnya. Keluarganya juga, terutama anak-anak, juga kecipratan berkah, karena mendapatkan teman terus menerus, karena Markas Hizbullah tidak pernah kosong. Bahkan, mereka sering mendapatkan hadiah berupa baju tentara untuk anak-anak. Mungkin para tentara kangen pada anak sendiri, karena itu mereka menyayangi anak-anak Prof. KH. Saifuddin Zuhri, yaitu Fahmi (6 tahun), Ida (4 tahun), dan Anis (2 tahun) seperti anaknya sendiri.[31]

Setelah Belanda menyerahkan kedaulatannya kepada RIS, Prof. KH. Saifuddin Zuhri, mendapatkan promosi karier di bidang pemerintahan, yaitu menjabat sebagai Pejabat Kepala Jawatan Agama Provinsi Jawa Tengah, menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), di samping jabatan lain di Masyumi dan NU.[32]

Selanjutnya, karena berjasa dalam membantu Divisi Siliwangi yang hijrah ke Jawa Tengah serta keterlibatannya dalam perang gerilya bersama Divisi Siliwangi dan Divisi Diponegoro, Prof. KH. Saifuddin Zuhri mendapat Tanda Kehormatan dari mantan Komandan Divisi Siliwangi, yang kemudian menjadi Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Jenderal A.H. Nasution.

Dari Jenderal A.H. Nasution, Prof. KH. Saifuddin Zuhri mendapatkan Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Peristiwa Perang Kemerdekaan Kesatu dan Satyalancana Peristiwa Perang Kemerdekaan Kedua, pada 4 November 1964.

---

[31] *Berangkat dari Pesantren, Ibid.,* hlm. 453

[32] *Berangkat dari Pesantren, Ibid.,* hlm. 479

Sesuai dengan Pasal 16 UU No. 70 Tahun 1958, Satyalancana Peristiwa itu diberikan kepada anggota Angkatan Perang yang secara aktif telah mengikuti (1) peristiwa-peristiwa, dalam mana Angkatan Perang mengambil suatu bagian aktif dalam mempertegak kekuasaan kedaulatan negara terhadap musuh yang bersenjata, baik dari dalam maupun dari luar; atau (2) peristiwa-peristiwa penting dalam pertumbuhan dan sejarah Angkatan Perang; (3) dan selama atau sesudah masa terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut pada huruf a atau huruf b tidak melakukan sesuatu yang mencemarkan, merugikan atau mengurangi nilai dan sifat kelanjutan perjuangan, diberikan tanda-tanda penghargaan berupa satyalancana-satyalancana yang disebut "Satyalancana Peristiwa."

Satyalancana Peristiwa Perang Kemerdekaan Kesatu diberikan kepada orang yang mengikuti sepenuhnya peristiwa Perang Kemerdekaan kesatu dari tanggal 20 Juni 1947 sampai dengan 22 Februari 1948. Sedangkan Satyalancana Peristiwa Perang Kemerdekaan Kedua diberikan kepada orang yang mengikuti sepenuhnya peristiwa Perang Kemerdekaan kedua dalam jangka waktu 18 Desember 1948 sampai dengan 27 Desember 1949.

Selain itu, masih dari Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Jenderal A.H. Nasution, Prof. KH. Saifuddin Zuhri juga mendapatkan tanda jasa, berupa Satyalancana Gerakan Operasi Militer VI. Satyalancana Gerakan Operasi Militer VI diberikan kepada anggota Angkatan Perang yang secara aktif sekurang-kurangnya 90 hari terus-menerus atau 180 hari terputus-putus dalam jangka waktu 2 tahun mengikuti gerakan operasi militer terhadap peristiwa di Jawa Tengah yang terjadi sejak tanggal 27 Desember 1949 (Pasal 18 PP No. 59 Tahun 1958).

Selain dari Pemerintah Republik Indonesia, Prof. KH. Saifuddin Zuhri sering mendapatkan penghargaan berupa tanah dari masyarakat. Dalam surat hibah tanah itu ditulis ucapan terima kasih kepada Komandan Hizbullah KH. Saifuddin Zuhri

karena telah membantu menyelamatkan keluarganya di zaman revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tanah itu tidak dijadikan sebagai tanah pribadi. Prof. KH. Saifuddin memberikan tanah itu kepada kiai lokal untuk dijadikan sebagai pesantren atau lembaga pendidikan Islam.

Kenapa Prof. KH. Saifuddin Zuhri meminta agar tanah yang diterima dari orang kaya yang pernah ditolongnya menjadi pesantren? Bagi beliau, pesantren merupakan lembaga di mana para pelajar dididik secara holistik, baik secara intelektual maupun secara mental. Lebih dari itu, pesantren merupakan basis dan pondasi untuk memupuk nasionalisme, terutama di kalangan umat Islam. Pesantren yang biasanya didatangi pelajar dari penjuru tanah air merupakan "kawah candradimuka" yang paling ampuh untuk mengenalkan persaudaraan antar sesama bangsa yang dalam ajaran Nahdlatul Ulama sering disebut dengan *ukhuwah wathaniyah.*

3. *Membantu Divisi Siliwangi Menumpas PKI Madiun dan DI/TII Jawa Barat*

Dalam situasi yang kacau itu, kelompok kiri memulai usahanya untuk merebut kembali kekuasaan, seperti saat Amir Sjarifoeddin menjadi Perdana Menteri. Pada 11 Agustus 1948, Muso tiba di Yogyakarta setelah beberapa lama tinggal di Uni Soviet. Dalam suasana yang panas karena pro-kontra atas Perjanjian Renville, Muso mengonsolidasikan kelompok-kelompok kiri dalam Partai Komunis Indonesia (PKI). Amir Sjarifoeddin masuk dalam barisan ini. Setelah konsolidasi dianggap selesai, Muso menggerakkan pemogokan di kawasan pabrik tekstil di Delanggu (Jawa Tengah), serta menyebarkan teror di Solo dan sekitarnya, dengan cara merebut tanah dari pemiliknya. Pada 18 September 1948, PKI mengadakan perebutan kekuasaan di Madiun, lalu memproklamasikan Republik Soviet di tempat

yang sama. Bung Karno segera berpidato melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta dan meminta kepada rakyat Indonesia apakah akan memilih PKI-Muso yang akan membawa bencana atau memilih Soekarno-Hatta yang akan berjuang untuk keadilan dan kesejahteraan bersama.[33]

Jenderal Sudirman segera menggerakan Divisi Siliwangi yang kebetulan berada di Jawa Tengah karena harus meninggalkan garis Van Mook di Jawa Barat. Pilihan Sudirman tepat, karena Divisi Siliwangi lebih steril dari anasir-anasir yang bersimpati pada perjuangan kelompok kiri itu. Divisi Siliwangi juga ingin menjaga gengsi, karena kepindahan mereka dari Jawa Barat ke Jawa Tengah merupakan pukulan psikologis yang sangat menyakitkan.

Peran yang dimainkan Prof. KH. Saifuddin Zuhri sebagai Komandan Hizbullah dalam membantu Divisi Siliwangi menumpas PKI Madiun adalah menampung Divisi Siliwangi di markas-markas Hizbullah di Jawa Tengah, termasuk di depan rumahnya sendiri, mendampingi tentara Siliwangi agar mendapatkan jalur mobilisasi yang mudah dari Jawa Tengah ke Madiun (Jawa Timur), dan membantu menyiapkan pos-pos logistik sepanjang perjalanan dari Jawa Tengah ke Madiun, Jawa Barat. Prof. KH. Saifuddin Zuhri juga mengirimkan anggota Laskar Hizbullah untuk di-TKR-kan atau di-TNI-kan, jauh sebelum Divisi Siliwangi datang ke Jawa Tengah. Kelak, Laskar Hizbullah yang di-TNI-kan selalu menjadi penghubung yang efektif antara TKR/TNI dengan Hizbullah untuk mengatur strategi bersama.[34]

---

[33] Menurut catatan Jusuf Wibisono, pemberontakan PKI Madiun 18 September 1948 tidak lepas peran Muso yang telah puluhan tahun meninggalkan Indonesia, tiba-tiba datang kembali dan melakukan tindakan yang radikal yang justru melukai Republik Indonesia. Muso tidak paham dengan kondisi Indonesia terkini. Soebagijo I.N., *Jusuf Wibisono, Karang di Tengah Gelombang,* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1980), hlm. 62.

[34] Disarikan dari *Berangkat dari Pesantren, Op.Cit.,* hlm. 441-467

Sebenarnya, ada jalur yang lebih efektif antara Jawa Tengah dan Madiun, yaitu Solo. Namun Divisi Siliwangi tidak memilih Solo sebagai markas komando, karena di sana kekuatan PKI cukup kuat. Selain itu, sejak tahun 1946 di Solo juga sering terjadi pergolakan antar laskar rakyat sendiri, terutama antara laskar rakyat yang berideologi kiri dengan laskar rakyat lainnya. Pada tahun 1946, misalnya, terjadi perang fisik antara Laskar Pesindo (berafiliasi pada PKI) dengan Laskar Banteng (berafiliasi pada kaum nasionalis). Dalam insiden itu, tokoh Laskar Banteng yang bernama Dr. Muwardi hilang dan tidak terungkap sampai sekarang.[35] Karena alasan itu, Divisi Siliwangi, lebih senang bermarkas di Jawa Tengah bagian Selatan, terutama di Banyumas, Purworejo, Wonosobo, Kedu, dan Magelang. Risikonya tentu mobilisasi ke Madiun lebih jauh.

Dengan dukungan laskar rakyat, seperti Laskar Hizbulah, Divisi Siliwangi berhasil menghancurkan pemberontakan PKI. Muso sendiri tertembak dalam sebuah perburuan di Ponorogo, 31 Oktober 1948. Amir Sjarifoeddin dan pimpinan PKI lainnya berhasil ditangkap, lalu dihukum mati. Keberhasilan TNI menumpas PKI mengesankan Amerika Serikat yang mempunyai pengaruh besar di PBB. Kelak, PBB ternyata menjadi penghalang utama upaya Belanda membentuk pemerintahan Negara Federal tanpa Republik Indonesia.[36]

Selain dalam penumpasan PKI Madiun, Prof. KH. Saifuddin Zuhri bersama Laskar Hizbullah dan NU juga membantu Divisi Siliwangi dalam penumpasan pemberontakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat. Pada mulanya, DI/TII tidak rela Jawa Barat ditinggalkan oleh Divisi Siliwangi akibat Perjanjian Renville, sehingga mereka menganggap telah terjadi

---

[35] *Berangkat dari Pesantren, Ibid.,* hlm. 412

[36] M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern, Op. Cit.,* hlm. 345-346

kekosongan kekuasaan. Namun, setelah Divisi Siliwangi kembali ke Jawa Barat, kenapa mereka tidak menyerahkan kekuasaan kembali kepada Divisi Siliwangi? Inilah letak persoalannya. Ternyata DI/TII ingin mendirikan negara sendiri, Negara Islam Indonesia (NII). Jika ini terjadi, maka NKRI akan pecah, karena wilayah Indonesia bagian timur akan keluar dari Republik Indonesia jika Indonesia menjadi NII. Sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia harus menjadi negara yang mengayomi semua agama dan semua golongan.

Menghadapi situasi seperti ini, Divisi Siliwangi membutuhkan peran Prof. KH. Saifuddin Zuhri, orang yang banyak berjasa pada Divisi Siliwangi saat hijrah ke Jawa Tengah, terutama untuk memberikan bekal spiritual kepada Divisi Siliwangi yang beragama Islam bahwa jika mereka memerangi DI/TII bukan berarti mereka memerangi agama Islam. Jika Divisi Siliwangi memerangi DI/TII pada hakikatnya mereka memerangi pemberontakan.

Karena jasa itu, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Jenderal A.H. Nasution memberikan tanda kehormatan kepada Prof. KH. Saifuddin Zuhri berupa Satyalancana Gerakan Operasi Militer I, Satyalancana Gerakan Operasi Militer V, dan Satyalancana Gerakan Operasi Militer VI, pada 4 November 1964.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1958 tentang Satyalancana Peristiwa Operasi Militer, Satyalancana Gerakan Operasi Militer I diberikan kepada anggota Angkatan Perang dan warga negara bukan angkatan perang yang secara aktif mengikuti gerakan operasi militer terhadap peristiwa Madiun yang terjadi pada tahun 1948 (Pasal 3 dan 5 PP No. 59 Tahun 1958). Sedangkan Satyalancana Gerakan Operasi Militer V diberikan kepada diberikan kepada anggota Angkatan Perang yang secara aktif sekurang-kurangnya 90 hari terus-menerus atau 180 hari terputus putus dalam jangka waktu 2 tahun mengikuti gerakan operasi Militer terhadap peristiwa di Jawa Barat yang

terjadi sejak tanggal 27 Desember 1949 (Pasal 18 PP No. 59 Tahun 1958). Sementara Satyalancana Gerakan Operasi Militer VI diberikan kepada anggota Angkatan Perang yang secara aktif sekurang-kurangnya 90 hari terus-menerus atau 180 hari terputus-putus dalam jangka waktu 2 tahun mengikuti gerakan operasi Militer terhadap peristiwa di Jawa Tengah yang terjadi sejak tanggal 27 Desember 1949 (Pasal 18 PP No. 59 Tahun 1958).

B. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, setidak-tidaknya ada beberapa hal yang dilakukan oleh Prof. KH. Saifuddin Zuhri, yaitu: (1) mengembangkan dan mempraktikkan Islam yang berwawasan Nusantara, sehingga seorang muslim tidak perlu takut untuk menjadi seorang muslim yang saleh, namun di sisi lain tetap menjadi seorang nasionalis yang sejati; (2) Ikut berjuang menjaga agar warga Nahdhiyin khususnya dan umat Islam umumnya tidak mendukung, apalagi terlibat dalam gerakan separatisme, karena separatisme merupakan tindakan yang masuk dalam kategori *bughat* (pemberontakan) terhadap pemerintahan yang sah serta ancaman terhadap keutuhan, kedamaian, dan keselamatan negara; (3) memberikan usulan yang mempersempit perbedaan antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis menjelang keluarnya Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959 tentang Kembali ke UUD 1945.

1. Islam Berwawasan Nusantara

Lingkungan pesantren telah menggembleng Prof. KH. Saifuddin Zuhri dengan wawasan dan budaya Nusantara, sehingga Almarhum mempunyai kesadaran kebangsaan yang besar, semangat patriotisme yang membara, dan jiwa nasionalisme yang tinggi. Jauh sebelum Indonesia merdeka, tokoh-tokoh pesantren

sudah membicarakan dan mewacanakan sebuah impian tentang negara yang merdeka yang sering disebut dengan *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur* (negeri adil makmur yang diridlai Allah).

Menurut peneliti senior *Center for Strategic and International Studies* (CSIS), Harry Tjan Silalahi[37], Prof. KH. Saifuddin Zuhri dapat menjadi seorang muslim yang shaleh dan seorang nasionalis sejati secara bersamaan karena pesantren yang menggemblengnya mengajarkan dan mempraktikkan bahwa arti dari Islam itu adalah damai, bahwa Islam adalah *rahmatan lil alamin*. Ini titik tolak dari Almarhum dalam mengarungi kehidupan.

Pesantren juga mendidik putra-putrinya untuk sadar dengan kebangsaan, sehingga mereka kelak menjadi Indonesia, mengejawantah Indonesia. Dengan pendidikan seperti ini, Almarhum mempunyai kesadaran yang tinggi bahwa Islam tertanam dalam kebudayaan Nusantara. Oleh karena itu, lanjut Harry Tjan, beliau seorang muslim yang nasionalis, sehingga tidak ragu-ragu untuk membela bangsa dan negara. Selama kemerdekaan, Prof. KH. Saifuddin Zuhri tidak gamang untuk berkiprah dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Dalam pesantren diajarkan bahwa "*hubbul wathan minal iman*" yang berarti cinta tanah air merupakan bagian dari keimanan. Jadi, semua orang bisa merasa menjadi muslim namun tetap menjadi nasionalis. Inilah hal yang dihayati Prof. KH. Saifuddin Zuhri, sehingga ia menjadi seorang muslim yang shaleh, namun pada saat bersamaan menjadi seorang nasionalis yang sejati. Dalam konteks inilah kita harus memahami kenapa Prof. KH. Saifuddin Zuhri mau melakukan perang gerilya untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekarang di dunia internasional sudah lumrah pernyataan bahwa kalau ingin mencari Islam yang damai, ramah,

---

[37] Kesaksian Harry Tjan Silalahi yang disampaikan dalam Seminar "Perjuangan dan Pengabdian Prof. KH. Saifuddin Zuhri" yang diselenggarakan oleh PBNU, Selasa, 2 Juli 2013.

santun, dan *rahmatan lil 'alamin*, maka pergilah ke Indonesia. "Kondisi itu tidak lepas dari perjuangan NU dan tokoh-tokohnya seperti Prof. KH. Saifuddin Zuhri", tegas Harry Tjan.

Tempaan dari pesantren untuk menjadi muslim yang shaleh dan nasionalis sejati menjadi spirit dari Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk menularkan semangat kebangsaan kepada orang lain, kepada keluarga dan orang-orang di sekitarnya, anak-anak muda, keluarga besar pesantren, keluarga besar Nahdlatul Ulama, dan kepada seluruh anak bangsa.

2. Bersama NU Melawan Separatisme

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, terutama menjelang dan sesudah tahun 1950-an, muncul berbagai macam gerakan yang justru membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan itu ada yang mengusung ideologi kiri (sosialisme dan komunisme) dan ideologi kanan (Islamisme).

Dalam situasi seperti ini, maka NU mengeluarkan fatwa bahwa gerakan-gerakan itu sudah menjurus pemberontakan, karena memicu pertikaian di antara sesama anak bangsa. Fatwa itu dikenal dengan Fatwa Bughat, yang dikeluarkan oleh NU pada 1954. Dalam literatur klasik, *bughat* dimaknai sebagai tindakan melawan dan mendurhakai *ulil amri* (pemerintahan yang sah) sehingga tindakan itu dapat merusak kedamaian, keselamatan, dan keutuhan sebuah negara.[38]

Selain mengeluarkan Fatwa Bughat, pada tahun yang sama yaitu tahun 1954, NU juga memberi gelar kepada Presiden Soekarno sebagai *Waliyyul Amri ad-Dlaruri bi-Syaukah,* yang bermakna Pemegang Kekuasaan Darurat. Pemberian gelar itu

---

[38] Haji Said Haji Ibrahim, *Qanun Jinayah Syar'iyah,* (Kualalumpur, Darul Ma'rifah, 1996), hlm. 129

merupakan peringatan kepada kaum separatis bahwa Soekarno mempunyai landasan agamis yang kuat untuk memerintah di Indonesia, sehingga perlawanan kepada Soekarno harus dilakukan sesuai dengan saluran yang berlaku, bukan dengan cara pemberontakan. Pemberontakan berarti makar atau *bughat* yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sementara itu, di sisi lain, gelar itu merupakan kritik kepada Presiden Soekarno bahwa ia adalah pemimpin yang tidak sempurna dalam situasi yang tidak sempurna pula (darurat). Karena itu, Presiden Soekarno harus memperbaiki pola dan pendekatan kepemimpinan, sehingga gerakan separatis tidak mempunyai alasan lagi untuk melanjutkan gerakannya di Indonesia[39].

Sebagai aktivis NU, dan menjadi Sekjen PBNU pada tahun 1956, Prof. KH. Saifuddin Zuhri turut serta dan berkewajiban agar seluruh warga NU khususnya dan seluruh umat Islam umumnya dapat memahami isi fatwa itu, sehingga tidak mendukung apalagi membantu gerakan-gerakan yang bersifat *bughat*. Fatwa *bughat* setidak-tidaknya mempunyai beberapa makna penting, yaitu:

Pertama, umat Islam tidak perlu bahkan dilarang untuk terlibat dalam gerakan yang membahayakan NKRI, apalagi gerakan itu menimbulkan konflik yang berkepanjangan yang pada akhirnya mengurangi kemampuan negara untuk memperjuangkan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Bayangkan, jika di berbagai daerah di Indonesia muncul berbagai macam pemberontakan, maka negara harus mengalokasikan sumber daya dalam jumlah yang besar untuk mengatasi gerakan itu. Padahal seharusnya sumber daya itu harus dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Kedua, dengan Fatwa Bughat, gerakan pemberontakan itu kehilangan legitimasi agama, sehingga jargon-jargon agama yang

---

[39] Syarif Hidayat Santoso, "Soekarno dan Ta'ridh Politik NU", Duta Masyarakat, (Jakarta), 27 Juni 2012

mereka gunakan tidak efektif. Sebagaimana kita maklumi, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang agamis, sehingga mudah untuk disentuh dengan hal-hal yang berbau agama. Banyak gerakan di zaman revolusi yang membawa simbol-simbol agama untuk meraih simpati dan dukungan dari masyarakat. Namun dengan Fatwa Bughat, maka jargon-jargon agama yang mereka bawa menjadi tidak efektif.

Ketiga, dengan Fatwa Bughat, NU menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hal yang harus dipertahankan dan diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Pihak-pihak yang melakukan gerakan separatisme berarti telah melakukan *bughat* atau pemberontakan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam.

3. Mempersempit Perbedaan antara Kelompok Nasionalis dan Kelompok Islam

Pada tahun 1955, Indonesia mengadakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR (29 September 1955) dan untuk memilih anggota Konstituante (15 Desember 1955). DPR menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, anggaran, dan tugas lainnya yang ditentukan peraturan perundang-undangan terkait. Sedangkan Konstituante memunyai tugas khusus untuk membentuk UUD baru sebagai pengganti dari UUD Sementara.[40] Dalam Pemilihan Umum itu, partai yang memperoleh suara terbanyak adalah PNI, Masyumi, NU, dan PKI.[41] Konstituante mulai

[40] Pasal 134 UUD Sementara menyatakan: "Konstituante (Sidang Pem–buat UUD) bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan UU Sementara ini."

[41] PNI mendapatkan 57 kursi DPR dan 119 kursi Konstituante. Masyumi mendapatakan 57 kursi DPR dan 112 kursi Konstituante. NU mendapatkan 45 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante, PKI mendapatkan 39 kursi DPR dan 80 kursi Konstituante. Lihat www.wikipedia.org/....../pemilihan_umum_anggota_DPR_dan_Konstituante.

bersidang pada 10 November 1956 yang terdiri atas 40 fraksi dengan ideologi yang berbeda-beda.[42]

Namun Konstituante tidak berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, karena terlibat dalam tiga pertentangan ideologis, yaitu ideologi sosialisme-ekonomi, ideologi Islam, dan ideologi Pancasila.[43] Kelompok pendukung sosialisme ekonomi berpandangan bahwa perjuangannya didasarkan pada falsafah sosialisme dengan meninggalkan ide-ide yang tidak cocok untuk Indonesia. Golongan Islam yang menghendaki agar Islam menjadi dasar negara. Sedangkan kelompok pendukung Pancasila bersikukuh agar Pancasila tetap menjadi dasar negara.

Pada 10-15 September 1957, atas inisiatif Bung Karno dan Bung Hatta diselenggarakan Musyawarah Nasional yang dihadiri berbagai cendekiawan dan tokoh nasional non-partisan. Musyawarah Nasional itu diharapkan dapat membantu Konstituante untuk mendapatkan solusi atas kebuntuan yang terjadi. Musyawarah Nasional ini menghasilkan pernyataan bersama yang menekankan pentingnya keutuhan NKRI dan Pancasila sebagai alat pemersatu. Pernyataan bersama itu yang ditandatangani oleh Soekarno-Hatta berbunyi:

> Bahwa kami bersama atas nama Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah menyatakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
>
> Bahwa sesungguhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah hak milik seluruh rakyat Indonesia, yang berkewajiban memelihara dan membinanya untuk mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.

---

[42] A.M.W. Pranarka, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila,* (Jakarta: CSIS, 1985), hlm. 134.

[43] Aliran sosialisme ekonomi sering menyebut diri sebagai sosial ekono–mi. Namun melihat substansi pemikiran yang disampaikan serta beberapa pernyataan yang merujuk pada sosialisme, maka aliran ini lebih tepat untuk disebut sebagai sosialisme ekonomi. Pandangan dari ketiga kelompok itu diuraikan dalam Wilopo, *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Konstituante,* (Bandung: 1958).

> Bahwa Pancasila yang dicantumkan dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah jaminan hakiki bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berkehidupan bebas dan merdeka, serta mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
>
> Karenanya adalah kewajiban mutlak kami untuk tetap turut serta dengan seluruh rakyat Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia ser–ta segenap alat-alat kekuasaan negara, membina dan membela dasar-dasar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dalam keadaan apapun juga adanya."[44]
>
> Jakarta, 14 September 1957
> Soekarno-Hatta

Namun sejarah mencatat hasil Musyawarah Nasional itu tidak sertamerta mempengaruhi opini Majelis Konstituante untuk segera menjadikan Pancasila sebagai titik temu dari berbagai pertikaian. Sebaliknya ketegangan antar kelompok makin menguat seiring bayang-bayang kebuntuan politik yang kian tak dapat terhindarkan.

Pada tahun 1958 dan awal tahun 1959, pertentangan di antara berbagai kelompok itu makin meruncing. Setelah melalui perdebatan yang panjang dan persidangan dalam Konstituante tidak menghasilkan keputusan bersama, maka akhirnya dilakukan voting, namun hasil voting tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 137 ayat (2) UUD Sementara bahwa keputusan dalam sidang Konstituante yang dilakukan melalui voting harus mendapatkan persetujuan dari dua pertiga anggota yang hadir kemudian disahkan oleh Pemerintah. Sidang Konstituante sendiri harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota yang bersidang.[45]

---

[44] Sekretariat Negara, *30 Tahun Indonesia Merdeka, 2,* (Jakarta: Sekretariat Negara), hlm. 113

[45] Pasal 137 ayat (1) dan (2) UUD Sementara berbunyi: "(1) Konstituante tidak dapat bermufakat atau mengambil keputusan tentang rancangan UUD baru, jika pada rapatnya tidak hadir sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota sidang. (2) UUD baru berlaku jika rancangannya telah diterima dengan sekurang-kurangnya dua-pertiga dari jumlah suara anggota yang hadir

Pada 22 April 1959, Presiden Soekarno di depan Konsituante meminta agar Konstituante memahami amanat penderitaan rakyat yang menjiwai pembukaan UUD 1945, yaitu: (1) Ciptakanlah masyarakat yang adil dan makmur, (2) bentuklah suatu Negara Kesatuan berdasarkan paham unitarisme, dan (3) anutlah cara bermusyawarah dalam satu badan atau sistem monokameral. Bung Karno juga meminta agar institusi ini segera menyelesaikan tugas-tugasnya. Presiden Soekarno juga mengingatkan kembali pidatonya dahulu yang disampaikan saat pelantikan Konstituante agar institusi itu "...bersama Pemerintah menetapkan suatu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang sesuai dengan jiwa, watak, dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Konstituante janganlah dijadikan tempat berdebat bertele-tele, suatu medan pertempuran bagi partai-partai atau pemimpin-pemimpin politik."[46]

Jika Konstituante tidak dapat menyelesaikann tugasnya, Presiden Soekarno juga mengajukan usul untuk kembali ke UUD 1945 sebagai solusi memecahkan kebuntuan politik. "Saya berharap saudara sekalian dalam waktu yang singkat dapat menerima ajakan pemerintah, sehingga dalam waktu tidak lama lagi Konstituante dan Pemerintah bersama-sama dapat menetapkan naskah Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, guna menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara yang berlaku sekarang ini," demikian ungkap Bung Karno dalam Sidang Konstituante itu.[47]

Perdebatan dalam Sidang Konstituante berubah apakah

---

dan kemudian disahkan oleh Pemerintah."

[46] Pidato Presiden Soekarno dalam Sidang Konstituante 22 April 1959 yang berjudul *Res Publica, Sekali Lagi Res Publica,* dapat dilihat dalam Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Op. Cit.,* hlm. 653-702.

[47] Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Op. Cit.,* hlm. 658.

akan menerima usul Presiden Soekarno atau menolaknya, bukan lagi membahas isu pokok apakah Indonesia akan mempertahankan Pancasila atau tidak. Karena tidak ada mufakat, maka diadakan voting yang diadakan sampai 3 kali, yaitu 30 Mei 1959, 1 Juni 1959, dan 2 Juni 1959, karena suara pendukung untuk kembali ke UUD 1945 atau penolaknya sama-sama tidak mencapai 2/3 dari suara yang hadir.[48]

Karena Konstituante tidak menghasilkan keputusan berupa Konstitusi pengganti UUD Sementara, maka pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno atas nama Presiden dan atas nama Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, mengeluarkan Dekrit Presiden yang menyatakan bahwa "Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara." Salah satu pertimbangan dari Dekrit itu adalah untuk menjaga keutuhan NKRI. Ketidakmampuan Konstituante untuk menyelesaikan tugasnya dianggap dapat "menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa, dan Bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur."[49]

Apa peran Prof. KH. Saifuddin Zuhri dalam babakan sejarah itu? Menurut kesaksian KH. Chalid Mawardi, beberapa waktu sebelum Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden,

---

[48] Dalam voting 30 Mei 1959, konfigurasi suara adalah 269 suara setuju kembali ke UUD 1945 dan 199 menolak. Dalam voting 1 Juni 1959, 264 suara setuju dan 204 menolak, Dalam voting 2 Juni 1959, 263 setuju dan 203 menolak. *30 Tahun Indonesia Merdeka, 2, Op. Cit.,* hlm. 139-140.

[49] Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang dimuat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 150 Tahun 1959 tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diumumkan dalam Lembaran Negara No. 75 Tahun 1959.

beliau mengutus Jenderal A.H. Nasution untuk berkonsultasi dengan Ketua Umum PBNU KH. Idham Chalid. KH. Idham Chalid meminta Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk mendampinginya. Sang Jenderal bertanya, bagaimana pendapat NU tentang rencana Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden? Prof. KH. Saifuddin Zuhri menjawab pertanyaan itu dengan ringkas, "Di mana posisi Piagam Jakarta dalam Dekrit itu?"[50]

Dalam buku *Berangkat dari Pesantren,* Prof. KH. Saifuddin Zuhri mengisahkan kejadian itu, sebagai berikut:

> Suatu malam di awal Juli 1959, telepon di rumahku berdering pada Pukul 01.30 dini hari. Rupanya telepon itu berasal dari KH. Idham Chalid yang memintaku datang ke rumahnya di Jalan Jogya (Kini Jalan Ki Mangunsarkoro) Nomor 51. Aku diminta mendampinginya berhubung akan datang dua orang pejabat amat penting. Pukul 02.00 lebih sedikit aku tiba di lokasi. Tak berapa lama datang dua orang tamu yang sangat penting itu, yang tak lain adalah Jenderal AH. Nasution, Kepala Staf Angkatan Darat/Menteri Keamanan Pertahanan dan Letkol CPM R. Rush, Komandan CPM Seluruh Indonesia.
>
> Kedatangan dua perwira tinggi itu untuk meminta saran NU berhubung akan berangkatnya mereka ke Tokyo untuk menghadap Presiden Soekarno yang sedang berobat di sana. Dari kalangan pimpinan ABRI (istilahnya waktu itu Angkatan Perang Republik Indonesia, APRI) sendiri akan mengusulkan kepada Presiden agar UUD 1945 diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden. Berhubung dengan itu, kedua perwira tinggi tersebut meminta pikiran NU materi apa yang perlu dimasukkan dalam Dekrit Presiden.
>
> "Isinya terserah Pemerintah, tetapi hendaklah memperhatikan suara-suara golongan Islam dalam Konstituante," kata Pak Idham Chalid.
>
> "Apa konkretnya tuntutan golongan Islam itu?" Jenderal A.H. Nasution bertanya.
>
> "Agar Piagam Jakarta diakui kedudukannya sebagai yang menjiwai UUD 1945," kataku.[51]

---

[50] Kesaksian KH. Chalid Mawardi disampaikan dalam Seminar "Perjuangan dan Pengabdian Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk Bangsa dan Negara" yang diselenggarakan PBNU, 2 Juli 2013.

[51] *Berangkat dari Pesantren, Op. Cit.,* hlm. 575

Mungkin karena sudah mendapat jawaban jelas dari Prof. KH. Saifuddin Zuhri, beberapa saat kemudian Jenderal A.H. Nasution segera pulang kembali untuk melaporkan hasil pertemuannya. Akhirnya keluarlah Dekrit Presiden Soekarno, 5 Juli 1959, yang salah satu alineanya berbunyi: “Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut”.

Dengan adanya alinea itu, maka perbedaan antara golongan nasionalis Islam dengan golongan nasionalis sekuler makin dekat. Hal ini karena adanya alinea itu memberikan jaminan kepada umat Islam untuk memperjuangkan aspirasi keislaman dalam bingkai NKRI, meskipun dasar NKRI adalah Pancasila, bukan Islam. Bagi kelompok nasionalis sekuler, Piagam Jakarta dihasilkan oleh Panitia Sembilan yang dipimpin oleh Soekarno, panutan kaum nasionalis. Jadi, tidak ada masalah jika Piagam Jakarta dikatakan “...menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut”. Apalagi fakta sejarah sudah mengatakan demikian.

Barangkali, karena makin dekatnya antara aspirasi golongan nasionalis Islam dan golongan nasionalis sekuler, di samping karena dukungan Tentara Republik Indonesia, maka Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dapat berlaku dan bangsa Indonesia selamat dari ancaman perpecahan ideologis.

C. Menegakkan Asas Demokrasi

Salah satu hal penting dalam demokrasi adalah kebebasan berkumpul dan berserikat yang bertujuan untuk mengagregasikan aspirasi dan untuk menindaklanjutinya. Dengan kebebasan berkumpul dan berserikat diharapkan masyarakat dapat berkelompok sesuai dengan aspirasinya, lalu memperjuangkan aspirasi itu melalui saluran yang ada.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) adalah salah satu organisasi mahasiswa yang mempunyai peran penting untuk mendidik mahasiswa mencintai tanah air, berjuang untuk bangsa dan negara, serta untuk mengabdikan diri memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Pada 5 Februari 1947 bertepatan 14 Rabiul Awal 1366 H atas inisiatif Lafran Pane (1922-1991) di Yogyakarta berdirilah HMI. Lafran Pane waktu itu mahasiswa tingkat Sekolah Tinggi Islam disingkat STI (kini Universitas Islam Indonesia). Dalam Historiografi Himpunan Mahasiswa Islam Tahun 1947-1993 oleh Agussalim Sitompul, diungkapkan ide untuk mendirikan Himpunan Mahasiswa Islam tidaklah tergesa-gesa, melainkan sudah muncul sejak November 1946 dan direncanakan secara matang. HMI didirikan dengan tujuan mempertegak dan mengembangkan agama Islam; mempertinggi derajat rakyat dan negara Republik Indonesia. Dalam acara peringatan Dies Natalis HMI di Yogyakarta pada 6 Februari 1948 Jenderal Sudirman menyebut arti HMI sebagai (H)arapan (M)asyarakat (I)ndonesia. [52]

Dalam masa suram demokrasi Indonesia di era Orde Lama, Partai Komunis Indonesia (PKI) sangat membenci HMI. HMI pada masa itu lebih menunjukkan sikap kritis-reaksioner terhadap penguasa otoriter. DN Aidit menuntut pembubaran HMI di hadapan Bung Karno pada pembukaan Kongres CGMI 29 September 1965. Dengan sistematis PKI ingin menghancurkan HMI. [53] Berkaitan dengan rencana pembubaran HMI, Prof. KH. Saifuddin Zuhri mengisahkan:

> Pada suatu pagi aku dipanggil Presiden Soekarno di Istana Merdeka. Aku diterima di serambi belakang. Menjadi kebiasaan Presiden sejak di Yogyakarta, tiap pagi antara Pukul 07.00-09.00, untuk menyelengga–

[52] M Fuad Nasar, "Menatap Sosok HMI", Harian Pelita (Jakarta), 19 Maret 2013

[53] "Menatap Sosok HMI", *Ibid.*

rakan koffie uurtje- sejenak minum kopi- bersama beberapa orang tamu–nya, baik yang datang dengan perjanjian maupun tanpa perjanjian. Biasanya mereka berjumlah hingga belasan orang dengan berbagai profesi. Ada menteri, duta besar, perwira tinggi, wartawan, pengusaha swasta, seniman, dan lain-lain. Masing-masing disuguhi setangkup roti panggang yang ditaburi gula pasir dan telur dadar, sebagai teman secangkir kopi hitam.

Setelah beberapa tamu memperoleh giliran masing-masing untuk berbicara empat mata dengan Presiden, aku dipersilahkan duduk di sebelahnya. Tamu-tamu tinggal 3-4 orang saja, di antara yang kukenali ialah Hasyim Ning, salah seorang pengusaha nasional yang berhasil.

"Saya ingin bicara dengan Saudara, biarlah ada Hasyim Ning tidak apa," Presiden memulai keterangannya mengenai maksudnya memanggilku.

"Saya memberi tahu kepada Saudara, selaku Menteri Agama, bahwa saya akan membubarkan HMI," seketika aku seperti mendengar suara petir. Beberapa detik aku terpana, seperti kehilangan keseimbangan mental. Alhamdulillah, aku tidak kehilangan akal, aku cepat mengatasi kegoncangan batinku yang agak tiba-tiba tadi.

"Mengapa HMI akan dibubarkan?" aku ingin tahu alasannya

"Berbagai laporan disampaikan kepada saya bahwa di mana-mana HMI melakukan tindakan anti revolusi dan bersikap reaksioner," kata Presiden. Ia menatap wajahku dalam-dalam seperti hendak menguak isi kepalaku.

"Kadar anti revolusi maupun reaksionernya sampai di mana?" aku bertanya.

"Yaaah, misalnya selalu bersikap aneh, tukang kritik, bersikap liberal seolah-olah hendak mengembalikan adat kebarat-baratan, dan lain-lain," jawab Presiden Soekarno.

"Apakah HMI sudah pernah Bapak panggil untuk dinasihati?" aku bertanya.

"Secara umum dan terbuka saya sudah berulang-ulang memperi–ngatkan lewat pidato-pidato saya!" Jawab Presiden Soekarno.

Aku sejenak membuat keseimbangan dalam diriku, antara emosi dan akal pikiran. Karena Presiden memanggil aku, itu artinya aku masih dihargai atau (katakanlah) diperhitungkan. Kalau tidak, bukanlah Presiden dapat saja membubarkan HMI tanpa kehadiranku? Ataukah kehadiranku justru untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa aku menyetujui pembubaran HMI?

"Mohon dipertimbangkan sekali lagi!" aku memberanikan diri untuk membuka diskusi. "HMI itu anak-anak muda. Mereka sudah termakan oleh pidato-pidato Bapak di banyak peristiwa: Kalau saya ini anak muda, saya akan memberontak melihat hal-hal yang tidak beres di kanan kiri kita. Lha, HMI itu telah mempraktikkan anjuran Bapak,

apakah Bapak tidak bangga?"

Presiden menatap wajahku dengan pandangan lunak, memberi isyarat kepadaku masih terbuka kesempatan berdiskusi terus.

"Mereka itu para mahasiswa berbagai fakultas," aku kemukakan pertimbanganku, "mereka adalah calon insinyur, dokter, ekonom, sarjana hukum, dan lain-lain. Mereka itu merupakan kader-kader bangsa. Sudah jamak anak-anak muda berpikiran dinamis, karena itu, seperti yang sering Bapak pidatokan, mereka bisa membentuk gelombang arus listrik. Bapak lebih tahu daripada saya, arus listrik harus ditransformir, dan bila gerakan itu arus air yang deras mengalir harus dikanalisir, disalurkan, supaya menjadi kekuatan yang bermanfaat. Kalau HMI dibubarkan mereka menjadi frustasi dan kita rugi semua!"

"Mereka kan anak-anak Masyumi. Tentu seperti bapaknya, tetap saja reaksioner!" Bung Karno masih belum menyerah tetapi semangatnya untuk membubarkan HMI tidak menggebu-gebu lagi.

"Pak, ketika masa jaya-jayanya Masyumi, mereka masih anak-anak SMA dan SMP. Mereka tidak tahu persis apa itu Masyumi. Kita jangan mengikuti falsafah yang mengatakan: "Karena bapaknya berbuat salah, anak-anaknya pun berdosa semuanya...!" aku merasa di atas angin.

Presiden Soekarno untuk beberapa saat memutuskan pembicaraanya denganku karena memanggil ajudannya untuk suatu keperluan. Buatku mengandung isyarat bahwa ia mulai kehabisan argumentasi. Kalau tidak, dan kalau memang berada di atas angin, buat apa memanggil ajudan?

"Tetapi bagaimanapun HMI dan SBII bakal saya bubarkan. Kalau HMI bubar, NU kan untung, PMII makin besar!" kata Presiden.

"Soalnya bukan masalah untung atau bukan untung. Sulit buat saya selagi masih Menteri Agama ada organisasi Islam yang dibubarkan tanpa alasan kuat!" aku memberanikan diri untuk qulil haqqa walau kaana murran...!

"Wah....tidak sangka kalau Saudara membela HMI, ya?" Presiden berbicara sambil pandangannya menerawang.

"Bukan membela HMI, pak! Saya tidak ingin Presiden berbuat berle–bihan. Itu termasuk tugas kami para pembantu Presiden," kataku makin mantap.

"Bukan berlebihan, tetapi saya berbuat menurut gewetan saya, perasaan hati saya!" kata Presiden.

Aku merenung sejenak, lalu aku menentukan sikap terakhir. "Kalau Bapak hendak membubarkan HMI, artinya pertimbangan saya berten–tangan dengan gewetan Bapak. Maka tugasku sebagai pembantu Bapak hanya sampai di sini...!" aku telah bulat kata dan tawakal.

"Oooooh, jangan berkata begitu. Saya tetap memerlukan Saudara membantu saya...!" Presiden Soekarno berkata sambil merekahkan senyuman di bibirnya. Tangannya diulurkan kepadaku. Refleks tangan–

nya kujabat juga.

"Baiklah, HMI tidak saya bubarkan. Tetapi saya minta jaminan, HMI akan menjadi organisasi yang progresif. Kau bersama Nasution, Roeslan Abdulgani, dan Syarief Thayeb harus membimbing HMI," kata Presiden menyudahi pertemuannya denganku."[54]

Pertemuan bersejarah itu sempat ditelusuri oleh Sulastomo, mantan Ketua Umum PB HMI saat itu bertahun-tahun kemudian. Dalam sebuah kesempatan, beliau bertemu dengan Hasyim Ning dan menanyakan perihal pertemuan antara Presiden Soekarno dan Prof. KH. Saifuddin Zuhri soal pembubaran HMI. Hasyim Ning membenarkan pertemuan itu seraya mengingatkan agar anak-anak HMI berterima kasih kepada Prof. KH. Saifuddin Zuhri yang telah menyelamatkan HMI.

Sulastomo juga mengingat masa lalu. Di saat desakan dari PKI dan kelompoknya agar HMI dibubarkan makin kuat, HMI Ciputat dan HMI Yogyakarta justru melakukan demonstrasi terhadap Menteri Agama Prof. KH. Saifuddin Zuhri, karena persoalan penetapan pimpinan di kedua instansi itu. Menurut Sulastomo, demonstrasi itu berlangsung cukup keras, bahkan di Ciputat sempat menimbulkan kerusakan fisik di kampus. Tak urung, kedua demonstrasi itu menjadi berita nasional. Namun, Prof. KH. Saifuddin Zuhri tidak dendam kepada HMI. Justru di saat dibutuhkan Almarhum justru membela HMI, meskipun baru saja beberapa eksponen di HMI melakukan demonstrasi menentang kebijakannya.[55]

Masih menurut Sulastomo, walaupun Prof. KH. Saifuddin Zuhri sangat berjasa kepada HMI, namun beliau tidak pernah menggembor-gemborkan jasanya itu. Sebagai mantan Ketua

---

[54] *Berangkat dari Pesantren,* op.cit., hlm. 671-674

[55] Kesaksian Sulastomo disampaikan dalam Seminar "Perjuangan dan Pengabdian Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk Bangsa dan Negara" yang diselenggarakan PBNU, 2 Juli 2013.

Umum HMI, Sulastomo, baru mengetahui peristiwa itu beberapa tahun kemudian. Padahal sebagai Menteri Agama beliau bisa memanggil Ketua Umum HMI dan menjelaskan jasa-jasanya terhadap HMI, setidak-tidaknya untuk mendapatkan dukungan politik dari HMI. Namun beliau tidak melakukan hal itu. Ini menunjukkan bahwa beliau betul-betul ikhlas dan tanpa pamrih dalam membela HMI.[56]

Ini merupakan contoh yang sangat mulia yang harus dicontoh oleh tokoh-tokoh Islam di masa kini dan di masa mendatang. Kekuasaan harus digunakan untuk memajukan seluruh potensi bangsa, meskipun potensi bangsa itu bukan dari kelompok kita sendiri. Selama masih bertumpah darah Indonesia, bertanah air Indonesia, dan berbahasa Indonesia, semua eksponen bangsa berhak untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana juga berhak untuk maju dan berkembang sesuai dengan potensi masing-masing.

D. Membentuk Karakter Bangsa

Secara umum istilah "karakter" yang sering disamakan dengan istilah "tabiat", "watak" atau "akhlak" yang berarti sesuatu yang menekankan unsur psikososial yang dikaitkan dengan pendidikan dan konteks lingkungan. Secara harfiah menurut beberapa bahasa, karakter memiliki berbagai arti seperti "kharacter" (latin) berarti *instrument of marking*, "*charessein*" (Prancis) berarti *to engrove* (mengukir), "watek" (Jawa) berarti ciri kejiwaan; "watak" (Indonesia) berarti sifat pembawaan yang mempengaruhi tingkah laku, budi pekerti, tabiat, dan peringai; "akhlak" (Arab) yang berarti perilaku yang terpuji.

Dalam istilah Inggris, karakter berpadanan dengan "*character*" yang dalam Oxford Advace Learner's Dictionary of Current

[56] *Ibid.*

English (2000) diartikan: *(1) All the qualities and features that make a person, groups of people, and places different from others* (semua baik kualitas maupun ciri-ciri yang membuat seseorang, kelompok orang atau tempat berbeda dari yang lain); (2) *the way the something is, or a particular quality or peature that a thing, an event or a place has* (cara yang khas atau kekhasan yang dimiliki oleh sesuatu, peristiwa atau tempat); (3) *strong personal qualities such as the ability to deal with difficult or dangerous situations* (kualitas pribadi yang tangguh misalnya kemampuan dalam menghadapi situasi yang sulit atau berbahaya); (4) *the interesting or unusual quality that a place or a person has (*kualitas menarik dan luar biasa yang dimiliki suatu tempat atau orang).

Ketika menjabat sebagai Menteri Agama, Prof. KH. Saifuddin Zuhri, ternyata mendapatkan tugas yang maha berat, yaitu menjadikan agama sebagai unsur penting dalam pembangunan karakter bangsa. Hal ini sesuai dengan pesan Presiden Soekarno melalui pidato tanpa teks saat pelantikan Prof. KH. Saifuddin Zuhri sebagai Menteri Agama:

> Tidak perlu saya jelaskan kepada saudara yang mulia, apa arti sumpah. Saudaralah salah satu tokoh yang mengerti benar-benar arti sumpah lebih daripada orang-orang awam. Saudara adalah bukan saja tokoh daripada masyarakat agama Islam, agama yang memberi arti kepada sumpah sedalam-dalamnya dan setinggi-tingginya. Saudara adalah pula tokoh dari bangsa Indonesia seluruhnya yang memang sejak saudara muda sampai sekarang amat berjasa dalam segala perjuangan bangsa Indonesia itu, baik di dalam lapangan kemasyarakatan, maupun dalam lapangan politik, maupan dalam lapangan agama, sehingga saya dengan penuh kepercayaan dapat mempercayai bahwa saudara akan menjalankan pekerjaan saudara sebagai Menteri Agama dalam Pemerintah Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang saudara ucapkan di dalam sumpah tadi.
>
> ...barangkali tidak banyak orang di antara tokoh-tokoh itu yang mengerti sedalam-dalamnya sebagaimana saudara Saifuddin Zuhri betapa dalamnya di dalam lubuk hati Pemerintah Republik Indonesia keinginan dan usaha untuk mengembangkan kehidupan agama di kalangan rakyat Indonesia.

> ...Saudaralah yang mengerti bahwa kedudukan agama di dalam masyarakat adalah salah satu untur mutlak di dalam segenap usaha kita di lapangan nation building. Nation building yang mengenai segala hal, mengenai bidang politik, mengenai bidang ekonomi, mengenai bidang kejasmanian, mengenai bidang ekonomi, mengenai bidang masyarakat, mengenai bidang hubungan internasional. Dan saudara mengerti bahwa di dalam nation bulding ini, salah satu unsur mutlak dalam nation building Indonesia ini, agama dalam arti yang seluas-luasnya menduduki tempat yang amat penting. [57]

Namun bagi Ketua Umum PBNU, KH. Said Aqil Siradj, tugas untuk menjadikan agama sebagai hal yang fundamental dalam pembangunan karakter bangsa bukan sesuatu yang asing bagi Prof. KH. Saifuddin Zuhri. Menurutnya, Prof. KH. Saifuddin adalah santri tulen. Dalam pesantren, santri belajar secara ikhlas. Mereka menghafal al-Qur'an atau mempelajari kitab kuning bukan untuk mendapatkan sertifikat atau untuk menaikkan pangkat, melainkan karena cinta kepada ilmu pengetahuan itu sendiri. Di pesantren, santri belajar dengan ikhlas karena ingin mempraktekkan ilmu itu dalam kehidupan sehari. Santri belajar menjadi petani, membuat bata merah, dan lain-lain di pesantren. Di atas itu, di pesantren ada akhlak mulia. Para santri terbiasa untuk hidup bersih dan berintegritas. Para santri dididik untuk tidak mencuri, bukan karena sanksi dari manusia, melainkan karena sanksi dari Allah sangat berat. Jadi, cukup memprihatinkan jika di masa kini ada alumni pesantren yang terlibat dalam tindak pidana korupsi[58].

Karakter bangsa apakah yang dibangun Prof. KH. Saifuddin Zuhri selama memimpin Kementerian Agama? Karakter bangsa

---

[57] Saifuddin Zuhri, *Peranan Departemen Agama dalam Revolusi dan Pembangunan Bangsa,* (Jakarta: Biro Penerbitan Perpustakaan Agama, 1965), hlm. VIII-IX.

[58] Pernyataan KH. Said Aqil Siradj disampaikan dalam Seminar "Perjuangan dan Pengabdian Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk Bangsa dan Negara," yang diselenggarakan oleh PBNU, 2 Juli 2013.

yang dibangun oleh Prof. KH. Saifuddin Zuhri adalah, antara lain, (1) membangun kehidupan yang agamis; (2) pengelolaan pemerintahan yang bersih; (3) Mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan kelompok, apalagi kepentingan pribadi; serta (4) menjunjung tinggi sopan santun dan adat istiadat ketimuran.

Dalam hal membangun kehidupan yang agamis, Prof. KH. Saifuddin Zuhri, berpandangan bahwa UUD 1945 telah memberikan jaminan tentang pelaksanaan peribadatan sesuai dengan agama masing-masing. Selain itu, segala perundang-undangan dan peraturan negara dalam menyelenggarakan hajat dan kehidupan bangsa tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama yang ada di Indonesia[59]. Secara individu, setiap orang harus merasa bahwa ia bersama Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama, seperti melakukan tindak pidana korupsi. Dengan merasa bahwa seseorang bersama Tuhan Yang Maha Esa maka ia akan berusaha mencari rezeki yang halal, dengan bekerja keras dan sekuat tenaga.[60]

Dalam hal pengelolaan pemerintahan yang bersih, Prof. KH. Saifuddin Zuhri memberikan contoh dan keteladanan dengan hidup sederhana, tidak membolehkan anak-anaknya, apalagi keponakan-keponakan, untuk menggunakan fasilitas negara (seperti naik haji), dan tidak melibatkan keluarga atau kroni dalam pengelolaan keuangan di kementerian yang dipimpinnya. Tahun 1960-an adalah tahun di mana bangsa Indonesia melancarkan pemberantasan korupsi. Banyak pejabat negara, bahkan beberapa menteri, harus berurusan dengan aparatus penegak hukum. Namun Prof. KH. Saifuddin Zuhri dan jajarannya tidak terusik

---

[59] *Agama Unsur Mutlak dalam Nation Building, Op. Cit.,* hlm. 70
[60] *Agama Unsur Mutlak dalam Nation Building, Ibid.*, hlm. 196

dengan pemberantasan korupsi karena betul-betul menerapkan pengelolaan keuangan secara bersih dan transparan.

Dalam hal pengutamaan kepentingan bangsa dan negara di atas kelompok terlihat jelas dalam rencana pembubaran Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Jika berbicara kepentingan sempit, pembubaran HMI akan menguntungkan NU yang sudah mempunyai organisasi sejenis, yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Namun Prof. KH. Saifuddin Zuhri menentang pembubaran HMI dan lebih memilih mengundurkan diri sebagai Menteri Agama daripada harus membubarkan HMI[61].

Dalam hal menjunjung tinggi sopan santun dan adat ketimuran diperlihatkan Prof. KH. Saifuddin Zuhri saat menerima tawaran menjadi Menteri Agama dari Presiden Soekarno pada tahun 1962. Prof. KH. Saifuddin Zuhri tidak langsung menerima tawaran itu, melainkan meminta waktu untuk berkonsultasi dengan para kiai dan guru-gurunya di NU. Begitu pula jika ada persoalan penting, ia berkonsultasi dengan mereka sebelum mengambil sikap. Menurut Sejarahwan dari UI Anhar Gonggong, sikap ini jarang ditemukan pada masa kini. Menurutnya: "Sikap ini harus ditiru oleh pejabat sekarang yang cenderung memanfaatkan jabatan untuk kepentingan diri sendiri, dan jika ada persoalan menggunakan kelompoknya untuk melindungi jabatannya itu."[62]

E. Merintis Pendidikan Berwawasan Kebangsaan

Prof. KH. Saifuddin Zuhri tidak sempat mengenyam pendidikan formal yang tinggi. Ia tamat pendidikan dasar di Sekolah Rendah Nomor Dua Bumi Putra. Itupun ia tidak terlalu memperdulikan sertifikat kelulusannya. Ketika itu pada tahun

---

[61] *Berangkat dari Pesantren, Op.Cit.,* hlm. 671-674

[62] Kesaksian Anhar Gonggong disampaikan dalam Seminar "Perjuangan dan Pengabdian Prof. KH. Saifuddin Zuhri" yang diselenggarakan PBNU, 2 Juli 2013.

1930, ia berusia 11 tahun. Baginya, menebus sertifikat dengan uang 50 sen terlalu mahal bagi keluarga yang berpendapatan rata-rata 15 sen per hari. Dan yang lebih penting lagi, ia keberatan untuk menjawab tentang termasuk golongan apa orang tuanya itu, karena status itu akan dimasukkan ke dalam sertifikat. Pertanyaan sang guru mengenai golongan orangtua yang akan diterakan dalam sertifikat ini dianggap Prof. KH. Saifuddin Zuhri sebagai persoalan yang mengada-ada. Baginya, ilmu pengetahuan harus menjadi milik semua orang. Dan oleh karena itu status, golongan, suku, ras, warna kulit dan agama tidak terkait dengan hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan. Selain itu, dalam sertifikat Sekolah Bumi Putra tersebut tertulis kalimat Belanda berbunyi "*2e Indlandsche School*" yang artinya Sekolah Bumi Putra Kelas Dua, yang dianggap orang setempat sebagai tidak berguna sama sekali, bahkan ada yang mencemooh bahwa sertifikatnya lebih layak sebagai bungkus terasi.[63]

Tahun 1929, Prof. KH. Saifuddin Zuhri mendaftar dan diterima di Madrasah Al-Huda di Sukaraja Wetan yang berjarak 10 km dari rumahnya. Setelah menamatkan pendidikan di Al-Huda tahun 1936, saat usianya menginjak 18 tahun, ia merantau ke Solo untuk melanjutkan pendidikannya. Mula-mula di madrasah Mambaul Ulum, lalu pindah ke Madrasah Salafiyah, madrasah modern yang menggunakan bahasa pengantar Bahasa Arab ala Mesir. Tak lama kemudian, dia berpindah lagi ke Madrasah Al-Islam.

Pengembaraannya di Solo berlangsung kira-kira 13 bulan. Selama dalam pengembaraan itu, ia sempat mengikut kursus jurnalistik, *verkoper* (*salesmenship*), menghadiri ceramah-ceramah Muhammadiyah, ceramah-ceramah pastur dan pendeta

---

[63] *Menteri-menteri Agama RI, Biografi Sosial Politik, Op. Cit.,* hlm. 208, dikutip dari *Berangkat dari Pesantren, Op. Cit.,* hlm. 1-2

Kristen, perkumpulan kebatinan, serta *nambal* (menambah berbagai pelajaran yang tertinggal) dari teman dan kiai lain, yang tinggal dekat Madrasah Al-Islam. Di perantauan inilah ia bersinggungan dengan dunia luar secara lebih luas dan intensif. Ia sempat menyaksikan berbagai kegiatan berskala nasional, seperti kongres wartawan, kongres Bahasa Indonesia, serta mengenal tokoh-tokohnya.

Pada saat sekolah di Madrasah Al-Huda, saat duduk di kelas terakhir Saifuddin Zuri sudah mulai menjadi 'ustadz kecil', mengajar kelas yang lebih rendah daripada yang ia duduki. Juga mengajar di berbagai kursus pemuda. Saat itu usianya 17 tahun dan mulai haus membaca. Dengan kemampuan mengetik dan kegemaran membaca majalah dan surat kabar ia mulai tertarik membuat tulisan dan mencoba menulis berita yang ia kirimkan ke sejumlah penerbitan. Ia kemudian diterima sebagai koresponden Harian *Pemandangan* dan *Hong Po* yang terbit di Jakarta. Bahkan di kemudian hari menjadi koresponden *Antara,* menjadi pembantu tetap *Berita Nahdlatul Ulama* dan *Suara Ansor* yang terbit di Surabaya, ia juga sesekali menulis di *Pesat* majalah populer yang terbit di Jakarta pimpinan suami istri Sayuti Melik dan SK Trimurti.[64]

Semasa menjabat sebagai Komisaris Daerah Ansor Jawa Tengah bagian selatan, ia juga mengajar di dua Madrasah NU sekaligus, yang berjarak sekitar 6,5 km. Setiap hari ia harus mengayuh sepeda untuk mengajar di Sokaraja (07:00-12:00), dan mengayuh lagi untuk mengajar di Purwokerto (14:30-17:00). Di hari-hari libur mingguan, yang bertepatan pada hari Jumat, ia biasa keliling ke cabang-cabang Ansor di daerah Wonosobo, Temanggung, Magelang, Purworejo, Kebumen, dan Karanganyar untuk memberikan kursus-kursus pemimpin organisasi dan

---

[64] *Menteri-Menteri Agama, Ibid,* hlm. 212

mengatasi kesulitan yang sedang dihadapi cabang yang bersangkutan.

Akan tetapi dari semua tugas yang sedang diemban, selain sebagai pemimpin organisasi dan wartawan, yang dianggap paling menyita perhatian dan ketekunannya adalah tugasnya sebagai guru Madrasah NU. Mula-mula di dua madrasah, namun sejak ia mendirikan sekolah Islam yang dilengkapi bahasa Belanda bernama *Islamitisch Westerse Shoel* (Sekolah Islam dengan bahasa Barat), tanggung jawabnya beralih. Di sekolah yang diasuh oleh *Meneer* Sunarko dan *Juffrouw* Sutiah selaku guru pembantu, ia menjadi guru agama. Akhirnya tugasnya sebagai ustadz di madrasah NU Sokaraja pun dilepaskan. Adapun di madrasah NU di Purwokerjto tetap dipertahankan.

Lembaga pendidikan *Islamiticsh Westerse Schoel* (IWS) pada perkembangan lebih lanjut diletakkan di bawah naungan NU. Ia mengangkat R Sunarko, temannya, sebagai direkturnya, sementara ia sendiri menjadi salah seorang guru Islam. Selaku guru ia juga berpantolan, berdasi, dan berpeci serta dipanggil *meneer* (tuan).

Saat perang Pasific berkecamuk, dan tentara Jepang dikabarkan telah melakukan pendaratan di beberapa tempat di pulau Jawa, di Banten, Indramayu, dan Tuban, sudah beberapa harian surat kabar tidak terbit. Karyawannya banyak yang mengungsi atau pulang ke desa. Sebagai seorang guru, sebagaimana undang-undang bela diri, ia ditempatkan di Dinas Perlindungan Bahaya Udara, *Lucht* (*Gevaar*) *Beschrming Dienst,* disingkat LBS. Ia ditugaskan kalau terdengar bunyi sirine karena ada serangan musuh, ia bersama anggota lain dalam regu melakukan ronda keliling untuk memeriksa apakah masyarakat menaati peraturan memadamkan semua penerangan lampu. Selain itu, orang pun harus bersembunyi dalam lubang-lubang perlindungan yang dibuat sendiri oleh rakyat.

Prof. KH. Saifuddin Zuhri terpaksa harus menutup IWS NU, berkemas-kemas memberesi alat-alat sekolah dan buku-buku di sekolah itu, untuk menjamin keselamatan murid-murid dari ancaman bahaya perang.

Pada awal tahun 1943, Prof. KH. Saifuddin Zuhri dengan persetujuan Majelis Konsul NU mendirikan Kulliyatul Mu'allimin dan Kulliyatul Muballighin dalam bentuk kursus reguler selama (masing-masing) tiga bulan, yaitu kursus untuk meningkatkan mutu guru-guru madrasah dan para mubaligh. Ia sendiri menjadi direkturnya, sementara kiai Akhmad Syatibi, ulama kondang setempat, diangkat menjadi guru agama. Pendirian ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas para ustadz dan juru dakwah, dan juga dalam rangka untuk menangkal jaringan Nippon dan propagandanya yang menyerukan rakyat untuk membantu perang Asia Timur Raya-nya.[65]

Angkatan pertama Kulliyatul Mu'allimin berhasil menghimpun 120 pemuda dari seluruh keresidenan Banyumas dan Kedu. Adapun untuk Kulliyatul Muballighin angkatan pertama 60 pemuda. Kursus reguler ini hanya berlangsung dua kali angkatan, karena Nippon mengintervensi lebih jauh.

Situasi peperangan melawan balatentara Jepang untuk merebut kemerdekaan dan melawan sekutu untuk mempertahankan kemerdekaan, membuat Prof. KH. Saifuddin Zuhri ikut terlibat dalam perjuangan fisik sebagai komandan Laskar Hizbullah. Hidupnya berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Hingga pada suatu Juli 1946, Majelis Konsul NU memutuskan untuk membuka Sekolah Pertama Islam dan Sekolah Menengah Atas Islam. Keputusan tersebut didorong oleh salah satu program NU yang tetap berpendirian bahwa meski revolusi dan perang kemerdekaan masih berkobar, namun bidang

[65] *Berangkat dari Pesantren, Op. Cit.* hlm. 252

pendidikan tidak boleh ditinggalkan.

Prof. KH. Saifuddin Zuhri sendiri telah hijrah ke Purworejo. Kota kecil itu mengalami pertambahan penduduk yang terdiri dari para pegawai badan pekerja KNI Pusat beserta keluarga mereka. Beratus-ratus perjuang beserta keluarga mereka hijrah ke Jawa Tengah, ke Yogyakarta, Solo, Magelang dan juga ke Purworejo. Ia melihat peluang ini positif bahwa di antara mereka banyak yang bisa diminta sebagai tenaga-tenaga pendidik (guru) dan sebagainya. Di samping itu, ia juga melihat banyak anak-anak remaja yang putus sekolah karena mengikuti orang tua mereka hijrah meninggalkan tanah tumpah darah mereka di Jawa Barat.

Di kota mertuanya itu, ia berhasil mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam (SMPI) NU dan Sekolah Menengah Atas Islam (SMAI) NU di Purworejo. Seorang pengusaha tekstil menyerahkan sebuah gedung bekas pabriknya untuk dijadikan SMPI NU. Sedangkan SMAI NU dia tempatkan di ruangan SMA Negeri, yang dilaksanakan pada siang/sore hari. Seorang CPM diangkat menjadi direktur SMAI NU. Sedang guru-gurunya memanfaatkan tenaga tentara pelajar dan lain-lain. Tidak ketinggalan ia juga turut mengajar sebagai guru agama. Pendirian kedua sekolah menengah tersebut dilakukan dalam rangka ikut mengisi bidang pendidikan yang terlantar akibat revolusi.[66]

Awal 1950, Prof. KH. Saifuddin Zuhri pindah ke Semarang untuk membuka Kantor Agama Provinsi Jawa Tengah. Pada 1 Januari 1952, ia kembali mendirikan lembaga pendidikan kader bernama Madrasah Muballighin NU di Semarang. Sejumlah 50 pemuda NU dari beberapa daerah di Jawa dan Sumatra mengikuti pendidikan kader itu untuk masa tiga tahun. Guru-gurunya ia ambil dari tenaga-tenaga pendidik yang berada di lingkungan Kantor Agama Provinsi.

---

[66] *Berangkat dari Pesantren, Ibid.,* hlm. 414-415

Madrasah Muballighin ini adalah hasil konkret keputusan Konferensi Dakwah yang diselenggarakan di kota Magelang ada 29 setember – 1 Oktober 1951. Hal ini merupakan kebanggaan tersendiri, karena berdirinya media pendidikan kader NU ini hanya disiapkan dalam tempo 3 bulan di tengah suasana membangun NU kembali pascaperang kemerdakaan dan revolusi bersenjata antara 1945-1950.[67]

Pemerintah Belanda dan Jepang tahu betul kedudukan ulama. Oleh karena itu kedua penguasa itu menjadikan ulama sebagai alat untuk mempertahankan serta memperkokoh kedudukan mereka. Bahkan pemerintah Jepang memasukkan ulama sebagai alat strategis mencapai kemenangan dalam perang Asia Timur Raya mereka melawan sekutu. Para ulama menjadi senjata perang di samping beras, besi tua, minyak, dan amunisi. Pengkaderan ulama diperlukan untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Dalam kaitan ini Prof. KH. Saifuddin Zuhri menuturkan:

> Kalau orang asing tahu benar harga para ulama meskipun disalahgunakan, amat disesalkan bahwa bangsa sendiri, terutama golongan yang menamakan "pemimpin Islam" tidak menyadari kedudukan ulama dalam masyarakat kecuali untuk diperalat dan dijadikan semacam kuda kepang. Ulama dijadikan pijakan untuk mencapai kedudukan politik, popularitas, dan mencari pengaruh. Dan dalam hal ini, NU telah banyak 'meminjamkan' para ulamanya untuk diperlakukan menjadi alat.[68]

Semangat inilah yang tampaknya ingin diperjuangkan oleh Prof. KH. Saifuddin Zuhri melalui pendidikan kader-kader NU. Ia ingin menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tingkat kecerdasannya merata di seluruh penjuru nusantara, memiliki wawasan kebangsaan dan cinta tanah air Indonesia.

Gambaran nasionalisme pesantren diungkapkannya dengan

---

[67] *Berangkat dari Pesantren, Ibid.,* hlm. 495

[68] *Berangkat dari Pesantren, Ibid.*, hlm. 499

menjadikan agama sebagai unsur mutlak dalam *nation building*. Kaum santri tidak mungkin selamanya menjadi santri sampai mati. Santri suatu saat harus mengorbankan kesantrian atau "ke-kami-an" mereka untuk kepentingan "ke-kita-an" mereka sebagai sesama anak bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ahmad Baso menjelaskan, ungkapan "Kesantrian/kami" adalah istilah primordial yang eksklusif, tapi suatu saat akan berproses secara liminal menjadi identitas baru yaitu, "Kebangsaan/kita". Dari "kami" menjadi "kita", dari "Kesantrian" bermetamorfosa menjadi "Kebangsaan". Karena itu santri kalau tidak memikirkan bangsa maka tidak dapat disebut santri. Pendidikan yang dikembangkan Prof. KH. Saifuddin Zuhri membangun wawasan kebangsaan di kalangan santri berperan sangat penting dalam proses transformasi kebangsaan yang sangat diperlukan untuk membangun Indonesia yang maju dan berkarakter.[69]

Terma "santri" dan "ulama" erat kaitannya dengan pendidikan. Keduanya merupakan rukun dalam dunia pendidikan, yakni murid dan guru. Santri adalah proses penguatan emosi dan intelektual. Sedangkan ulama merupakan proses pengembangan dan pengejawantahan emosi dan intelektual dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia. Komitmen kebangsaan yang ditunjukkan oleh Prof. KH. Saifuddin Zuhri melalui pendidikan, khususnya dunia pesantren sebagai basisnya, hampir tidak dapat dipisahkan dalam kehidupannya. Komitmen ini tentu sangat erat kaitannya dengan komitmen keagamaannya yang kuat terkait seruan ajaran agama yang mewajibkan umat manusia meninggikan harkat dan martabatnya melalui ilmu pengetahuan dan pendidikan.

Upaya Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk meningkatkan pen-

---

[69] Kesaksian Ahmad Baso disampaikan dalam Seminar "Perjuangan dan Pengabdian Prof. KH. Saifuddin Zuhri" yang diselenggarakan PBNU, 2 Juli 2013.

didikan tidak berhenti dengan mendirikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menegah Atas Islam, atau mendirikan madrasah Kulliyatul Muballigin dan Kulliyatul Mu'allimin. Pada akhir tahun 1962, saat menjabat Menteri Agama ia membentuk Lembaga Penerjemahan Al-Qur'an, yang diketuai oleh Prof. Sunaryo dengan anggota-anggota yang terdiri dari para ahli. Tujuan dari penerjemahan ini adalah untuk menghasilkan karya terjemahan Al-Qur'an yang baik, dapat dibaca dan dimengerti oleh segenap lapisan masyarakat. Tahun 1963-1965 lembaga ini berhasil menyelesaikan penerjemahan sebanyak 30 juz. Ia juga mengusahakan pengimporan buku-buku agama yang dibutuhkan oleh pesantren dengan cara kerjasama untuk memperoleh devisa dalam jumlah terbatas dan dibagikan kepada sejumlah toko buku. Alhasil antara 1963-1965 buku-buku impor dari Kairo dan Beirut mengalir ke pasaran. Selanjutnya tahun 1964 merintis berdirinya Yayasan Pembangunan Islam (YPI), yang bertujuan untuk mengerahkan kemampuan umat Islam dalam bidang penerbitan Al-Qur'an dan kitab-kitab lain yang dibutuhkan pesantren dan madrasah.[70]

Pengembangan wawasan kebangsaan dengan melibatkan agama sebagai unsur mutlaknya dilaksanakan oleh Prof KH. Saifuddin Zuhri dengan mengembangkan pendidikan Islam tingkat perguruan tinggi. Jika Menteri Agama KH. A. Wahid Hasyim mendirikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Yogyakarta, Menteri Agama KH. M. Iljas mendirikan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Ciputat, Menteri Agama KH. Wahib Wahab berhasil memantapkan status pendidikan agama Islam tingkat universitas dengan menggabungkan PTAIN dan ADIA menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang berkudududukan

[70] Muhaimin Abdul Ghofur, "KH. Saifuddin Zuhri" dalam Dr. Azyumardi Azra dan Saiful Umam (ed.), "Menteri-Menteri Agama RI, Biograif Sosial Politik" hlm. 222-223.

di Yogyakarta dan Ciputat, maka Prof KH. Saifuddin Zuhri tak mau kalah dengan para pendahulunya. Ia menuturkan,

> ... aku melihat bahwa IAIN mempunyai kedudukan strategis dalam rangka mewujudkan tesis Agama (sebagai) Unsur Mutlak dalam Nation Building...
>
> Tak bisa dibantah, IAIN merupakan pusat kegiatan pengajaran dan pendidikan tingkat tinggi bagi pemuda-pemuda Islam, sekaligus menjadi persemaian kader-kader masa kini dan mendatang. Hal ini bisa menjadi jalan pintas buat mengejar ketertinggalan umat Islam di bidang pendidikan dan pengajaran tingkat tinggi selama bertahun-tahun. [71]

Oleh karena itu, Prof. KH. Saifuddin Zuhri bertekad untuk meratakan pembentukan IAIN di setiap provinsi, dan menjadikannya terdiri dari 4 fakultas: Syariah, Ushuluddin, Tarbiyah, dan Adab dalam satu unit yang berdiri secara otonom dalam kesatuan IAIN. Di masing-masing provinsi berdiri satu unit IAIN dan fakultas-fakultasnya tersebar di kota-kota Kabupaten dalam wilayah provinsi tersebut. Meski demikian, ia menyiapkan antisipasi agar IAIN tidak menjadi saingan pondok pesantren. Karena kedua lembaga tersebut sama-sama menjadi tempat persemaian dan pendidikan generasi muda Islam, namun mempunyai peran yang berbeda, tetapi bisa saling mengisi.

Untuk merealisasikan tekadnya, meski anggarannya sangat terbatas, Prof. KH. Saifuddin Zuhri menempuh kebijakan bahwa tiap daerah yang menghendaki berdirinya IAIN haruslah membentuk sebuah "Badan Wakaf" untuk mengusahakan tanah, gedung, dan modal usahanya. Dengan demikian, tiap IAIN menjadi milik masyarakat bersama pemerintah. Kebijakan tersebut disambut antusias masyarakat. Selama satu periode Prof. KH. Saifuddin Zuhri berhasil meresmikan 9 (sembilan) IAIN di tingkat provinsi dengan nama sesuai dengan tokoh-tokoh di daerah itu

[71] *Berangkat dari Pesantren, Op. Cit.,* hlm. 642

dan 14 cabang IAIN di tingkat Kabupaten/Kota.[72]

Kebijakan membangun IAIN dengan melibatkan partisipasi masyarakat merupakan kebijakan brilian yang di kemudian hari menginspirasi banyak pemimpin bangsa mengenai pentingnya partisipasi rakyat dalam membangun kemandirian. Kebijakan pemberdayaan masyarakat ini dirasakan sangat efektif dari pada pemerintah langsung memberikan bantuan langsung dalam bentuk jadi. Pemberian bantuan atau pembangunan terbukti membuat masyarakat tidak merasa memiliki sehingga enggan untuk merawat dan menjaga keberlangsungan bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah tersebut.

Pada suatu hari di bulan Oktober 1964, Prof. KH. Saifuddin Zuhri didatangi delegasi dari Yogyakarta untuk menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-45, sekaligus menyampaikan keputusan Senat Mahaguru IAIN Sunan Kalijaga yang hendak menganugerahkan Guru Besar Luar Biasa di bidang dakwah. Mendapat kabar itu, Prof. KH. Saifuddin Zuhri benar-benar *surprise* dan gugup. Jabatan yang dianugerahkan itu merupakan jabatan ilmiah paling tinggi, padahal dirinya merasa belum memiliki ilmu yang memadai. Akhirnya ia tidak bisa mengelak keputusan IAIN Sunan Kalijaga, karena alasan-alasan akademis, ilmiah, perjuangan, dan organisatoris universiter yang dikemukakan oleh para anggota delegasi itu.[73]

Pada tanggal 2 November 1964, Prof. KH. Saifuddin Zuhri dikukuhkan sebagai guru besar bidang dakwah dengan gelar "profesor". Ia diwisuda di hadapan para ulama, pejabat, guru-guru besar berbagai universitas, kaum cendikiawan, mahasiswa, serta para tokoh politik dan wartawan. Dalam kaitan ini Prof. KH. Saifuddin Zuhri berkisah:

---

[72] *Berangkat dari Pesantren, Ibid.*, hlm. 644

[73] *Berangkat dari Pesantren, Ibid.,* hlm. 652

> Bagiku, peristiwa pelantikan menjadi guru besar luar biasa itu amat baru. Aku yang benar-benar buta atas segala tradisi universiter apalagi yang berhubungan erat dengan tradisi keilmuannya. Aku baru mengenalnya setelah menjadi menteri. Itu pun secara sepintas dan dari "luar pagar", bukan terjun di tengah-tengah disiplin keilmuannya. Misalnya, bagaimana bentuk pidato pelantikanku menurut tradisi akademis. Meskipun secara teori aku telah diberi tahu, tetapi hanya sekilas, itu pun hanya garis-garis besarnya.[74]

Pada 10 Oktober 1963, terjadi unjuk rasa di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada saat melangsungkan Sidang Senat Terbuka pelantikan Rektor Baru. Namun tiba-tiba sekelompok mahasiswa menyerbu ke mimbar sambil berteriak-teriak dengan nada anti-pimpinan IAIN Sunan Kalijaga serta golongannya. Mereka merebut paksa mikrofon yang sedang digunakan oleh Rektor dalam pidato. Seminggu kemudian, 17 Oktober 1963, di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga terjadi aksi corat-coret di dinding kampus yang menyatakan solidaritas terhadap peristiwa di Yogyakarta dan mengandung nada anti Menteri Agama dan anti-NU.[75]

Menyikapi peristiwa tersebut Prof. KH. Saifuddin Zuhri segera datang ke Yogyakarta untuk melihat dan mendengar dari tangan pertama. Ia mengadakan pertemuan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII. Ia juga meminta kepada aparat keamanan untuk tidak mengambil tindakan. Begitu juga kepada Kapolri Jenderal R. Sukarno diminta agar melepaskan para pelaku yang terlibat. Namun Kapolri tidak dapat memenuhi keinginan Prof. KH. Saifuddin Zuhri karena mereka sudah masuk dalam tindak pidana, merongrong kewibawaan lembaga resmi milik negara serta mengganggu ketertiban. Meski

---

[74] *Berangkat dari Pesantren, Ibid.*, hlm. 652

[75] Sulastomo, *Hari-hari yang Panjang Transisi Orde Lama ke Orde Baru: Sebuah Memoar,* (Jakarta: Kompas, 2000), hlm. 28-29, lihat juga *Berangkat dari Pesantren, Op. Cit.*, hlm. 665.

demikian, ia tetap meminta perhatian Kapolri terhadap beban moral dan politik yang mungkin akan mengganggu ketenangan tugasnya sebagai Menteri Agama.

Setelah beberapa bulan, mereka yang dibebaskan dari tahanan mendatangi Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk minta maaf dan menyerahkan nasibnya kepada kebijaksanaan Menteri Agama. Mereka tidak ingin kembali ke tempat tugas semula. Setelah musyawarah dengan mereka, akhirnya di antara mereka ada yang memilih dimutasi ke daerah lain, dan ada yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri, dengan syarat tidak boleh merasa disingkirkan oleh Menteri Agama. Di kemudian hari, di antara mereka ada yang naik pangkat sebagai dosen ataupun dekan, dan yang melanjutkan ke luar negeri ada yang berhasil memperoleh berbagai gelar.[76]

Menurut Sulastomo, yang menarik dari peristiwa tersebut ternyata otak dan pelaku aksi adalah kader-kader HMI, sehingga menjadi perenungan pertama bagi PB HMI yang dipimpinnya. Adapun motif dari aksi ini adalah anggapan ketidakadilan dan kebijaksanaan pimpinan IAIN dan Departemen Agama yang dinilai tidak baik. Bahkan alamat utama dari kedua aksi tersebut adalah NU, sebab NU dianggap memainkan peran utama sebagai representasi agama dalam ide Nasakom.[77]

Kebijakan yang diambil PB HMI bahwa hampir seluruh pengurus PB HMI tidak bisa menerima tindakan yang dilakukan kadernya. Oleh karena itu Sulastomo selaku Ketua PB HMI membekukan kepengurusan HMI Cabang Yogyakarta dan Ciputat.

> Saya tulis di buku saya bahwa, mohon maaf, di internal HMI itu macam-macam. Ada yang tidak senang dengan Pak Saifuddin Zuhri, ada yang biasa-biasa saja, dan ada yang menjadi sahabatnya. Ada

---

[76] *Berangkat dari Pesantren, Op. Ci*t., hlm. 666.

[77] Sulastomo, *Op.Cit.,* hlm. 30

> kelompok yang tidak senang, yaitu teman-teman HMI Yogyakarta dan Ciputat. Dua cabang ini saya atas nama Ketua PB HMI dibekukan karena memang tidak pantas.[78]

Sejak tahun 1963, Prof. KH. Saifuddin Zuhri selaku Menteri Agama telah mengirim beberapa pemuda/mahasiswa untuk belajar ke Kairo, terutama Universitas Al-Azhar atas beasiswa dari Alam Islam Kairo. Rata-rata 20 orang yang dipilih dari berbagai golongan dalam masyarakat. Kategori anak yang dikirim adalah didikan pesantren/madrasah dan tamatan SMA. Untuk kategori SMA disiapkan untuk memasuki jurusan umum seperti kedokteran, ekonomi, pertanian, teknik, dan sebagainya yang ada dalam lingkungan Al-Azhar. Di antara mereka yang ia kirim terdapat nama Abdurrahman Wahid, dokter Fatimah Alkaf, KH. Muhibuddin Wali, Suryani Thahir, Zakiyah Darajat, Laili Mansur dan lain-lain.[79]

Profesionalisme Prof. KH. Saifuddin Zuhri sebagai pendidik diperoleh dari pengamatan yang tajam terhadap guru-guru yang pernah mengajarnya, baik di SD dan di madrasah, baik Sukaraja maupun di Solo, serta improvisasi yang ia kembangkan dari pengalamannya sendiri. Ia juga memiliki kegemaran membaca buku dan mempelajari buku-buku ilmu mendidik dan pendidikan. Ia memang sangat terkesan ketika mempelajari kitab *Ta'lim Muta'allim* dengan Kiai Ahmad Syatibi. Ia merasa semangat belajar menjadi berkobar-kobar ketika mempelajari kitab kuning yang satu ini. Ia menganggap perlunya guru mengarahkan pembagian waktu yang proporsional bagi anak usia sekolah untuk bermain, membantu orang tua, belajar, dan istirahat agar pembentukan

---

[78] Kesaksian Sulastomo disampaikan dalam Seminar "Perjuangan dan Pengabdian Prof. KH. Saifuddin Zuhri" yang diselenggarakan PBNU, 2 Juli 2013.

[79] *Berangkat dari Pesantren, Op. Cit.,* hlm. 666.

jiwa dan potensi dirinya berkembang dengan baik dan wajar.[80]

Meski Prof. KH. Saifuddin Zuhri telah menjalani kehidupan panjang sebagai guru, ia merasa tidak mudah mendidik anak-anak sendiri secara langsung. Walau sekadar 30 menit mengajari anak-anaknya, baginya terasa berat. Karena hal itu membutuhkan disiplin pribadi.

> Kalau orangtuanya sendiri malas mendidik anaknya itu berarti si orangtua sudah memberi contoh yang tidak baik. Mereka kelak akan lebih tidak memperhatikan anak-anak mereka.
>
> Mendidik sendiri anak-anak secara langsung, bertatap muka, mem–punyai nilai pedagogis yang amat dalam. Menjalin hubungan akrab di antara orangtua dan anak, mematri suasana saling mencintai dan kasih sayang.[81]

Kecintaan pada pendidikan Islam berwawasan kebangsaan dilaksanakan tidak hanya melalui kiprahnya dalam dunia pendidikan sejak tingkat dasar di kampung halaman, tingkat menengah, sampai perguruan tinggi, tetapi juga ditunjukkan melalui komitem pribadinya yang tinggi terhadap dunia pendidikan pesantren. Di antaranya tanah-tanah pemberian masyarakat kepada Prof. KH. Saifuddin Zuhri sebagai Panglima Hizbullah yang dianggap telah menyelamatkan keluarga mereka di zaman revolusi kemerdekaan Republik Indonesia, diserahkan kembali kepada kiai lokal untuk dikembangkan sebagai pusat pendidikan pesantren atau lembaga pendidikan Islam.

Menurut Prof. KH. Saifuddin Zuhri pesantren merupakan lembaga di mana para pelajar dididik secara holistik, baik secara intelektual maupun secara mental. Lebih dari itu, pesantren merupakan basis dan pondasi untuk memupuk nasionalisme, terutama di kalangan umat Islam. Pesantren merupakan "kawah

---

[80] Muhaimin Abdul Ghofur dalam Dr. Azyurmardi Azra, *Op. Cit.,* hlm. 210

[81] *Berangkat dari Pesantren, Op. Cit.*, hlm. 667.

candradimuka" yang paling ampuh untuk mengenalkan persaudaraan antar sesama bangsa yang dalam ajaran Nahdlatul Ulama sering disebut dengan *ukhuwah wathaniyah.*

Pendidikan bagi Prof. KH. Saifuddin Zuhri ibarat investasi bagi masa depan bangsa dan negara. Dengan memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak bangsa sama dengan menyiapkan infrastruktur bangsa dan negara yang akan lebih baik lagi di masa depan. Makin banyak investasi yang ditanamkan, diharapkan makin cerah masa depan bangsa dan negara. Karena dengan makin banyaknya kaum terpelajar, dengan karakter yang baik, partisipasi anak bangsa dalam percepatan pembangunan dan perbaikan atas berbagai kelemahan dapat meningkat lebih cepat dan lebih berkualitas. Dalam kaitan itu dapatlah disimpulkan bahwa peranan Prof. KH. Saifuddin Zuhri di bidang pendidikan yang berwawasan kebangsaan dengan menjadikan agama dan kultur budaya bangsa sebagai unsur mutlak yang tak dapat diabaikan, telah dapat dirasakan manfaatnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan andil signifikan bagi kemajuan bangsa dan negara.

F. Mengangkat Martabat Perempuan

Jauh-jauh hari sebelum istilah pemberdayaan perempuan menjadi isu nasional Prof. KH. Saifuddin Zuhri sudah mempunyai semangat dan kepedulian yang tinggi untuk memajukan kaum perempuan. Kaum perempuan harus mempunyai kesempatan yang sama untuk turut serta memajukan bangsa dan negara sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Menurut Hj. Aisyah Hamid Baidlawi, Ketua Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia (IKPNI) yang juga mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU, sebelum kata-kata pemberdayaan perempuan marak, Prof. KH. Saifuddin Zuhri telah memulai terlebih dahulu, salah satunya dengan menghibahkan

rumahnya di Jl. Hang Tuah untuk Muslimat NU yang kemudian digunakan sebagai Rumah Sakit Bersalin. Padahal waktu itu beliau adalah Sekretaris Jenderal PBNU, namun beliau justru lebih memperhatikan Muslimat NU. Jika tidak mempunyai kepedulian pada pemberdayaan perempuan, sudah pasti akan dihibahkan pada NU atau pada Ansor atau organisasi lain di bawah NU[82].

Hj. Asmah Syahruni, mantan Ketua Pimpinan Pusat Muslimat NU, mengatakan bahwa Prof. KH. Saifuddin Zuhri sangat memperhatikan kaum perempuan NU. Sebagai Sekjen PBNU, beliau selalu menghadiri acara-acara Muslimat NU, ikut menggembleng laskar-laskar perempuan Muslimat NU. Hal ini sangat menggembirakan karena Muslimat NU membutuhkan figur yang gagah berani untuk mengimbangi aktivitas kaum perempuan yang berafiliasi pada PKI. Prof. KH. Saifuddin Zuhri sebagai Sekretaris Jenderal PBNU, betul-betul menjadi pengayom dan motivator bagi Muslimat NU untuk menghadapi segala macam tantangan dengan gagah berani. Hal inilah yang membuat PP Muslimat selalu bersemangat untuk turut serta dalam perjuangan melawan komunisme.[83]

Dalam sebuah tulisan, Prof. KH. Saifuddin Zuhri memuji keberanian R.A. Kartini agar kaum perempuan mempunyai kesempatan yang besar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang bisa digunakannya guna mengabdi kepada bangsa dan negara. Cita-cita Kartini harus terus diperjuangkan perwujudannya oleh kaum perempuan di masa kini dan di masa yang akan datang.[84]

---

[82] Kesaksian Hj. Aisyah Hamid Baidlawi disampaikan dalam Seminar "Perjuangan dan Pengabdian Prof. KH. Saifuddin Zuhri" yang diselenggarakan oleh PBNU, Selasa, 2 Juli 2013.

[83] Kesaksian Hj. Asmah disampaikan dalam Seminar "Perjuangan dan Pengabdian Prof. KH. Saifuddin Zuhri" yang diselenggarakan oleh PBNU, Selasa, 2 Juli 2013.

[84] Saifuddin Zuhri, "Tampilkan Kartini yang Pancasilais" dalam buku

Prof. KH. Saifuddin Zuhri memberikan kebebasan kepada istrinya, Hj. Sholihah, untuk melakukan kegiatan sosial sebagai Ketua II Pengurus Pusat Muslimat NU dan sebagai Ketua Pengurus Rumah Bersalin "Muslimat". Bahkan, di zaman revolusi, di mana Prof. KH. Saifuddin Zuhri harus memimpin perang gerilya sebagai Komandan Hizbullah, beliau memberikan kesempatan kepada sang istri untuk berwiraswasta panganan dan kue berbahan singkong di pasar-pasar yang berjarak sampai 3 kilometer dari pengungsian. Ia juga memberikan kesempatan luas kepada putri-putrinya untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin atau untuk berwiraswasta[85].

Secara pribadi, Saifuddin Zuhri mempunyai empati yang mendalam terhadap penderitaan kaum perempuan. Ketika ibunya sakit TBC, Prof. KH. Saifuddin Zuhri, mempunyai tugas mengantar ibunda ke poliklinik di Kawedanan Sukaraja dan selalu menyisihkan sebagian honornya dan rezekinya untuk membantu pengobatan Ibunda yang kemudian meninggal dunia pada usia 40 tahun setelah merampungkan shalat maghrib pada Muharram di tahun 1940. Adik-adik perempuan Prof. KH. Saifuddin Zuhri yakni Kusbandiyah dan Sopiah juga meninggal ketika berusia 3 ½ dan 1 ½ tahun.[86] Istri Prof. KH. Saifuddin Zuhri juga pernah mempunyai anak yang meninggal di saat baru melahirkan.[87]

Menurut Prof. KH. Saifuddin Zuhri, kaum perempuan setidak-tidaknya punya empat fungsi, yaitu sebagai pemudi, sebagai isteri, sebagai ibu, dan sebagai anggota masyarakat. Seorang perempuan harus mampu menjaga kehormatannya dan melakukan emansipasi dalam pengertian kemerdekaan menuntut ilmu dan pengetahuan untuk mempersiapkan peranannya yang

---

Secercah Dakwah (Jakarta: PT. Alma'arif: 1983), hlm. 51

[85] *Berangkat dari Pesantren, Op. Cit.*, hlm. 475-476 dan hlm. vii-x

[86] *Berangkat dari Pesantren, Ibid.*, hlm. 192-194

[87] *Berangkat dari Pesantren, Ibid.,* hlm. 475-476

utama di masa datang, baik sebagai isteri, ibu, dan anggota masyarakat yang berjasa (perempuan karier). Kaum perempuan harus mempelajari ilmu pengetahuan umum setinggi mungkin sebagai bekal hidup yang bermartabat, terutama bilamana datang waktunya menjadi isteri, ibu, dan anggota masyarakat, tanpa ketinggalan zaman.

Sebagai seorang istri, seorang perempuan harus dapat dipercaya, baik dalam soal kesetiaan maupun dalam soal keuangan rumah tangga, mampu menjadi pasangan senasib dan sependeritaan, serta menjadi satu jiwa dengan suami dalam balutan kejujuran dan saling harga menghargai. Sebagai seorang ibu, seorang perempuan harus mampu menjadi seorang pendidik sejak bayinya mengeluarkan jeritan/tangisan yang pertama. Sebagai seorang pendidik, tutur kata dan akhlak seorang ibu akan berpengaruh kuat terhadap anak-anaknya, sehingga membentuk kepribadian anak-anak. Sebagai anggota masyarakat atau organisasi masyarakat atau organisasi politik, seorang perempuan harus mampu memperjuangkan nasib kaum perempuan sendiri agar lebih berdaya dan mandiri, serta memperjuangkan kesejahteraan seluruh rakyat tanpa terkecuali sebagaimana mereka memperjuangkan nasib anak-anak sendiri.[88]

G. Menegakkan Hidup Bersih Tanpa Korupsi

Hingar bingar pemberantasan korupsi yang marak belakangan ini merupakan puncak dari akumulasi keinginan masyarakat untuk melihat seorang pemimpin yang bersih dan sederhana. Kalau melihat ke belakang, sosok pemimpin yang bersih dan sederhana dapat ditemukan dalam diri Prof. KH. Saifuddin Zuhri.

Selama menjabat sebagai Menteri Agama, Prof. KH. Saifuddin Zuhri dikenal sebagai pimpinan yang bersih, peduli,

[88] *Agama Unsur Mutlak dalam Nation Building, Op. Cit.*, hlm. 5-9.

dan anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Alkisah, Mohammad Zainuddin Dahlan, tokoh masyarakat di daerah Purworejo, Jawa Tengah, sudah sejak lama memendam keinginan untuk menunaikan ibadah haji. Sebagai seorang tokoh masyarakat, kyai yang suka membantu orang lain dan pejuang kemerdekaan, wajar jika Mohammad Zainuddin Dahlan mendapatkan fasilitas haji *abidin* atau haji atas biaya dinas. Satu hal lagi, selama masa perang revolusi fisik, Mohammad Zainuddin Dahlan adalah prajurit Laskar Hizbullah yang bertugas menjaga keluarga besar Prof. KH. Saifuddin Zuhri dalam pengungsian. Maklum, Prof. KH. Saifuddin Zuhri sendiri harus memimpin gerilya sehingga tidak mungkin memantau keluarganya secara penuh.

Suatu hari, untuk suatu keperluan datanglah Mohammad Zainuddin Dahlan menemui Menteri Agama Prof. KH. Saifuddin Zuhri. Mereka juga terikat dalam hubungan keluarga dekat, karena Mohammad Zainuddin tidak lain adalah adik ipar dari Prof. KH. Saifuddin Zuhri. Dalam kesempatan itu, dengan suara halus, Mohammad Zainuddin mengutarakan keinginannya untuk menunaikan ibadah haji. Prof. KH. Saifuddin Zuhri mendengar permintaan yang tulus itu dengan penuh perasaan, lalu memberikan jawaban tegas:

> Sebagai orang sudah banyak jasa, dan mengingat kondisi perekonomi–anmu yang belum memungkinkan, sudah layak jika Departemen Agama menghajikanmu. Apalagi kamu juga pernah berjuang dalam perang kemerdekaan. Tapi, ada satu hal yang menyebabkan saya tidak mungkin membantumu pergi haji melalui Departemen Agama." "Satu hal apa itu?" Tanya Mohammad Zainuddin Dahlan. "Kamu adalah adikku. Coba kamu itu orang lain, sudah lama aku hajikan..." ujar Saifuddin Zuhri mantap.[89]

[89] Saifullah Ma'shum (editor), *Menapak Jejak, Mengenal Watak, Kehidupan Ringkas 29 Tokoh NU*, (Jakarta: Yayasan Saifuddin Zuhri, 2012), hlm. 410.

Sudah pasti Mohammad Zainuddin Dahlan kecewa, namun kekecewaan itu terhapus dengan siraman kemuliaan prinsip, ketauladanan pemimpin penuh hikmah, dan semangat gerakan anti korupsi. Mohammad Zainuddin Dahlan pulang ke rumah dengan penuh kebanggaan, betapa kakak iparnya menjabat sebagai Menteri Agama dengan penuh amanah dan tanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kesaksian serupa diungkapkan oleh Hj. Farida Salahuddin Wahid (anak kedua dari Prof. KH. Saifuddin Zuhri). Hj. Farida menjelaskan bahwa selama ayahandanya menjabat sebagai Menteri Agama, anak-anaknya tidak ada yang naik haji. Bahkan, naik pesawat pun, anak-anak tidak pernah. "Beliau hanya mengatakan bahwa kamu semua (anak-anak, red), pada saatnya nanti dengan rezeki sendiri akan naik haji dengan biaya sendiri, bukan dengan biaya dari negara," demikian ungkap Hj. Farida mengingat pesan dari orang tuanya.[90]

Setelah selesai menjabat Menteri, Prof. KH. Saifuddin Zuhri hanya memiliki dua rumah, salah satunya di Jl. Hang Tuah, Kebayoran, Jakarta. Namun, Prof. KH. Saifuddin Zuhri justru menghibahkan rumah di Jl. Hang Tuah itu untuk rumah sakit bersalin di bawah PP. Muslimat NU. Kini rumah sakit itu sudah berkembang karena sudah melayani juga cuci darah.[91]

Begitulah Prof. KH. Saifuddin Zuhri. Selain amanah dia juga terus hidup sederhana dan menjunjung tinggi kejujuran. Baik sebelum, semasa, dan seusai menjabat sebagai menteri. Faktanya, tak pernah Saifuddin hidup bergelimang kemewahan hingga akhir hayatnya. Bahkan saking sederhananya, sampai-sampai dia rela melakukan pekerjaan halal apapun, seperti menjadi pedagang

---

[90] Kesaksian Hj. Farida Salahuddin Wahid disampaikan dalam Seminar "Perjuangan dan Pengabdian Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk Bangsa dan Negara" yang diselenggarakan PBNU, 2 Juli 2013.

[91] *Ibid.*

beras, demi menghidupi keluarga.

Hal itu bisa dilihat pada akhir 1980-an, jauh ketika sang kiai tak lagi menjabat sebagai menteri. Ketika itu, putra-putrinya merasa heran dengan kebiasaan Saifuddin. Setiap habis Shalat Dhuha, sekitar pukul 09.00, dia keluar rumah mengendarai mobilnya sendiri. Ke mana gerangan? Dan untuk urusan apa? Kegiatan ini berjalan cukup lama tanpa satupun anggota keluarganya mengetahui. Sampai suatu hari, salah seorang putranya berhasil memergoki apa yang dikerjakan sang ayah di luar rumah. Bukan kepalang kagetnya, ketika sang putra mengetahui yang dikerjakan oleh ayahnya selama ini.

Rupanya, Prof. KH. Saifuddin Zuhri pergi ke pusat perdagangan Glodok. Tanpa harus merasa jatuh gengsi, dia berdagang beras kecil-kecilan demi menambah keuangan keluarga. Berdagang kecil-kecilan, baginya jauh lebih mulia ketimbang harus mendapatkan harta secara tidak halal dan memanfaatkan jabatan[92].

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lembaga yang sangat ditakuti oleh para koruptor menjadikan Prof. KH. Saifuddin Zuhri sebagai salah satu tokoh panutan dalam pemberantasan korupsi. Untuk itu, KPK memuat profil Prof. KH. Saifuddin Zuhri sebagai salah satu teladan bangsa dalam situsnya http://acch.kpk.go.id/kh-saifuddin-zuhri, bersama tokoh-tokoh yang terkenal bersih lainnya seperti Hoegeng Imam Santoso (Jenderal Polisi), M. Natsir (tokoh Masyumi), Wahid Hasyim (tokoh NU), dan Ali Sadikin (mantan Gubernur DKI Jakarta).[93]

H. Menulis Bergaya Khas Pesantren

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, berpendapat bahwa Prof. KH. Saifuddin Zuhri me-

---

[92] Saifullah Ma'shum (editor), *Op.Cit.,* hlm. 424.

[93] Lihat situs KPK dengan laman: http://acch.kpk.go.id

rupakan pelopor gaya penulisan yang sekarang disebut dengan genre baru seperti yang dilakukan oleh Andrea Hirata. Jadi, sebelum gaya penulisan yang mengulas kisah nyata yang penuh dengan *human interest* dianggap sebagai *trend,* Prof. KH. Saifuddin Zuhri telah memulai terlebih dahulu di tahun 1970-an dan 1980-an, setidak-tidaknya melalui *Guruku Orang-orang dari Pesantren* (diterbitkan pertama kali oleh PT Alma'arif, Bandung, 1974, lalu diterbitkan ulang oleh LKIS pada 2001) dan *Berangkat dari Pesantren* (diterbitkan pertama kali oleh PT. Gunung Agung, Jakarta, pada 1987, lalu diterbitkan kembali oleh LKIS pada 2013).[94]

Genre penulisan khas pesantren setidak-setidaknya mengisahkan solusi yang jenaka dan lucu terhadap persoalan yang rumit, pelik, dan komplikatif. Genre penulisan seperti ini kemudian menjadi panutan "murid-murid" Prof. KH. Saifuddin Zuhri, seperi Mahbub Djunaidi, KH. Abddurrahman Wahid, Emha Ainun Nadjib, dan seterusnya. Belakangan ini, gaya penulisan seperti itu dianggap menjadi *trend* baru, yang dimulai dengan *Laskar Pelangi* oleh Andrea Hirata, *Anak Singkong* yang mengisahkan perjuangan Chairul Tandjung, *Sepatu Dahlan* yang mengisahkan kehidupan Dahlan Iskan. Berikut beberapa cuplikan tulisan Prof. KH. Saifuddin Zuhri yang mengisahkan solusi cerdas terhadap persoalan yang sangat serius.

1. Soekarno Repot Karena Pernikahan

Di saat penting, Soekarno memang selalu direpotkan dengan urusan pernikahan. Dalam sebuah Konperensi Tingkat Tinggi Non-Blok di Beograd (dulu Yugoslavia), ada dua mahasiswa asal Indonesia Tirmizi Rangkuti dan Anis yang meminta izin menikah

---

[94] Kesaksian Prof. Dr. Moh. Mahfud MD disampaikan dalam Seminar "Perjuangan dan Pengabdian Prof. KH. Saifuddin Zuhri" yang diselenggarakan oleh PBNU, Selasa, 2 Juli 2013

kepada Presiden Soekarno. Sebelumnya, mereka sudah meminta izin kepada Kedutaan Besar Republik, namun ditolak karena ada larangan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak membolehkan mahasiswa yang sedang belajar di luar negeri dengan bea siswa untuk melangsungkan pernikahan. Padahal keduanya sudah kasmaran dan masing-masing dari kedua orang tua mereka sudah setuju.

Presiden Soekarno segera memanggil Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Chairul Saleh, Letjen Gatot Soebroto, dan Prof. KH. Saifuddin Zuhri di kamar hotel. Setelah menceritakan kembali persoalan dua mahasiswa, Soekarno bertanya: "Bagaimana pendapat kalian?" Para pejabat negara saling berpandangan seraya menahan geli, karena Presiden, Jenderal, dan Menteri harus menyelesaikan persoalan cinta dua anak manusia.

Beberapa di antara mereka segera menunjuk Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk mengungkapkan ide briliannya, mungkin karena dari segi agama, politik, dan intelektual, beliau paling layak menyelesaikan persoalan seperti ini. "Nikahkan saja mereka!" Kata Prof. KH. Saifuddin Zuhri. "Alasannya?" Tanya Chairul Saleh. "Mereka saling mencintai dan bertekad untuk menikah sampai berani menempuh perjalanan begitu jauh Praha-Beograd. Lagi pula kedua orang tua mereka menyetujui," jawab Prof. KH. Saifuddin Zuhri.

"Tapi bagaimana larangan Menteri PDK itu?" Tanya Letnan Jenderal Gatot Soebroto. "Menurut interpretasiku, larangan itu jika dilangsungkan pernikahan dengan gadis atau pemuda asing. Kalau sama-sama anak Indonesia mengapa dilarang?" Prof. KH. Saifuddin Zuhri menjawab dengan pertanyaan.

"Lha, sekarang kalau misalnya dilarang, sekali lagi misalnya, apa akibatnya?" Presiden Soekarno bertanya sambil melirik kedua pemuda itu. "Yaaa, bisa kita perkirakan, bermacam-macam bisa terjadi...", jawab Prof. KH. Saifuddin Zuhri seraya mengundang

gelak riuh.

"Penghulunya siapa?" Chairul Saleh bertanya. "Presiden!" jawab Prof. KH. Saifuddin Zuhri seraya menjelaskan pandangan hukum Islam bahwa seorang perempuan yang tidak mempunyai wali nasab (orang tua Anis sudah meninggal), atau jauh dari walinya, maka yang berhak menjadi wali sekaligus menikahkan adalah Presiden atau Raja. Kalau terjadi di desa, tanggung jawab itu berada di kepala desa/ketua adat.

"Kalau saya menyerahkan tugas wali dan menikahkan sekaligus kepada saudara bagaimana?" Tanya Presiden kepada Prof. KH. Saifuddin Zuhri.

"Pekerjaan yang baik dan menyenangkan anak manusia tidak boleh ditolak," jawab Prof. KH. Saifuddin Zuhri.

Presiden Soekarno segera memerintahkan staf kepresidenan untuk membawa kedua mahasiswa kasmaran itu ke toko untuk membeli keperluan menikah. Lalu, pada malam harinya dilangsungkan pernikahan keduanya di ruangan Suite Room Presiden Soekarno di Metropole Hotel. Ibu-ibu dari KBRI mendandani penganten perempuan a la kadarnya dan juga menyiapkan makanan juga seadanya. Pesta pernikahan itu yang dihadiri para utusan KTT, staf KBRI, dan beberapa mahasiswa Indonesia di Beograd. berlangsung penuh khidmat dan penuh air mata kebahagiaan dari kedua mempelai.[95]

2. Panglima Besar Repot Karena Krupuk

Setelah Perang Ambarawa, hubungan Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Prof. KH. Saifuddin Zuhri makin akrab. Dalam sebuah kesempatan, Jenderal Sudirman pernah berbicara kepada KH. A. Wahid Hasyim, lalu sambil menunjuk Prof. KH. Saifuddin Zuhri, Jenderal Sudirman mengatakan: "Seharusnya ia

---

[95] *Berangkat dari Pesantren*, Op. Cit., hlm. 620-622.

bersama saya di TNI, tapi ia lebih memilih Hizbullah."

Pada 16 Mei 1946, terjadi konflik terbuka antara Laskar Pesindo (dekat dengan PKI) dengan Laskar Banteng (dekat dengan PNI). Kuatir peristiwa itu bertambah besar, sebagai Komandan Hizbullah, segera meluncur ke Solo, dengan membawa pasukan kecil untuk memperkuat Laskar Hizbullah Solo. Agar persoalan di atas cepat tuntas, Jenderal Sudirman juga datang langsung ke Solo. Konflik di antara laskar rakyat sangat merugikan bangsa Indonesia.

Dari sinilah kemudian Saifuddin mengetahui sebuah kisah tentang Jenderal Sudirman dan krupuk. Konon, sebelum berangkat ke Solo, istri Jenderal Sudirman yang sedang hamil meminta suaminya membawakan oleh-oleh berupa kerupuk rambak dari Solo yang sangat terkenal. Menanggapi permintaan itu, Jenderal Sudirman hanya berucap: "Lho, bu! Katanya saya ini Panglima Besar! *Masa* Panglima Besar membeli krupuk." Ibu Sudirman lalu mengatakan: "Oh, iya Pak, minta maaf saya lupa itu, mungkin karena pembawaan anak kita yang ada dalam perut ini. Benar-benar minta maaf lho Pak."

Setelah menyelesaikan konflik antar laskar di Solo, Jenderal Sudirman, segera pulang kembali ke Yogyakarta. Ia menyesal juga menanggapi permintaan istrinya dengan agak ketus, padahal ia bisa menaggapinya lebih baik. Karena itu, sebelum kembali, ia segera memerintahkan ajudannya untuk membeli satu keranjang krupuk rambak asli Solo yang gurih itu. Panglima Besar Jenderal Sudirman lalu pulang ke rumah dengan perasaan bahagia: urusan negara beres, urusan keluarga juga beres.[96]

---

[96] *Berangkat dari Pesantren*, *Ibid.*, hlm. 412-413.

3. Taktik Miring Laskar Hizbullah

Hubungan Prof. KH. Saifuddin Zuhri dan KH. A. Wahid Hasyim (ayahanda Presiden Abdurrahman Wahid) memang sudah seperti saudara kandung. Jika Prof. KH. Saifuddin Zuhri ke Jawa Timur, keduanya bisa bersama sampai satu minggu, antara lain meninjau dan melatih Laskar Hizbullah di Jawa Timur. Jika KH. A. Wahid Hasyim ke Yogyakarta dan ke Jawa Tengah, Prof. KH. Saifuddin Zuhri menemani putra pendiri NU itu ke berbagai tempat yang dituju. Kelak hubungan di antara keduanya diikat dengan hubungan kekeluargaan, putra KH. A. Wahid Hasyim yaitu Salahuddin Wahid menikah dengan putri Prof. KH. Saifuddin Zuhri yaitu Farida.

Ketika berada di Jawa Timur Prof. KH. Saifuddin Zuhri mengisahkan pengalamannya, bahwa sudah seminggu Prof. KH. Saifuddin Zuhri menyertai KH. A. Wahid Hayim untuk melihat dari dekat situasi pertempuran sepanjang garis "Van Mook", sebuah garis demarkasi di mana pasukan Belanda bebas maju dan mundur. Di Markas Ulama di Mojokerto, keduanya menerima laporan dari Kiai Yasin, Kepala Staf Laskar Hizbullah, didampingi Mayor Munasir, salah satu prajurit Hizbullah yang sudah di-TNI-kan. Posisi Markas Ulama Mojokerto tidak jauh dari garis "Van Mook", sehingga dari sini Laskar Hizbullah sering melakukan gangguan terhadap pergerakan Pasukan Belanda yang lalu lalang melalui garis "Van Mook".

Suatu ketika, anak-anak Hizbullah pulang dari gerilya, setelah sebelumnya sempat terjepit dalam pertempuran yang sengit di garis demarkasi. Syukurlah, Komandan Lapangan Hizbullah yang terjepit itu tidak lekas panik. Sambil membaca semua doa yang dihafalnya, ia masih bisa berpikir jernih: kalau menyerbu musuh yang ada di depannya, maka semua akan mati konyol. Jika lari dan mundur, maka akan memikul dosa, karena takut dari musuh. Maka Komandan Lapangan itu melakukan "taktik miring": tidak

maju, juga tidak mundur, melainkan berjalan miring menuju arah yang menjauh dari garis "Van Mook". Sejak itu, taktik miring menjadi terkenal di kalangan Hizbullah Jawa Timur.

4. Ikan Gurame Bikin Pintar

Suatu malam, baru lepas Isya, Prof. KH. Saifuddin Zuhri mendengar deru mesin mobil dengan klakson dengan nada khusus yang sudah dihafalnya berhenti di sebelah kanan rumahnya (tepatnya, rumah sang mertua) di Baledono, Purworejo. Pastilah, itu mobil Gus Wahid, panggilan akrab KH. A. Wahid Hasyim.

Saat itu, Prof. KH. Saifuddin Zuhri sedang siap-siap makan malam. Segera ia bergegas keluar menjemput tamu, seraya memberi tahu sang istri perihal tamu yang datang dan memintanya untuk menambah hidangan di meja makan. Gus Wahid datang ditemani Rasyad, santri Tebuireng yang juga menjadi sopirnya.

Setelah semuanya siap, kami semua menuju meja makan. "Masya Allah, makan besar ini," kata Gus Wahid sambil mengamati hidangan di atas meja satu persatu. "Wah, begini lengkap seperti di restoran saja," lanjutnya.

"Wah, ini ikan gurame, Rasyad!" katanya ditujukan kepada Rasyad. "Ente tahu, orang yang suka makan gurame otaknya akan bertambah cerdas. Percaya tidak?" Tanya Gus Wahid pada Rasyad.

"Tentu saja menjadi cerdas, karena selalu berpikir: bagaimana mendapatkan uang agar bisa makan gurame setiap hari," jawab Rasyad. Meledaklah tawa kami serentak. Semua setuju karena memang ikan gurame sangat lezat.[97]

---

[97] *Berangkat dari Pesantren, Ibid.,* hlm. 375-376.

I. Jurnalisme Perjuangan

Bakat kewartawanan dan kepengarangan Prof. KH. Saifuddin Zuhri mulai terasah dengan sendirinya saat ia mulai gemar membaca. Keakrabannya dengan berbagai bacaan terjalin sejak masih belia. Di rumah pamannya, Haji Abdullah Safi'i ia membenamkan diri ke dalam buku-buku, majalah-majalah, dan surat kabar, baik yang masih baru maupun yang sudah lama. Di antaranya *Berita NU*, *Suara Ansor NU*, keduanya diterbitkan di Surabaya, *Panji Islam* di Medan, *Pikiran Rakyat* (asuhan Ir. Soekarno dari Bandung), *Indonesia Berjuang*, Harian *Pemandangan* Pimpinan M. Tabrani di Jakarta, mingguan politik *Pesat* asuhan Sayuti Melik dan S.K. Trimurti di Semarang dan lain-lain.[98]

Kegemarannya membaca itu menumbuhkan keinginannya untuk menjadi pengarang. Sekitar usia 16-17 tahun, ia mulai mengirimkan tulisan ke *Berita NU,* karena ia tertarik dengan tulisan-tulisan yang diterbitkan oleh *Berita NU* ini. Beberapa kali ia mengirim tulisannya, namun gagal, tidak dimuat. Setelah berkonsultasi dengan KH. Mahfudz Shiddiq selaku pimpinan Umum/ Pemred *Berita NU,* tulisan pertamanya yang berjudul "Islam dan Persatuan" dimuat.

Tidak lama setelah itu kebetulan Prof. KH. Saifuddin Zuhri terpilih menjadi Sekretaris Cabang Ansor NU, yang bertugas dan bertanggung jawab untuk urusan menyelenggarakan kursus-kursus dan taman bacaan. Dan karena itulah cita-citanya menjadi pengarang makin menguat. Peluang untuk menjadi pengarang pun makin terbuka karena hubungan Prof. KH. Saifuddin Zuhri dengan tata usaha majalah bulanan *Suara Ansor NU* mengantarkan dia untuk menjalin komunikasi dengan pemimpin redaksi majalah tersebut. Ia menulis beberapa karangan yang bertema kepemudaan dan tentang semangat belajar. Berkat tulisan-tulisannya

[98] *Berangkat Dari Pesantren, Ibid.,* hlm. 139

di *Berita NU* yang cukup intens, peluang untuk dimuat di *Suara Ansor NU* makin terbuka. Dan karangan pertama yang dimuat di majalah ini berjudul “Pemuda dan Zaman yang Akan Datang”.

Perkenalannya dengan Oei Hoe Liang, seorang wartawan Surat Kabar Tionghoa Melayu *Hong Po*, yang tertarik pada Ansor NU, membuat Prof. KH. Saifuddin Zuhri belajar menjadi seorang wartawan/koresponden. Beberapa kegiatan kemasyarakatan yang menurut padangannnya yang mempunyai nilai berita ia kirim kepada redaksi Oei Hoe Liang. Lambat laun ia mampu bekerja sendiri dan menangani berita-berita kemasyarakatan non-ekonomi, misal kegiatan NU dan Ansor NU, berita-berita partai dan organisasi lainnya, dan tentang perkembangan keagamaan dan pendidikan.

Profesi Prof. KH. Saifuddin Zuhri sebagai koresponden di *Berita NU*, *Suara Ansor NU,* dan *Hong Po* yang baru dijalaninya membuatnya berkenalan dengan seorang wartawan *Antara* dari Kebumen bernama Agus Suyudi. Agus tertarik dengan tulisan-tulisan Prof. KH. Saifuddin Zuhri. Ketika Agus memindahkan kantornya dari Kebumen ke Purwokerto, Saifuddin Zuhri ditariknya bekerja sebagai wartawan *Antara*. Prof. KH. Saifuddin Zuhri ditugaskan untuk meliput berita di wilayah Banyumas dan Kedu bagian Utara.

Menginjak usia 18 tahun, Prof. KH. Saifuddin Zuhri merantau ke Solo untuk melanjutkan pendidikan. Di kota Solo, ia mengajukan lamaran kepada harian *Pemandangan* yang terbit di Jakarta untuk menjadi korespondennya. Karena telah tercatat sebagai pembantu untuk daerah Purwokerto, dan harian *Pemandangan* sudah memiliki koresponden di kota Solo, ia diterima menjadi anggota staf redaksi. Selain itu, ia juga menjadi pembantu tidak tetap untuk surat kabar bahasa Jawa *Darmokondo*, yang terbit di Solo. Dari pekerjaannya di dua surat kabar itu, ia mendapat imbalan rata-rata 3 atau 4 sen per bulan.

Pada tahun 1938, Prof. KH. Saifuddin Zuhri sebagai wartawan menyaksikan kongres Perdi (Persatuan Djurnalis Indonesia) yang diselenggarakan di gedung "Habipraya". Di sini pertama kali ia melihat wajah-wajah para dedengkot wartawan masa itu. Di antaranya, Syamsuddin Sultan Makmur, M. Tabrani, Mr. Sumanang, Sanusi Pane, Saerun, Parada Harahap, Adinegoro, Darmosungondo, Sudaryo Tjokrosisworo, Surono, Winarno, dan lain-lain. Mereka mewakikili surat kabar yang berpengaruh seperti *Bintang Timur, Pemandangan, Pewarta Deli, Sedya Tama, Suara Umum, Darmokondo,* dan lain-lain.

Kesibukan Prof. KH. Saifuddin Zuhri sebagai pemimpin Ansor Daerah Jawa Tengah bagian selatan membuat waktunya banyak tersita untuk kegiatan organisasi. Apalagi sejak ia memimpin rapat umum Ansor di Gedung Nasional Surabaya, dalam rangka Muktamar NU ke-15 bulan Desember 1940, ia sering diundang menghadiri rapat-rapat Ansor NU di luar daerah Jawa Tengah bagian selatan, seperti Malang, Jombang, Gresik, Kudus, Semarang, Cirebon, Bandung, bahkan Surabaya sebagai sekretariat Pengurus Besar Ansor NU. Oleh karena itu, tugasnya sebagai wartawan, kecuali sebagai pembantu tetap *Berita NU* dan *Suara Ansor NU*, terpaksa dikurangi. Berhubung Konsul NU Banyumas juga menerbitkan majalan bulanan sendiri berbahasa Jawa bernama *Penggugah* yang diamanatkan kepada dirinya untuk memimpin, dengan sendirinya majalah ini mendapat porsi waktu tersendiri baginya.

Akibat revolusi, situasi ekonomi nasional morat-marit. Kondisi kemorat-maritan nasional itu menyeret Prof. KH. Saifuddin Zuhri ke dalam kemorat-maritan pula. Meski ia menempati paviliun markas Hisbullah, tetapi beban dapurnya juga terasa berat. Walau ia diangkat menjadi anggota Dewan Pertahanan Daerah Kedu, tapi badan perjuangan yang resmi tidak bisa menjadi sumber penghidupan. Sejak Ibukota hijrah ke

Yogyakarta, ia tidak lagi menjadi wartawan.[99]

Kendati berada di tengah pergolakan politik dan militer, sambil berpindah-pindah dari satu tempat ke temat lain di hampir seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur, pada Desember 1947 ia berhasil menyelesaikan penulisan buku *Palestina dari zaman ke zaman*, yang diterbitkan oleh PBNU, yang ketika itu telah hijrah dari Surabaya ke Pasuruan, dan karena agresi militer Belanda pindah lagi ke Madiun. Buku berjudul *Palestina dari Zaman ke Zaman* tersebut ditoleh karena terinspirasi oleh kepahlawanan yang diperlihatkan oleh Mohammad Abdul Mun'im, dan sebagai bentuk balas budi dan jasa bangsa-bangsa Arab yang mendukung kedaulatan Republik Indonesia. Seorang diplomat muda, Isma'il Banda M.A., duta besar Indonesia untuk Afganistan, mantan pemimpin pergerakan Mahasiswa Indonesia di Kairo memberikan kata pengantar dalam buku setebal 84 halaman itu.[100]

Setelah bertahun-tahun libur menjadi wartawan, Prof. KH. Saifuddin Zuhri menghidupkan lagi majalah *Berita NU*, yang sejak zaman Jepang dan zaman Revolusi bersenjata tidak dapat hidup. Selama 9 tahun, warga NU tidak memiliki majalah satu pun. Baru setelah November 1951 majalah itu diterbitkan menjadi 1 bulanan. Saat itu, Prof. KH. Saifuddin Zuhri telah diangkat menjadi Ketua Bagian Dakwah PBNU, dan menjabat sebagai Kepala Kantor Agama Provinsi Jawa Tengah, Wakil Ketua Masyumi Jawa Tengah, dan sekaligus anggota DPRD Jawa Tengah.[101]

Salah satu peristiwa penting yang ia abadikan dalam majalah *Berita NU* no. 8 Tahun 1953 adalah berdirinya Badan Federasi Umat Islam bernama Liga Muslimin Indonesia. Semua peristiwa tersebut selalu ia ikuti perkembangannya serhubungan dengan tugasnya sebagai ketua PBNU bagian dakwah dan pimpinan

---

[99] *Berangkat dari Pesantren, Ibid.*, hlm. 414
[100] *Berangkat dari Pesantren, Ibid.*, hlm 422
[101] *Berangkat dari Pesantren, Ibid.*, hlm. 495

bulanan *Berita NU*.

Satu hari yang sangat berkesan bagi Prof. KH. Saifuddin Zuhri semasa tinggal di semarang adalah kedatangan seseorang yang sangat ia kagumi. Orang itu hadir tepat setelah shalat magrib. Saat menyambut tamu itu, orang itu memperkenalkan dirinya, 'Hamka', yang ketika itu merupakan seorang pejabat tinggi departemen agama. Kunjungan Haji Abdul Malik Karim Amrullah ke rumahnya di Semarang itu adalah kunjungan perkenalan dan persahabatan.[102]

KH. A. Wahid Hasyim meninggalkan sebuah percetakan beserta gedungnya di Senayan, percetakan tua milik PBNU yang sebelumnya beroperasi di Sasak Surabaya. Dengan modal percetakan itu, beberapa tokoh PBNU mendirikan perusahaan untuk menerbitkan harian *Duta Masyarakat.* Harian yang bersemboyan *Menggalang Kerja Sama Islam-Nasional* itu merupakan terompet NU untuk mencitrakan iklim sejuk bagi pelaksanaan Pancasila secara jujur dan bersih. Langkah ini dilakukan karena timbulnya intrik-intrik politik yang berhaluan ekstrem, baik kiri maupun kanan, sipil maupun militer, harus dicegah.[103] *Duta Masyarakat*, terbit kali pertama pada 2 Januari 1954. Slogan koran ini, kata Chalid Mawardi, "Untuk Kerjasana Islam-Nasional". Namun kemudian slogan koran berubah menjadi "Pembawa Amanat Penderitaan Ummat".

Harian *Duta Masyarakat* ditempatkan di bekas kantor PBNU di Menteng Raya no. 24, yang juga sebagai kantor PP Muslimat NU.[104] Awal tahun 1959, Prof. KH. Saifuddin Zuhri diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, selain itu ia juga menjabat sebagai Sekjen PBNU dan Anggota DPR. Kecuali tiga jabatan itu ia juga ditugaskan partai NU untuk secara aktif

---

[102] *Berangkat dari Pesantren, Ibid.*, hlm. 514-515

[103] *Berangkat dari Pesantren, Ibid.*, hlm. 529

[104] *Berangkat dari Pesantren, Ibid.*, hlm. 534

memberi warna *harian Duta Masyrakat* sebagai terompet NU.

Mulai tahun 1960, Prof. KH. Saifuddin Zuhri diangkat sebagai Pemimin Umum merangkap Pemred haria *Duta Masyarakat.* Ia mengangkat Mahbub Djunaidi mendampingi dalam memimpin redaksi. Perhatian Prof. KH. Saifuddin Zuhri tertarik pada Mahbub karena salah satu karangannya di suatu majalah. "Anak ini kalau diberi kesempatan mempunyai harapan baik di masa depan," pikirnya. Sebelumnya, juga sudah ada anak muda lainnya bernama Said Budairy yang sudah membantu di *Duta Masyarakat* sejak dalam kepemimpinan Asa Bafaqih. Sedangkan Asa Bafaqih diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi Duta Besar RI untuk Srilanka.[105]

Bila hari Ahad, *Duta Masyarakat* berganti nama *Duta Minggu*. Jargonnya pun diganti menjadi "Mengembangkan Kebudajaan Ilmu dan Agama". Nuansa baru itu mulai terbit pada 5 Februari 1961. Sejak itulah rubrik *Duta Teruna* – berslogan Tempat Persemaian Tunas-Tunas Muda.

Edisi 8 Oktober 1965, giliran pernyataan Ketua Umum PBNU, Kiai Idham Chalid, dijadikan judul besar: "Kita Tetap Kiri, dan Tidak Akan berbelok Ke Kanan." Paragrap pertama tulisan ini memuat pernyataan Idham Chalid:

> Dengan dibubarkanya PKI, Revolusi kita tidak akan berbelok ke Kanan, melainkan total Revolusi jang kiri. Kiri dalam arti Pantja Sila, anti nekolim, anti kapitalisme dan anti segala rupa bentuk penindasan oleh manusia atas manusia dan oleh Bangsa atas Bangsa.[106]

Hampir semua tulisan-tulisan *Duta Masyarakat* yang terbit saat itu fokus pada kekisruhan politik di Jakarta dan seluruh wilayah di Jawa. Tak ketinggalan tulisan fiksi, seperti cerita bersambung "Kemelut di Demak" karangan M. Dharto Wahab, yang

---

[105] *Berangkat dari Pesantren, Ibid.*, hlm. 605-606

[106] *Berangkat dari Pesantren, Ibid.,* hlm. 671

berakhir pada edisi 35, 18 Oktober 1965. Salah satu polemik yang menarik adalah Hamka diserang oleh koran-koran komunis sebagai plagiator karena buku karangannya, *Tenggelamnya Kapal Van der Wijk*, dinilai sebagai karya jiplakan. Padahal alasan sebenarnya ingin menyerang Hamka karena dia tokoh Masyumi. Dan satu-satunya yang membela Hamka adalah Harian *Duta Masyrakat*.

Sepak terjang Prof. KH. Saifuddin Zuhri sebagai wartawan, ternyata juga diikuti terus oleh Presiden Soekarno. Prestasi dan dedikasinya sebagai wartawan dan perjuangan lainnya ini menjadikan Presiden Soekarno jatuh hati dan bersimpati untuk mengangkatnya menjadi Menteri Agama menggantikan KH. Wahib Wahab. Soekarno memanggilnya ke Istana Merdeka. Alasan Soekarno disampaikan sebagai berikut.

> Penunjukan atas saudara sudah saya pikir masak-masak dan cukup lama saya pertimbangkan. Sudah lama saya ikuti sepak terjang saudara sebagai wartawan, sebagai seorang politik, dan sebagai pejuang. Saya dekatkan saudara menjadi anggota DPA, saya bertambah simpati. Lalu, baru-baru ini saya ajak berkeliling dunia dari Jakarta-Beograd-Washington-Tokyo, saya makin mantap memilih saudara sebagai menteri.[107]

Sejak diangkat menjadi Menteri Agama, nama Prof. KH. Saifuddin Zuhri tetap tertera di kotak keredaksian *Duta Masyarakat,* namun sudah tidak aktif lagi sebagai pemimpin umum/redaksi. Mahbub Djunaidi menggantikan kedudukannya, dan Said Budairy menjadi wakilnya.[108] Kedua orang ini menunjukkan dedikasinya dalam dunia pers hingga Mahbub mendapat kepercayaan sebagai ketua PWI. Perkiraan Prof. KH. Saifuddin Zuhri terhadap potensi yang dimiliki Mahbub Djunaidi terbukti nyata. Produktivitas dan keunikan tulisan Mahbub diacungi jempol banyak orang. Karya terjemahannya juga dikagumi oleh Prof. KH. Saifuddin Zuhri.

---

[107] *Berangkat dari Pesantren, Ibid.*, hlm. 627

[108] *Berangkat dari Pesantren, Ibid.,* hlm. 671

Gaya tulisan Mahbub Junaidi yang kocak dan cerdas membikin Harian *Kompas* mempercayainya untuk mengisi kolom Asal-Usul setiap hari Minggu.

Kebiasaan Prof. KH. Saifuddin Zuhri sebagai penulis tidak berhenti ketika menjadi Menteri. Saat menjabat Menteri Agama tahun 1962, pegawai bidang Penerangan/Penyiaran mengetahui bahwa sebelum Prof. KH. Saifuddin Zuhri berpidato, ceramah, dan lain-lain terutama dalam peristiwa penting, selalu menyiapkan teksnya terlebih dahulu berupa naskah yang dibuat 2-3 rangkap.

> Sekalipun kita mengetahui bahwa beliau dapat berpidato atau memberi tjeramah berdjam-djam tanpa teks ataupun tjatatan-tjatatan yang dipersiapkan dulu. Dengan cara membuat naskah pidato dan lain-lain 2-3 rangkap itu selain sebagai pengarsipan kemungkinan naskah pidato itu diminta oleh berkepentingan, djuga lalu beliau simpan sebagai arsip beliau sendiri, dan djuga beliau berikan kepada saja untuk diterbitkan menjadi brosur atau penerbitan resmi Departemen Agama.
>
> Kebiasaan yang baik ini patut ditjontoh, terutama oleh generai muda jang banjak menaruh minat dan mempunjai bakat serta keahlian dalam mengarang dan berpidato. Dengan demikian, kita mempunjai kumpula arsip jang terperlihara sebagai hasil karya kita jang mungkin ada manfaatnja buat anak keturunan kita dalam lingkungan jang terbatas, dan buat bangsa serta masjarakat dalam lingkungan jang luas.[109]

Kepenulisan dan kepengarangan Prof. KH. Saifuddin Zuhri terus berlanjut hingga akhir hayatnya. Berbagai artikel opini maupun polemik terus mengalir dan disiarkan di media-media cetak seperti harian *Kompas, Merdeka,* dan *Pelita*. Melalui media massa ia juga memaparkan bagaimana sesungguhnya posisi politik dan dakwah dalam pandang Islam. Ia juga telah melahirkan beberapa buku yang berisi tentang kesaksian dan pemikirannya yang luas.

Setelah berhasil menulis biografi KH. Wahab Hasbullah

---

[109] Mas'uddin Noor, "Sepatah Kata Pengantar" dalam *Agama Sebagai Unsur Mutlak dalam Nation Building* (Djakarta: Lembaga Penjebar Api Islam; 1965), XIV

pada tahun 1972, ia juga tertantang untuk menulis sebuah novel atas saran sahabatnya Asrul Sani, yang juga seorang pengarang. Tahun 1974, lahirlah novel *Guruku Orang-Orang Pesantren*. Dari novel itu berlanjut pada karya terakhirnya berupa Memoir *Berangkat dari Pesantren*, yang dikerjakan sejak 24 Januari 1979. Penulisan memoir yang diperkirakan selesai dalam 2 tahun, namun molor hingga 17 Juni 1984 karena gangguan sirkulasi arah pada jatung yang membuatnya terhambat. Memoir ini merupakan bentuk pertanggungjawabannya kepada seluruh keluarga, teman-teman seperjuangan, dan kepada masyarakat umumnya tentang apa yang pernah ia kerjakan dan perjuangkan.

Ahmad Baso, peniliti kajian poskolonial, menilai karya-karya Prof. KH. Saifuddin Zuhri merupakan karya yang masuk dalam genre teks Poskolonial. Menurut Baso, Genre "teks Poskolonial" ini muncul dari kebangkitan literatur-literatur Dunia Ketiga yang mengalami proses dekolonisasi. Proses dekolonisasi dalam politik dilanjutkan dengan genre "Teks Poskolonial" menjadi sebuah "menulis balik". Genre ini berbicara tentang respon penduduk terjajah terhadap kolonialisme, telak dan tepat menghunjam di jantungnya, yang mengambil dimensi ideologis, di mana representasi kolonial ditentang, dan validitas dan integritas kebudyaan pribumi dikukuhkan kembali.[110]

> *Guruku* dan *Berangkat dari Pesantren* adalah sebuah kontribusi bagi kemanusiaan, yang kini mengalami krisis. Dunia saat ini menderita akibat kezaliman sebuah rezim absolutisme-universelis bernama imperalisme global dan neoliberalisme. Kontribusi Saifuddin Zuhri ini memberikan pendasaran baru bagi perlawanan terhadap kedua rezim abosulitisme tersebut dari konteks lokalistas masyarakat. Dan untuk mempersenjatai lokalitas tersebut, Kiai Saifuddin menggunakan cara pendekatan etnografis khas antropolog.[111]

---

[110] Ahmad Baso, *Kiai Sebagai Antropolog:Strategi-strategi dan Politik Kebudayaan Kiai Saifuddin Zuhri,* (makalah tanpa tahun), hlm. 1

[111] Ahmad Baso, *ibid,* hlm. 10

Di samping itu, Ahmad Baso sebagai generasi yang tidak pernah bertemu atau bersentuhan langsung dengan Prof. KH. Saifuddin Zuhri juga memberikan pengakuannya bahwa dia hanya mengetahui Prof. KH. Saifuddin Zuhri setelah mempelajari pemikiran, kiprah, dan perjuangannya melalui karyanya-karya-nya. Bahkan setelah mengkajinya selama lima tahun, Ahmad Baso sangat terinspirasi sehingga menghasilkan buku *Pesantren Studies*.[112]

Karya-karya Prof. KH. Saifuddin Zuhri pada akhirnya mampu menghidupkan dirinya hingga sekarang, walaupun jasad-nya telah wafat sejak 25 Februari 1986. Karyanya menjadi banyak rujukan dalam berbagai karya-karya selanjutnya, seperti desertasi, tesis, dan berbagai jenis karya sejarah lainnya. Sejarawan Anhar Gonggong telah menguji karya Prof. KH. Saifuddin Zuhri sebagai sumber sejarah yang valid dan dapat dipertangungjawabkan. Anhar Gonggong menyatakan,

> Saya sudah membaca hampir semua kisah beliau kebetulan saya banyak menjadikan referensi untuk menyelesaikan desertasi saya mengenai Darul Islam. Buku ini adalah salah satu sumber bangsa, yang dibutuhkan oleh bangsa... Pemikiran seperti yang dikemukakan Pak Saifuddin Zuhri sangat penting untuk dipelajari bagi generasi-generasi sekarang yang menuju ke depan. Oleh karena itu saya katakan, Pak Saifuddin sebenarnya belum meninggal dalam arti pemikiran. Ada pemimpin yang sebenarnya meninggal karena tidak meninggalkan apa-apa, tapi ada yang tidak. Salah satu di antaranya yang tidak (meninggal) menurut saya, ya, Pak Saifuddin Zuhri.[113]<>

[112] Kesaksian Ahmad Baso disampaikan dalam Seminar "Perjuangan dan Pengabdian Prof. KH. Saifuddin Zuhri" yang diselenggarakan PBNU, 2 Juli 2013.

[113] Kesaksian Anhar Gonggong disampaikan dalam Seminar "Perjuang-an dan Pengabdian Prof. KH. Saifuddin Zuhri" yang diselenggarakan PBNU, 2 Juli 2013.

BAB IV
PENUTUP

Dari berbagai uraian di atas, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan, penting, sebagai berikut:

1. Prof. KH. Saifuddin Zuhri telah memberikan sumbangsih besar kepada bangsa dan negara, melalui perjuangan, kepeloporan, dan keperintisan di berbagai bidang, mulai dari perjuangan fisik melawan penjajahan, mempertahankan NKRI, pembangunan demokrasi, pengembangan Islam berwawasan Nusantara, pemberdayaan perempuan, pengembangan karakter bangsa, penulisan dan sastra, jurnalisme, pendidikan berwawasan kebangsaan, dan pemberantasan korupsi.
2. Jasa-jasa Prof. KH. Saifuddin Zuhri sebagaimana dijelaskan tadi telah mendapatkan otoritasisasi berupa Piagam Penghargaan, Sertifikat, dan lain-lain, mulai dari Presiden Soekarno dan Presiden BJ. Habibie, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Jenderal A.H. Nasution, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Fuad Hasan.
3. Jasa-jasa Prof. KH. Saifuddin Zuhri juga diabadikan sebagai nama lembaga pendidikan tinggi berupa Akademi Keperawatan Saifuddin Zuhri di Indramayu, nama gedung dan asrama di lingkungan Pondok Pesantren Tebuireng di Jombang, dan nama Yayasan Saifuddin Zuhri di Jakarta.

4. Pemikiran Prof. KH. Saifuddin Zuhri juga terus dikaji oleh berbagai kalangan dan ditulis untuk jurnal ilmiah dan buku, skripsi, thesis, dan lain sebagainya. Buku-buku beliau juga sudah diterbitkan berbagai penerbit nasional di tahun 1970-an dan 1980-an dan kini mulai diterbitkan ulang lagi oleh beberapa penerbit nasional, seiring dengan kerinduan masyarakat akan sosok seperti Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
5. Untuk makin memasyarakatkan nilai-nilai, pemikiran, dan keteladanan Prof. KH. Saifuddin Zuhri, Pemerintah Republik Indonesia perlu memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada beliau, sesuai dengan rekomendasi beberapa tokoh nasional seperti H. Taufiq Kiemas, Prof. Dr. Mohammad Mahduf MD, H. Suryadharma Ali, M.Si, Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, MA, Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, KH. Salahuddin Wahid, DR. KH. Tarmizi Taher, dan Dr. KH. Muhammad Maftuh Basyuni; juga dukungan beberapa tokoh yang disampaikan melalui media massa seperti Menko Perekonomian Hatta Radjasa dan Ketua MUI KH. Ma'ruf Amin.<>

Lampiran-Lampiran

BIODATA SINGKAT

Nama Lengkap : SAIFUDDIN ZUHRI
Tempat /Tgl Lahir : Sokaraja, Banyumas,
Rabu (Wage) 1 Oktober 1919
Meninggal Dunia : Jakarta, 25 Februari 1986.
Dimakamkan : di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan
Nama Istri : Siti Solihah
Anak : Sebelas orang
Pendidikan : Madrasah dan Pesantren

PENGALAMAN DAN PENGABDIAN

Periode 1937-1945 (sebelum zaman kemerdekaan):

1. Pemimpin Ansor Nahdlatul Ulama Daerah Jawa Tengah Selatan
2. Konsul Nahdlatul Ulama Daerah Kedu
3. Wartawan
4. Guru Madrasah

Periode 1945-1953:

1. Komandan Divisi Hizbullah “Sultan Agung”
2. Anggota Dewan Pertahanan Daerah Kedu
3. Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
4. Kepala Kantor Agama Propinsi Jawa Tengah
5. Ketua Bagian Da’wah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Periode 1954-1962:

1. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NU
2. Anggota Parlemen Sementara/DPR-RI
3. Anggota Konstituante
4. Pemimpin Redaksi Harian "*Duta Masyarakat*"
5. Anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

Periode 1962-1967:

1. Menteri Agama Republik Indonesia
2. Diwisuda sebagai Guru Besar dalam bidang Da'wah oleh Senat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta (1964)

Periode 1967-1982:

1. Anggota DPR RI
2. Ketua II, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
3. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
4. Rois III, Syuriyah Nahdlatul Ulama
5. Veteran Pejuang Kemerdekaan NRP.288627, No. PV 293627/5 Mei 1967

Periode 1982-1986 (Menjelang Akhir Hayat):

1. Mustasyar (Penasehat) Pengurus Besar NU
2. Rektor, Perguruan Tinggi Ilmu Da'wah, Jakarta.<>

KARYA TULIS/BUKU

1. Zuhri, Saifuddin, *Palestina dari Zaman ke Zaman*, Penerbit PB NU, Madiun, 1947

2. Zuhri, Saifuddin, *Agama Unsur Mutlak dalam Nation Building*, Penerbit Endang, Jakarta 1965.

3. Zuhri, Saifuddin, *Almaghfurlah KH. Abdul Wahab Chasbullah: Bapak dan Pendiri Nahdlatul Ulama*, Penerbit Yamunu, Jakarta, 1972. Diterbitkan kembali oleh Pustaka Falakiah, Yogyakarta, 1983.

4. Zuhri, Saifuddin, *Guruku Orang-Orang dari Pesantren*, Penerbit PT Al-Maarif, Bandung 1974. Diterbitkan kembali oleh LKiS, Yogyakarta, 2001.

5. Zuhri, Saifuddin, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, Penerbit PT Al-Maarif, Bandung, 1981.

6. Zuhri, Saifuddin, *Kaleidoskop Politik di Indonesia Jilid I,* Penerbit PT Gunung Agung, Jakarta, 1981.

7. Zuhri, Saifuddin, *Kaleidoskop Politik di Indonesia Jilid II*, Penerbit PT Gunung Agung, Jakarta, 1981.

8. Zuhri, Saifuddin, *Kaleidoskop Politik di Indonesia Jilid III*, Penerbit PT Gunung Agung, Jakarta, 1981.

9. Zuhri, Saifuddin, *Unsur Politik Dalam Da'wah*, Penerbit PT Al-Maarif, Bandung,1982.

10. Zuhri, Saifuddin, *Secercah Da'wah*, Penerbit PT Al-Maarif, Bandung, 1983.
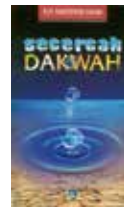
11. Zuhri, Saifuddin, *Berangkat Dari Pesantren*, Penerbit PT. Gunung Agung, Jakarta, 1987. Diterbitkan kembali oleh LKiS, Yogyakarta, 2013.<>

BINTANG JASA DAN TANDA KEHORMATAN

1. Satyalancana Peristiwa Perang Kemerdekaan Kesatu, No. M/B/217/64/A-4-11-1964,oleh Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata RI, Djenderal TNI Dr. A.H. Nasution
2. Satyalancana Peristiwa Perang Kemerdekaan Kedua No. M/B/217/64/B-4-11-1964 oleh Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata RI, Djenderal TNI Dr. A.H. Nasution
3. Satyalancana Gerakan Operasi Militer I, No. M/B/217/64, oleh Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata RI, Djenderal TNI Dr. A.H. Nasution
4. Satyalancana Gerakan Operasi Militer V, No. M/B/217/64, oleh Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata RI, Djenderal TNI Dr. A.H. Nasution
5. Satyalancana Gerakan Operasi Militer VI, No. M/B/217/64, oleh Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata RI, Djenderal TNI Dr. A.H. Nasution.
6. Bintang Gerilya, No. 0006/V/65, SK Presiden RI No. 2/BTK/Th 1965, 4 Januari 1965, oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia, Sukarno.
7. Bintang Equitem Commendatorem Ordinis Sancti Silvestri Papae dari Sri Paus di Vatican, Roma, Tahun 1965

8. Piagam Penghargaan Palang Merah Indonesia, No. 01364, 17 September 1972, oleh PB PMI.
9. Penghargaan Buku Utama kategori Buku Bacaan Dewasa bidang Humaniora atas buku berjudul *Berangkat dari Pesantren* (Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 1987), pada 3 Oktober 1989, oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Fuad Hasan.
10. Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana, No. 3877/II/ 1998, 6 November 1998, oleh Presiden RI, B.J. Habibie.
11. Penghargaan sebagai tokoh nasional penerima Bintang Keteladanan Akhlak Mulia Tahun 2007 oleh Komite Pusat Gerakan Masyarakat Peduli Akhlak Mulia.<>

No. M/B/217/64/A..

Surat Tanda Penghargaan

Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan
Kepala Staf Angkatan Bersendjata,

Mengingat : Undang-undang No. 70 tahun 1958 tentang tanda penghargaan chusus untuk anggota Angkatan Perang Republik Indonesia;

Memutuskan :

Menjatakan, bahwa:

Nama : Prof. K. H. Saifuddin Zuhri

Pangkat : – N.R.P. –

Djabatan : J. M. Menteri Agama..

Dianugerahi :

„Satyalantjana Peristiwa Perang Kemerdekaan kesatu"

sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai tersebut dalam pasal 16 dari Undang-undang No. 70 tahun 1958 tersebut diatas.

Dikeluarkan di Djakarta,

pada tanggal 4 Nopember 1964..

Menteri Koordinator Kompartimen
Pertahanan/Keamanan
Kepala Staf Angkatan Bersendjata,

Dr. A.H. Nasution
Djenderal T.N.I.

No.: M/B/217/64/B.-

Surat Tanda Penghargaan

Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan
Kepala Staf Angkatan Bersendjata,

Mengingat: Undang-undang No. 70 tahun 1958 tentang tanda penghargaan chusus untuk anggota Angkatan Perang Republik Indonesia;

Memutuskan:

Menjatakan, bahwa:

Nama : Prof. K. H. Saifuddin Zuhri

Pangkat : N.K.P.

Djabatan : J. M. Menteri Agama.-

Dianugerahi:

„Satyalantjana Peristiwa Perang Kemerdekaan kedua"

sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai tersebut dalam pasal 16 dari Undang-undang No. 70 tahun 1958 tersebut diatas.

Dikeluarkan di Djakarta,
pada tanggal 4. Nopember 1964.-

Menteri Koordinator Kompartimen
Pertahanan/Keamanan
Kepala Staf Angkatan Bersendjata,

Dr. A.H. Nasution
Djenderal T.N.I.

No. : M/B/217/64.-

G.O.M. I

Surat Tanda Penghargaan

Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan
Kepala Staf Angkatan Bersendjata.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 70 tahun 1958 tentang tanda penghargaan chusus untuk anggota Angkatan Perang Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1958 tentang Satyalantjana peristiwa gerakan operasi militer.

Memutuskan :

Menjatakan, bahwa:
Nama : Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Pangkat : N.R.P. -
Djabatan : J.M. Menteri Agama

Dianugerahi :

„Satyalantjana Gerakan Operasi Militer I"

sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai tersebut dalam pasal 3 dari Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1958 tersebut No. 2 diatas.

Dikeluarkan di Djakarta,
pada tanggal 4 Nopember 1964.-

Menteri Koordinator Kompartimen
Pertahanan/Keamanan
Kepala Staf Angkatan Bersendjata,

Dr. A.H. Nasution
Djenderal T.N.I.

No.: M/B/217/64.-

G.O.M. V

Surat Tanda Penghargaan

Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan
Kepala Staf Angkatan Bersendjata,

Mengingat : 1. Undang-undang No. 70 tahun 1958 tentang tanda penghargaan chusus untuk anggota Angkatan Perang Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1958 tentang Satyalantjana peristiwa gerakan operasi militer.

Memutuskan :

Menjatakan, bahwa:
Nama : Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Pangkat : — N.R.P. —
Djabatan : J. M. Menteri Agama

Dianugerahi :

„Satyalantjana Gerakan Operasi Militer V"
sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai tersebut dalam pasal 15 dari Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1958 tersebut No. 2 diatas.

Dikeluarkan di Djakarta,
pada tanggal 4 Nopember 1964.-

Menteri Koordinator Kompartimen
Pertahanan/Keamanan
Kepala Staf Angkatan Bersendjata,

Dr. A.H. Nasution
Djenderal T.N.I.

No. H/B/217/64.-

G.O.M. VI

Surat Tanda Penghargaan

Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan
Kepala Staf Angkatan Bersendjata,

Mengingat: 1. Undang-undang No. 70 tahun 1958 tentang tanda penghargaan chusus untuk anggota Angkatan Perang Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1958 tentang Satyalantjana peristiwa gerakan operasi militer.

Memutuskan:

Menjatakan, bahwa:
Nama : Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Pangkat : N.R.P.
Djabatan : J. M. Menteri Agama

Dianugerahi:

„Satyalantjana Gerakan Operasi Militer VI"

sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai tersebut dalam pasal 18 dari Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1958 tersebut No. 2 diatas.

Dikeluarkan di Djakarta,
pada tanggal 4 Nopember 1964.-

Menteri Koordinator Kompartimen
Pertahanan/Keamanan
Kepala Staf Angkatan Bersendjata,

Dr. A.H. Nasution
Djenderal T.N.I.

YAYASAN BUKU UTAMA

Piagam

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

YAYASAN BUKU UTAMA

menyampaikan Piagam ini kepada :

Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

sebagai penghargaan terhadap karyanya berupa Buku Bacaan Dewasa bidang Humaniora

yang berjudul Berangkat Dari Pesantren

diterbitkan oleh Gunung Agung

di tahun 1987 dan mendapat hadiah Yayasan Buku Utama.

Karya tersebut membantu masyarakat, khususnya generasi muda Indonesia, dalam memenuhi hasrat baca untuk memperluas pengetahuan, dan mendorong usaha pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.

Jakarta, 3 Oktober 1989

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
selaku
Ketua Umum Badan Pengurus
Yayasan Buku Utama,

Prof. Dr. Fuad Hasan

No. 3677/II/1996.

Piagam

Tanda Kehormatan

Presiden Republik Indonesia

menganugerahkan

Tanda Kehormatan

Bintang Mahaputera Adipradana

Kepada .

Nama : K.H. Saifuddin Zuhri (Almarhum).

Pangkat :

Jabatan : Mantan Menteri Agama Kabinet Kerja/Kabinet Dwikora (1962 - 1967).

Sesuai dengan undang-undag Nomor 6 Drt. Tahun 1959, dan Keppres RI Nomor 111 /TK/Tahun 1996 sebagai Kehormatan yang tinggi karena berjasa luar biasa terhada Negara dan Bangsa Indonesia

Jakarta 6 November 1996.

Presiden Republik Indonesia

Bacharuddin Jusuf Habibie

REKOMENDASI TOKOH NASIONAL

1. H. M. Taufiq Kiemas
   Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
2. Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., SU
   Ketua Mahkamah Konstitusi RI
3. Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si
   Menteri Agama RI
4. Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj
   Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama
5. Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, MA
   Ketua Umum PP Muhammadiyah
6. Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa
   Ketua Umum PP Muslimat NU
7. KH. Salahuddin Wahid
   Pengasuh Pesantren Tebuireng Jombang
8. Dr. KH. Tarmizi Taher
   Mantan Menteri Agama RI
9. Dr. KH. Muhammad Maftuh Basyuni, S.H.
   Mantan Menteri Agama RI

H. M. TAUFIQ KIEMAS
Ketua MPR RI

Jakarta, 04 Juni 2010

Perihal : Surat Rekomendasi Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional Bagi (Alm) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Kepada Yth.

Menteri Sosial Republik Indonesia
Jl. Salemba Raya No. 28
Jakarta 10430

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sebagaimana diketahui bahwa (Alm) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri adalah seorang ulama pada masa revolusi yang pada masa revolusi berjuang melawan penjajah, baik melalui perjuangan fisik dengan mengangkat senjata maupun melalui dakwah, serta terus mengabdi pada bangsa dan Negara semasa kemerdekaan melalui jalur politik dan kebudayaan hingga akhir hayatnya.

Mengingat jasa-jasanya yang luar biasa dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan Negara Republik Indonesia, bersama ini kami merekomendasikan agar (Alm) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dapat diangkat menjadi Pahlawan Nasional.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Hormat Saya,

H. M. TAUFIQ KIEMAS

SURAT REKOMENDASI
PENGUSULAN GELAR PAHLAWAN NASIONAL
BAGI (ALM) PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

Jakarta, Mei 2010

Kepada Yth,
Menteri Sosial Republik Indonesia
Jl. Salemba Raya No. 28
Jakarta 10430

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sebagaimana diketahui bahwa (alm) Prof. KH. Saifuddin Zuhri adalah seorang ulama yang pada masa revolusi berjuang melawan penjajah, baik melalui perjuangan fisik dengan mengangkat senjata maupun melalui dakwah, serta terus mengabdi pada bangsa dan Negara semasa kemerdekaan melalui jalur politik dan kebudayaan hingga akhir hayatnya.

Mengingat jasa-jasanya yang luar biasa dalam memperjuangkan kemerdekaan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, bersama ini kami merekomendasikan agar (alm) Prof. KH. Saifuddin Zuhri dapat diangkat menjadi Pahlawan Nasional.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pembuat Rekomendasi

Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U.

SURAT REKOMENDASI
PENGUSULAN GELAR PAHLAWAN NASIONAL
BAGI (ALM) PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

Jakarta, Mei 2010

Kepada Yth,
Menteri Sosial Republik Indonesia
Jl. Salemba Raya No. 28
Jakarta 10430

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sebagaimana diketahui bahwa (alm) Prof. KH. Saifuddin Zuhri adalah seorang ulama yang pada masa revolusi berjuang melawan penjajah, baik melalui perjuangan fisik dengan mengangkat senjata maupun melalui dakwah, serta terus mengabdi pada bangsa dan Negara semasa kemerdekaan melalui jalur politik dan kebudayaan hingga akhir hayatnya.

Mengingat jasa-jasanya yang luar biasa dalam memperjuangkan kemerdekaan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, bersama ini kami merekomendasikan agar (alm) Prof. KH. Saifuddin Zuhri dapat diangkat menjadi Pahlawan Nasional.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pembuat Rekomendasi

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si

SURAT REKOMENDASI
PENGUSULAN GELAR PAHLAWAN NASIONAL
BAGI (ALM) PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

Jakarta, Mei 2010

Kepada Yth,
Menteri Sosial Republik Indonesia
Jl. Salemba Raya No. 28
Jakarta 10430

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sebagaimana diketahui bahwa (alm) Prof. KH. Saifuddin Zuhri adalah seorang ulama yang pada masa revolusi berjuang melawan penjajah, baik melalui perjuangan fisik dengan mengangkat senjata maupun melalui dakwah, serta terus mengabdi pada bangsa dan Negara semasa kemerdekaan melalui jalur politik dan kebudayaan hingga akhir hayatnya.

Mengingat jasa-jasanya yang luar biasa dalam memperjuangkan kemerdekaan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, bersama ini kami merekomendasikan agar (alm).Prof. KH. Saifuddin Zuhri dapat diangkat menjadi Pahlawan Nasional.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pembuat Rekomendasi

Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj

SURAT REKOMENDASI
PENGUSULAN GELAR PAHLAWAN NASIONAL
BAGI (ALM) PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

Jakarta, Mei 2010

Kepada Yth,
Menteri Sosial Republik Indonesia
Jl. Salemba Raya No. 28
Jakarta 10430

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sebagaimana diketahui bahwa (alm) Prof. KH. Saifuddin Zuhri adalah seorang ulama yang pada masa revolusi berjuang melawan penjajah, baik melalui perjuangan fisik dengan mengangkat senjata maupun melalui dakwah, serta terus mengabdi pada bangsa dan Negara semasa kemerdekaan melalui jalur politik dan kebudayaan hingga akhir hayatnya.

Mengingat jasa-jasanya yang luar biasa dalam memperjuangkan kemerdekaan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, bersama ini kami merekomendasikan agar (alm) Prof. KH. Saifuddin Zuhri dapat diangkat menjadi Pahlawan Nasional.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pembuat Rekomendasi

Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, MA

SURAT REKOMENDASI
PENGUSULAN GELAR PAHLAWAN NASIONAL
BAGI (ALM) PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

Jakarta, Mei 2010

Kepada Yth,
Menteri Sosial Republik Indonesia
Jl. Salemba Raya No. 28
Jakarta 10430

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sebagaimana diketahui bahwa (alm) Prof. KH. Saifuddin Zuhri adalah seorang ulama yang pada masa revolusi berjuang melawan penjajah, baik melalui perjuangan fisik dengan mengangkat senjata maupun melalui dakwah, serta terus mengabdi pada bangsa dan Negara semasa kemerdekaan melalui jalur politik dan kebudayaan hingga akhir hayatnya.

Mengingat jasa-jasanya yang luar biasa dalam memperjuangkah kemerdekaan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, bersama ini kami merekomendasikan agar (alm) Prof. KH. Saifuddin Zuhri dapat diangkat menjadi Pahlawan Nasional.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pembuat Rekomendasi

Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa

SURAT REKOMENDASI
PENGUSULAN GELAR PAHLAWAN NASIONAL
BAGI (ALM) PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

Jakarta, Mei 2010

Kepada Yth,
Menteri Sosial Republik Indonesia
Jl. Salemba Raya No. 28
Jakarta 10430

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sebagaimana diketahui bahwa (alm) Prof. KH. Saifuddin Zuhri adalah seorang ulama yang pada masa revolusi berjuang melawan penjajah, baik melalui perjuangan fisik dengan mengangkat senjata maupun melalui dakwah, serta terus mengabdi pada bangsa dan Negara semasa kemerdekaan melalui jalur politik dan kebudayaan hingga akhir hayatnya.

Mengingat jasa-jasanya yang luar biasa dalam memperjuangkan kemerdekaan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, bersama ini kami merekomendasikan agar (alm) Prof. KH. Saifuddin Zuhri dapat diangkat menjadi Pahlawan Nasional.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pembuat Rekomendasi

KH. Salahuddin Wahid

SURAT REKOMENDASI
PENGUSULAN GELAR PAHLAWAN NASIONAL
BAGI (ALM) PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

Jakarta, Mei 2010

Kepada Yth,
Menteri Sosial Republik Indonesia
Jl. Salemba Raya No. 28
Jakarta 10430

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sebagaimana diketahui bahwa (alm) Prof. KH. Saifuddin Zuhri adalah seorang ulama yang pada masa revolusi berjuang melawan penjajah, baik melalui perjuangan fisik dengan mengangkat senjata maupun melalui dakwah, serta terus mengabdi pada bangsa dan Negara semasa kemerdekaan melalui jalur politik dan kebudayaan hingga akhir hayatnya.

Mengingat jasa-jasanya yang luar biasa dalam memperjuangkan kemerdekaan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, bersama ini kami merekomendasikan agar (alm) Prof. KH. Saifuddin Zuhri dapat diangkat menjadi Pahlawan Nasional.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pembuat Rekomendasi

Dr. KH. Tarmizi Taher

SURAT REKOMENDASI
PENGUSULAN GELAR PAHLAWAN NASIONAL
BAGI (ALM) PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

Jakarta, Mei 2010

Kepada Yth,
Menteri Sosial Republik Indonesia
Jl. Salemba Raya No. 28
Jakarta 10430

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sebagaimana diketahui bahwa (alm) Prof. KH. Saifuddin Zuhri adalah seorang ulama yang pada masa revolusi berjuang melawan penjajah, baik melalui perjuangan fisik dengan mengangkat senjata maupun melalui dakwah, serta terus mengabdi pada bangsa dan Negara semasa kemerdekaan melalui jalur politik dan kebudayaan hingga akhir hayatnya.

Mengingat jasa-jasanya yang luar biasa dalam memperjuangkan kemerdekaan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, bersama ini kami merekomendasikan agar (alm) Prof. KH. Saifuddin Zuhri dapat diangkat menjadi Pahlawan Nasional.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pembuat Rekomendasi

Dr. KH. Muhammad Maftuh Basyuni, S.H.

Surat Keterangan Nama Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk nama Akademi Perawat di Indramayu

Nama Prof. KH. Saifuddin Zuhri sejak tahun 1996 dipakai sebagai nama sebuah lembaga pendidikan kesehatan di Indramayu Jawa Barat yang sampai sekarang masih tetap eksis. Lembaga itu bernama Akademi Keperawatan Saifuddin Zuhri yang disingkat AKSARI, beralamatkan di Jl. Pahlawan No. 45 Indramayu. Penggunaan nama Almarhum untuk nama lembaga pendidikan tersebut diperkuat dengan (1) Surat Keterangan Yayasan Pendidikan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Indramayu/penyelenggara Aksari; (2) Surat Keterangan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu; dan (3) Foto/gambar lokasi Aksari di Indramayu, sebagaimana berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono Telepon (0234) 274190

INDRAMAYU

SURAT KETERANGAN

No : 469.2/ 2465 -Sekret/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DR. H. ODANG KUSMAYADI, MM..

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu

Dengan ini menerangkan bahwa di wilayah Kabupaten Indramayu terdapat Institut Pendidikan Akademi Keperawatan Saifuddin Zuhri, yang tetap eksis sejak tahun ajaran 1996/1997 hingga sekarang beralamat di Jl. Pahlawan No. 45 Indramayu.

Nama Saifuddin Zuhri diambil dari nama seorang ulama, pejuang dan mantan Menteri Agama Republik Indonesia.

Demikian surat keterangan ini diberikan, sehubungan rekomendasi akan diberikannya Gelar Pahlawan Nasional kepada Prof. KH. Saifuddin Zuhri.

Indramayu, 15 Juli 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDIDIKAN INDRAMAYU

DR. H. ODANG KUSMAYADI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP : 195611301984031002

YAYASAN WIDYA UTAMA

SK. MEN.HUK.HAM RI NO. C.857.HT.01.02.TAHUN 2005
SEKRETARIAT : JL. PAHLAWAN NO.45 (BUNDERAN KIJANG) INDRAMAYU
TELP./ FAX. (0234) 274357, 7009774 INDRAMAYU 45212

Indramayu, 15 Juli 2013

Perihal: Rekomendasi Usulan Gelar Pahlawan Nasional

bagi Bapak (alm) Prof.KH.Saifuddin Zuhri

Kepada Yang Terhormat
Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia
Jalan Salemba Raya No.28
Jakarta 10430

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh

Dengan hormat,

Kami turut merekomendasikan pemberian Gelar Pahlawan Nasional bagi Bapak Prof.KH.Saifuddin Zuhri (almarhum). Rekomendasi ini diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut;

1. Bapak Prof.KH.Saifuddin Zuhri adalah pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang berjuang melalui wadah perjuangan Kelasykaran Hizbullah/Sabilillah di daerah Banyumas/Purwokerto dan sekitarnya.

2. Beliau seorang ulama dan politisi yang piawai, pernah duduk sebagai anggota DPR/Konstituante (1955-1959), menjadi anggota DPRGR (1959-1962) dan pernah menjabat Sekretaris Jenderal/Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

3. Beliau pernah menjabat Menteri Agama Republik Indonesia (1962-1967) dengan prestasi luar biasa, yaitu tumbuh dan berkembangnya IAIN-IAIN di seluruh Indonesia, sekarang menjadi UIN.

4. Menjadi anggota DPR/MPR hasil pemilu 1971 dan pemilu 1977.

5. Beliau juga seorang wartawan/penulis yang produktif dan pernah menjadi Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi/Penanggung jawab Harian Duta Masyarakat (1954-1962).

6. Kami para kiai, pendidik, tokoh masyarakat dan unsur TNI di Kabupaten Indramayu dan Cirebon, 16 tahun lalu mendirikan institusi pendidikan keperawatan

dengan nama : Akademi Keperawatan Saifuddin Zuhri (AKSARI). Sudah mewisuda 15 kali lulusannya dan kini banyak bekerja di dalam dan di luar negeri. Pemberian nama Saifuddin Zuhri merupakan kesengajaan, mengingat beliau seorang tokoh, pejuang, ulama dan cendekia yang tidak berhenti berkiprah hingga akhir hayatnya.

7. Sehubungan dengan angka 1-6 diatas, kami merasa sangat bersyukur dan bergembira manakala Gelar Pahlawan Nasional dapat diberikan kepada Bapak : Prof.KH.Saifuddin Zuhri (almarhum), karena gelar tersebut diberikan kepada tokoh yang tepat.

Demikian, atas segala perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

AKADEMI KEPERAWATAN SAIFUDDIN ZUHRI (AKSARI) INDRAMAYU

Ketua Yayasan Widya Utama	Direktur AKSARI Indramayu
EKA ZAKARIA FADHIL	**Hj. WIDAKASIH, SKM, MBA**

Halaman Foto

Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (kanan) menyambut kedatangan Presiden RI, Ir. Soekarno (berpayung) pada acara pembukaan Muktamar Partai NU ke-23 di Solo, 25-29 Desember 1962.

Menerima ucapan selamat usai dilantik sebagai Menteri Agama dari Presiden Soekarno (1962).

Menjadi promotor dalam pemberian gelar Doktor Honoris Causa bidang Dakwah kepada Ir. Soekarno (1964)

Sebagai Menteri Agama mendirikan Lembaga Penerjemah al-Qur'an yang antara 1962-1966 berhasil menerjemahkan al-Qur'an sebanyak 30 juz.

Prof. KH. Saifuddin Zuhri (tengah) menerima Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Peristiwa Perang Kemerdekaan Kesatu dan Satyalancana Peris–tiwa Perang Kemerdekaan Kedua, disampaikan oleh Menteri Koordinator Perta–hanan dan Keamanan Jenderal A.H. Nasution (kiri) pada 4 November 1964.

Meluncurkan Cetakan Pertama al-Quran dan Terjemahannya Departemen Agama RI (1965)

Semasa menjadi Menteri Agama, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) tumbuh pesat di berbagai daerah di Indonesia. Saat meresmikan IAIN ar-Raniri di Banda Aceh (1963)

Meresmikan berdirinya IAIN Pangeran Antasari di Banjarmasin (1963)

Meresmikan Fakultas Tarbiyah IAIN Darussalam DI Aceh (1962)

Meresmikan berdirinya Sekolah Persiapan IAIN Purwokerto (1962)

Sebagai Menteri Agama menyampaikan pengarahan pada Musyawarah Antar Dekan Fakultas-Fakultas IAIN seluruh Indonesia di Purwokerto (1962)

Diwisuda sebagai Guru Besar Luar Biasa di Bidang Dakwah oleh IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1964)

Sebagai Menteri Agama sekaligus Pimpinan NU menyampaikan pidato Harlah NU ke-40 tahun 1966.

Menghadiri Pembukaan Konferensi Islam Asia Afirika (KIAA) di Bandung. Konferensi yang digagas oleh NU ini bertujuan menegaskan kemandirian nega–ra-negara yang baru merdeka dan membebaskan negara yang masih terjajah. (1965).

Prof. KH. Saifuddin Zuhri (ketiga dari kiri) bersama anggota Misi Parlemen Indonesia sebelum berangkat melakukan kunjungan ke berbagai negara Uni Sovyet dan Eropa Tengah, berpose bersama di depan Gedung DPR RI (1956).

Dalam suatu pertemuan pimpinan partai dengan Presiden Soekarno (ketiga dari kanan) di tahun 1959. Prof. KH. Saifuddin Zuhri (kiri) duduk berdampingan dengan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo (1956).